

**ANALISIS KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR) ACEH DALAM PEMBERITAAN HARIAN SERAMBI INDONESIA
(EDISI JANUARI 2017)**

Skripsi S-1

Diajukan Oleh

MELANI

NIM. 140401134

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh

MELANI
Nim: 140401134

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Rusnawati, S.Pd., M.Si
NIP. 19770309 200912 2 003

Pembimbing II,


Arif Hamdan S. Sos. I., M.A
NIDN. 0231078001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

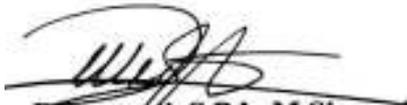
**MELANI
NIM. 140401134**

Pada Hari/Tanggal

**Jumat, 21 Januari 2019 M
15 Jumadil Awal 1440 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

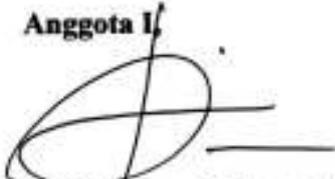
Ketua,


**Rusnawati, S.Pd., M.Si
NIP. 19770309 200912 2 003**

Sekretaris,


**Arif Ramdan S. Sos. I., MA
NIDN. 0231078001**

Anggota I,


**Ridwan Muhammad Hasan, Ph. D
NIP. 19710413 200501 102**

Anggota II,


**Taufik, SE. Ak., M.Ed.
NIP. 19770510 200901 1 013**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**


**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 19641129/199803 1001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : MELANI

NIM : 140401134

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Yang Menyatakan,



NIM. 140401134

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Untuk itu penulis memilih judul “**Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Dalam Pemberitaan Harian Serambi Indonesia (Edisi Januari 2017)**”. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Abdullah, dan ibunda tercinta Hafsa merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis

untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga juga kepada Abang ku tercinta Mukhalid, Abang Rahmat dan Abang Bahagia, juga kakak tercinta Yuslina dan Kakak Dahlia yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar tidak pernah berhenti untuk meraih harapan keluarga.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan ribuan terimakasih dengan tulus ikhlas kepada :

1. Ibu Rusnawati, S.Pd., M.Si Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Arif Ramdan, S.Sos.I., MA, sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bapak Dr. Hendra Syahputra, ST., MM. sebagai Ketua dan Ibu Anita, S.Ag., M.Hum Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan

kepada Ibu Rusnawati, S.Pd., M.Si sebagai Penasehat Akademik (PA) Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

3. Kepada Bapak Yarmen Dinamika yang telah meluangkan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk membantu memeberikan data/dokumen/keterangan untuk dapat melanjutkan penulisan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku tercinta, Mirza Frananda Kusuma, Sarah Fonna, Nurul Afrianti, Chairunnisa, Khaira Auliani, Ridia Armis, Said Rasul dan Samhudi serta semua kawan-kawan leting 2014 yang akan menjadi sarjana selanjutnya yang telah membantu semangat dan arahannya.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai tahap kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kiranya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya.Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 7 Januari 2019
Penulis,

Melani

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Dalam Pemberitaan Harian Serambi Indonesia Edisi Januari 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017, dan untuk mengetahui kinerja DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif menggunakan tehnik analisis isi (content analisi) untuk membedah teks dan kalimat dari sampel berita januari 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada Harian Serambi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Informasi tentang DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017 banyak menyangkut soal pembahasan RAPBA 2017 dimana status pembahasan belum menemui kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pembahasan tentang itu diberitakan hampir satu bulan lebih. Adapun pemberitaan kedua menyangkut Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) tahun 2018 yang membahas sebanyak 30 Qanun. Sedangkan kinerja DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia telah dilaksanakan sesuai tugas dan wewenang DPRA.

Kata Kunci: *Kinerja, Berita Harian Serambi Indonesia, DPRA*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Media Massa	10
1. Pengertian Media Massa	10
2. Jenis-jenis Media Massa	11
3. Fungsi Media Massa	13
C. Media Massa Cetak.....	15
1. Pemahaman Media Cetak.....	16
2. Karakteristik Media Cetak	16
3. Jenis-jenis Media Cetak	18
4. Kelebihan Media Cetak.....	19
D. Pemberitaan Media Massa	20
1. Pengertian Berita.....	20
2. Jenis-jenis Berita	21
3. Materi Berita	22

4. Nilai Berita	22
5. Kategori Berita	23
6. Proses Pemberitaan di Media Massa.....	26
E. Kinerja.....	27
1. Pengertian Kinerja.....	27
2. Indikator Kinerja	28
3. Kinerja Dalam Pemberitaan	28
F. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh	29
G. Tugas dan Fungsi Lembaga Legislatif.....	33
1. Konsep Trias Politica	33
2. Lembaga Legislatif.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan	36
B. Objek Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data.....	40

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Profil Serambi Indonesia	45
B. Informasi Tentang DPRA Dalam Pemberitaan Harian Serambi Indonesia Edisi Januari 2017	52
C. Kinerja DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
--------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi dari
Ketua
Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah
dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry.
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Lampiran 5 : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari Harian Serambi
Indonesia
Banda Aceh.
- Lampiran 6 : Kliping Koran Harian Serambi Indonesia Edisi Januari 2017
- Lampiran 7 : Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media cetak merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Media juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman publik tentang permasalahan terkini atau sedang berkembang. Pemerintahan yang ada di Aceh, salah satunya Pemerintahan DPRA terkait tentang RAPBA yang di sahkan dan terhadap kinerja DPRA dalam menjalankan tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan di Aceh dapat kita lihat lewat pemberitaan media cetak.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh DPRA dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya dengan memperlihatkan kinerjanya yang optimal. Dalam hal ini, walaupun kewenangan yang diperoleh DPRA pasca otonomi khusus sangat besar. Namun masih banyak yang menganggap kinerja DPRA belum optimal. Hal ini dapat di lihat pada kondisi sosial ekonomi Aceh sekarang, sampai saat ini Aceh merupakan sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. seharusnya DPRA lebih meningkatkan kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban moral dan politis anggota-anggotanya terhadap rakyat yang diwakilinya.

Tetapi hal demikian tidak dilakukan oleh mereka, melainkan, seperti yang sering termuat pada surat kabar, sebagian dari mereka (Anggota DPRA) disibukkan dengan aktivitas kepentingan partai mereka sendiri, disibukkan dengan pernyataan-pernyataan yang saling menyalahkan satu dengan lainnya, pencitraan diri, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan zaman yang begitu

pesat seperti ini, media massa menjadi salah satu wadah dimana bertempatnya berbagai informasi-informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik itu menyangkut masalah ekonomi, sosial politik, budaya dan lain sebagainya.

Media massa juga disebut sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula¹. Media massa secara umum memiliki lima fungsi, yaitu sebagai penyampai informasi, pendidikan, hiburan, control social, komersial (ekonomi).²

Media massa digunakan dalam komunikasi yang berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar (koran), radio, televisi, dan film bioskop, yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi, dan rekreasi, atau dalam istilah lain penerangan, pendidikan, dan hiburan. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan, artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan (penerima pesan) yang jumlah relative banyak. Jadi, untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif dalam mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikan. Oleh Karena itu, masyarakat tidak bias lepas dari informasi-informasi yang ada. Masyarakat akan terus mencari informasi dari mana pun dan dengan cara apa pun, asalkan mereka dapat memperoleh informasi yang mereka inginkan.

¹ Efendy Onong Uchana. *Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 407.

² Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 84.

Serambi Indonesia merupakan salah satu media massa cetak yang ada di Aceh yang menginformasikan berbagai masalah seperti persoalan ekonomi, budaya dan sosial politik yang ada di Indonesia dan juga khususnya masalah-masalah yang terjadi di Aceh. Salah satunya adalah persoalan politik yang sedang berlangsung di Aceh, sering kita temui di Harian Serambi Indonesia dimuatnya berita-berita sekilas tentang DPRA, baik itu terkait interaksinya dengan masyarakat, kegiatan dia dengan partainya, dan juga foto dirinya (seorang anggota DPRA) yang disertai tulisan hasil dari ungapannya tersebut.

Maka dari itu dengan perkembangan media informasi yang begitu pesat, Harian Serambi Indonesia merupakan salah satu media di Aceh yang menginformasikan segala sesuatu realita yang sedang terjadi di Aceh, termasuk salah satunya persoalan kinerja DPRA, terkait hal ini Harian Serambi mempunyai rubric khusus yaitu yang dinamakan serambi politik. Berbicara politik di Aceh, tentu saja tidak lepas dengan perananggota DPRA. Dengan Demikian terkait hal ini apasaja berita politik terkait anggota DPRA yang diberitakan oleh Harian Serambi Indonesia. Dan bagaimana kinerja DPRA kalau dilihat dari pemberitaan serambi politik edisi Januari 2017.

Berdasarkan uraian contoh kasus di atas, oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis kinerja DPRA melalui pemberitaan di Harian Serambi Indonesia. Maka dari itu ada pun judul penelitian yang di angkat **“Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Dalam Pemberitaan Harian Serambi Indonesia Edisi Januari 2017”**.

B. Batasan Masalah

Setelah peneliti memaparkan konsep-konsep diatas, untuk membatasi studi sekaligus mempermudah penelitian dalam pengelolaan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Dengan memperhatikan uraian diatas serta bertitik tolak dari rumusan masalah, peneliti memfokuskan penelitian ini pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh masa jabatan periode 2014-2019 dan menganalisis Harian Serambi Indonesia yaitu edisi bulan Januari 2017 khusus pada Serambi politik (*rubric politik*). Alasan penulis memilih edisi Januari karena pada Harian Serambi Indonesia edisi ini banyak pemberitaan tentang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja informasi tentang DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017?
2. Bagaimana kinerja DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui informasi tentang DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017.
2. Untuk mengetahui kinerja DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
2. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menguji pengalaman teoritis peneliti selama mengikuti studi di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

F. Definisi Operasional

1. Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dengan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.³ Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.⁴

2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang bertindak sebagai lembaga legislatif di

³ Wibowo, *Manajemen Kinerja, Edisi ketiga*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.7.

⁴ T. Yermias Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal 192.

Aceh dengan fungsi merumuskan kebijakan (*legislasi*) Aceh, mengalokasikan sumber daya (*budgeting*) dan pengawasan (*oversight*).⁵

Tugas DPRA, pada umumnya ialah memelihara atau menjaga, memajukan kepentingan rakyat, serta membantu atau mengawasi pemerintahan. Untuk mengatur kehidupan rakyat dalam suatu negara, perlu disusun undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam DPRA, dipilih dalam suatu pemilihan umum.⁶

3. Media Massa

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan televisi.⁷

4. Media Cetak

Media cetak adalah sebuah sarana atau alat komunikasi yang efektif, yaitu yang terletak antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya), serta menjadi sebuah penghubung maupun perantara dengan komunikan, tentunya alat maupun sarana yang berupa tulisan maupun tertulis.⁸ Media cetak merupakan alat, sarana, yang terletak antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya), serta menjadi penghubung dan perantara dari komunikator dan komunikan, tentunya alat maupun sarana yang digunakan berupa tulisan maupun tertulis.⁹

⁵ Herizal, *Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislas*, Journal of Governance And Public Policy, Vol. 4 No. 2 June 2017, hal. 1-2.

⁶ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 61.

⁷ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia...*, hal. 125.

⁸ Toto Tasmoro, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Gaya Meida Pertama, 1997), hal. 9.

⁹ Jakfar Puteh-Safullah, *Dakwah Tekstual & Kontekstual*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), hal. 102.

5. Berita

Berita berasal dari bahasa sangsekerta *Vrit* yang berarti “ada” atau “terjadi”, namun dapat pula dikatakan *Vritta* artinya “kejadian yang terjadi”. Istilah *Write* (menulis) dalam bahasa inggris berarti kata kerja yang menunjukkan aktivitas menulis. Sedangkan istilah *news* dalam bahasa inggris untuk maksud berita, berasal dari *new* (baru) dengan kotonasi kepada hal-hal yang baru. Menurut Dja'far H. Assegaf berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa (baru), yang dipilih oleh *staf* redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca.¹⁰

¹⁰ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media, Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 87.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dalam Skripsi Hidayatullah yang berjudul “Konflik Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh Dalam Pemberitaan Media Massa (Analisis berita Harian Serambi Indonesia edisi Januari-Maret 2014)”. Menjelang Pemilu Legislatif 2014, dua partai lokal di Aceh yakni Partai Aceh (PA) dengan Partai Nasional Aceh (PNA) terkesan berkonflik dalam memperoleh kursi parlemen Aceh. Faktor pemicu utama karena pengurus dan pendukung kedua partai lokal ini sama-sama kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang masih memiliki kekuatan dan basis pendukung di Aceh. Serambi Indonesia merupakan koran yang meraih keterbacaan yang tinggi di Aceh (*readership*).

Dalam Pemberitaan tentang konflik kedua kubu tersebut, Serambi Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini publik. Serambi Indonesia dapat membawa ke ranah perdamaian dan bahkan sebaliknya, membawa konflik ke arah yang lebih besar. Hal itu sangat tergantung bagaimana Serambi Indonesia menyajikan berita tersebut. Adapun menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Harian Serambi Indonesia mengemas dan menyajikan berita konflik PA dan PNA menjelang Pemilu 2014 di Aceh? Aspek yang dilihat yaitu terkait penyampaian informasi, tanggung jawab peredam konflik, dan alat moral, menjadi mata hati publik, berita berimbang isi propaganda.

Mekanisme penganalisaan bersifat kualitatif dengan pisau analisis isi (content analisis) untuk membedah teks dan kalimat dari sampel berita edisi Januari-Maret 2014. Dari hasil analisis terlihat Serambi Indonesia menyajikan

informasi yang faktual dan berimbang, kedua belah pihak yang terlibat pertikaian mendapat tempat dan ruang yang sama dalam pemberitaan. *Serambi Indonesia* memenuhi kewajiban *cover both sides* atau *cover all sides* dalam pemberitaan konflik tersebut. Kemudian juga menjadi mediasi dalam membentuk konflik, yaitu dengan memuat pernyataan kedua kubu yang bertikai terkait harapannya agar kepolisian mengusut semua kasus kekerasan yang melibatkan kedua partai tersebut.

Kajian terdahulu yang kedua dalam Skripsi Rahmi Fitriyah yang berjudul “Analisis Isi Pemberitaan Surat Kabar Lokal Tentang Dayah di Aceh (Studi Pada Harian *Serambi Indonesia* Edisi Januari- Juni 2015)”. Media massa sebagai institusi sosial memiliki kontribusi dalam menginformasi segala hal yang perlu diketahui publik, termasuk di dalamnya informasi tentang lembaga pendidikan islam, yaitu dayah. Melalui pemberitaan yang disiarkan, publik dapat mengetahui bagaimana kondisi dayah terkini. Hal ini akan berpengaruh terhadap pembentukan citra lembaga tersebut di mata masyarakat.

Studi ini ingin melihat bagaimana isi pemberitaan tentang dayah beserta unsur-unsurnya di harian *Serambi Indonesia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis tipe penelitian analisis isi dekriptif. Unit analisis yang cocok digunakan untuk penelitian ini adalah unit fisik. Sementara ruang lingkup studi ini mencakup pemberitaan tentang dayah di surat kabar *Serambi Indonesia* edisi Januari samapai Juni 2015 dengan jenis berita straight news.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *coding sheet* (lembar *coding*) secara manual, kemudian data-data disajikan dalam tabel frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian, Intensitas pemberitaan tergolong sedang karena tidak setiap hari Serambi Indonesia menyajikan berita tersebut. Serambi Indonesia telah memberikan ruang waktu yang cukup untuk pemberitaan tentang dayah. Namun masih banyak berita yang bersifar seremonial.

Kajian terdahulu yang ketiga dalam Skripsi Puji Astuti yang berjudul ” kedudukan Media Cetak Terbit Banda Aceh (Analisis antara pers Berkualitas, pers Populer, dan pers Kuning)”. Media massa cetak merupakan media tertua dan telah bertahan berabad – abad. Media cetak juga merupakan media tunggal yang menyajikan informasi kepada publik sebelum lahirnya media elektronik. Media cetak dapat di klasifikasikan menjadi tiga, yaitu : berkualitas, populer, dan kuning. Di Aceh terdapat 7 media cetak komersial.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana klasifikasi media cetak terbitan Banda Aceh menurut analisis isi prespektif pers berkualaita, pers populer, dan pers kuning. Tujuan penelitian ini untuk mengklasifikasikan media cetak terbitan Banda Aceh dan mengetahui alasan pimpinan media cetak dalam menempatkan medianya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitataif, dengan menganalisis berita – berita yang terdapat dalam pers berkualitas, pers populer, dan perskuning edisi Mei pada minggu ke 2 dan minggu ke 5 tahun 2014.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 4 dari 7 media cetak terbitan Banda Aceh dikategorikan sebagai pers berkualitas, 2 media cetak

sebagai pers populer dan 1 media cetak yang dikategorikan sebagai pers kuning. Penempatan media cetak berkualitas oleh pengelola media didasarkan pada menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan menjadikan media tersebut sebagai media yang bebas dan bertanggung jawab, sedangkan penempatan media cetak populer didasarkan guna menarik pembaca dengan warna – warna yang mencolok dan menekankan pada pemberitaan hiburan, serta media cetak kuning didasarkan pada berita hiburan guna memenuhi tuntutan masyarakat menengah kebawah.

B. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa media dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. *Association for education and komunikasi teknologi* (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Media merupakan perantara dari suatu proses komunikasi seperti ketika seorang menulis surat, maka media yang digunakan adalah kertas atau ketika menelpon menggunakan media telepon.¹

Media massa merupakan alat komunikasi yang begitu berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat. Melalui media massa, pesan dan ide dengan mudah dapat disampaikan kepada khalayak ramai hingga ke daerah yang tidak mungkin dikunjungi. Media massa sebagaimana yang dikenal dewasa ini adalah suatu nama kolektif bagi media cetak dan elektronik. Pada zaman modern, alat komunikasi

¹ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media...* Hal. 39.

massa merupakan satu di antara alat komunikasi yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat dan negara.

Media massa merupakan kekuatan sosial politik yang ampuh dan mempunyai hubungan rangkap dalam rangkap membangkitkan pendapat umum atau opini publik dalam masyarakat. Media massa bukan saja memantulkan atau merefleksikan pendapat-pendapat umum yang telah ada dalam masyarakat, tetapi juga menimbulkan, menciptakan, menempa, dan memupuk sendiri suatu opini tertentu melalui pemberitaan-pemberitaan.²

2. Jenis-Jenis Media Massa

a. Media Massa Cetak

Media cetak adalah sebuah media yang didalamnya berisi informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu saja. Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat disamping media elektronik dan juga media digital. Dan ditengah dinamika masyarakat yang demikian pesat, media cetak dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan dua pesaingnya yakni media elektronik dan media digital.

Meski demikian, bukan berarti media cetak sudah tidak mampu meraih konsumen yang menantikan informasi yang di bawanya. Media cetak atau surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri : terbit secara periodik, bersifat umum, isi aktual dan universal, mengenai apa saja dan dari mana saja di seluruh dunia yang mengandung nilai

² Sudirman, *Peranan Media Massa Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI di Aceh 1945-1949*,(Banda Aceh: Balai Peletarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012), hal. 1-2.

berita untuk mengetahui khalayak berita.³ Yang termasuk media cetak ialah surat kabar, buku, majalah, tabloid, dan bulletin.

b. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan alat elektronik untuk menyampaikan pesannya kepada khalayak. Penemuan baru dibidang tehnologi komunikasi dan informasi telah mendorong terus perkembangan media elektronik. Berbagai kemajuan dan perubahan terjadi dalam percepatan yang semakin meningkat.⁴

Dunia media elektronik adalah dunia siaran. Dunia siaran berbeda dengan dunia cetak-mencetak koran dan majalah, atau media cetak pers lainnya. Dunia siaran di antaranya mengenali bahasa televisi siaran sebagai bahasa percakapan. Bukan bahasa teks yang di baca, tapi bahasa audio, atau audiovisual yang ditangkap telinga dan mata pemirsa.⁵ Yang termasuk media elektronik adalah radio, televisi, dan film.

c. Media Online

Media online adalah media massa yang dapat kita temukan di internet. Sebagai media massa, media online juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Internet sebagai media online yaitu sebagai media baru yang memiliki beberapa karakteristik, seperti media yang berbasis tehnologi,

³ Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), hal. 105.

⁴ Asep Saefuk Muhtadi, *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktis*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 95.

⁵ Septiawan Santana, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 97.

berkarakter fleksibel, potensi interaktif, berfungsi secara privat dan publik, memiliki aturan yang rendah dan berhubungan.⁶

Media massa online tidak pernah menghilangkan media massa lama tetapi mensubsitusinya. Media massa online merupakan tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemukan dalam tehnologinya, menawarkan kemungkinan–kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.⁷ Media online merupakan media yang menggunakan gabungan proses media cetak dengan menulis informasi yang disalurkan melalui media elektronik, tetapi juga berhubungan dengan komunikasi personal yang berkesan perorangan.⁸

3. Fungsi Media Massa

a. Fungsi Pengawasan

Media massa merupakan sebuah medium di mana dpat digunakan untuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. Fungsi pengawasan ini dapat berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan persuasif. pengawasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Fungsi *Social Learning*

Fungsi utama dari komunikasi massa melalui media massa adalah melakukan *guiding* dan pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat. Media masa bertugas untuk memberikan pencerahan –pencerahan kepada masyarakat diaman

⁶Maria Asumpta Rumanti, *Dasar-Dasar Publik Relation: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal.101.

⁷Septiawan Santana, *Jurnalisme Kontemporer...*, hal. 137.

⁸Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Journalistik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal.

komunikasi itu berlangsung. Komunikasi massa dimaksudkan agar proses pencerahan itu berlangsung efektif dan efisien dan menyebar secara bersama di masyarakat secara luas.

c. Fungsi Penyampaian Informasi

Komunikasi massa yang mengandalkan media massa, memiliki fungsi utama, yaitu menjadi proses penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Komunikasi massa memungkinkan informasi dari institusi publik tersampaikan kepada masyarakat secara luas dalam waktu yang cepat sehingga fungsi informatif tercapai dalam waktu yang singkat.

Media massa atau berfungsi menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap-utuh, jelas-jernih, jujur-adil, berimbang, relevan, bermanfaat, dan etis.

d. Fungsi Transformasi Budaya

Fungsi informatif adalah fungsi-fungsi yang bersifat statis, namun fungsi-fungsi lain yang lebih dinamis adalah fungsi transformasi budaya. Komunikasi massa sebagaimana sifat-sifat budaya massa, maka yang terpenting adalah komunikasi massa menjadi proses transformasi budaya yang dilakukan bersama-sama oleh semua komponen komunikasi massa, terutama yang didukung oleh media massa.

Fungsi transformasi budaya ini menjadi sangat penting dan terkait dengan fungsi-fungsi lainnya terutama fungsi *social learning*, akan tetapi fungsi

transformasi budaya lebih kepada tugasnya yang besar sebagai bagian dari budaya lokal.

e. Hiburan

Fungsi lain dari komunikasi adalah hiburan, bahwa selama dengan fungsi-fungsi lain, komunikasi massa juga digunakan sebagai medium hiburan, terutama karena komunikasi massa menggunakan media massa, jadi fungsi-fungsi hiburan yang ada pada media massa juga menggunakan bagian dari fungsi komunikasi massa. Fungsi hiburan dari komunikasi massa saling mendukung fungsi-fungsi lainnya dalam proses komunikasi massa.⁹

C. Media Massa Cetak

1. Pemahaman Media Cetak

Media massa cetak adalah media massa yang menggunakan media cetak seperti kertas Koran yang di dalamnya ada tulisan yang berupa kata-kata dan kalimat, tetapi tulisan itu bukanlah tulisan biasa layaknya surat-menyurat melainkan tulisan yang disebut *news* (berita) yang teknik penulisannya mengikuti kaidah jurnalistik.¹⁰ Istilah Jurnalime sudah cukup untuk menyebutkan media komunikasi.

Kamus induk Webster mengartikan jurnalisme sebagai “bisnis pengelolaan, penyuntingan dan penyusunan naskah jurnal atau koran atau koran dan jurnal-jurnal (terbitan) itu sendiri”. Karena, jurnalisme adalah padanan istilah untuk media pada era ketika komunikasi secara umum dilakukan hanya oleh Koran dan majalah.

⁹ Burhan Burgin, *Sosiologi Komunikasi...*, hal. 79-81.

¹⁰ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media...*, hal. 42.

Peran Media cetak sangatlah penting, sehingga sulit dibayangkan Negara-negara modern bisa hadir tanpa keberadannya. Selama berabad-abad media cetak menjadi satu-satunya alat pertukaran dan penyebaran informasi, gagasan dan hiburan, yang sekarang ini dilayani oleh aneka media komunikasi. Selain menjadi alat utama menjangkau publik, media cetak juga menjadi sarana utama untuk mempertemukan para pembeli dan penjual.¹¹ Selama penerbitannya menghormati aturan dan hukum yang ada, Koran bisa memberitakan apa saja. Jika Koran tidak suka dengan calon idenpenden dari partai Demokrat, misalnya, Koran itu bisa menyatakannya terang-terangan.

2. Karakteristik Media Cetak

Karakteristik adalah ciri-ciri spesifik. Setiap media memiliki karakteristik sendiri yang sekaligus membedakannya dengan media lain. Menurut Haris sumadiria dalam buku jurnalistik Indonesia: menulis berita dan Feature, ada lima ciri spesifik media cetak, yaitu periodesitas, publisitas, aktualitas, universitas, dan objekifitas.¹²

a. Periodesitas

Periodesitas artinya *pers* harus terbit secara teratur, periodic, misalnya setiap hari, seminggu sekali, dua minggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali, atau tiga bulan sekali. *Pers* yang terbit tiap hari pun harus tetap konsisten dengan pilihannya, apakah terbit pada pagi hari atau sore hari. Sekali pagi hari seterusnya

¹¹ Williaml. Rivers, *Media Massa & Masyarakat Modern*, edisi 2, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 17.

¹² Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*, "Panduan Praktis Jurnalis Profesional", *RemaKaryani S., Ed, Cet, 2*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2006), hal. 32-35.

harus pagi hari. Begitu juga sebaliknya, sekali sore hari seterusnya harus sore hari. Kecuali kalau ada perubahan haluan yang diputuskan melalui rapat paripurna manajemen. *Pers* yang tidak terbit secara periodik, biasanya sedang menghadapi masalah manajemen, seperti konflik internal, krisis finansial, atau kehabisan modal.

b. Publisitas

Publisitas berarti *pers* ditujukan kepada khalayak sasaran umum yang sangat heterogen. Apa yang disebut heterogen menunjuk pada dua dimensi: geografis dan psikografis. Geografis menunjuk pada data administrasi kependudukan, seperti jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, status kawinan, tempat tinggal, pekerjaan atau profesi, dan perolehan pendapatan. Sedangkan psikografis menunjuk pada karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, dan adat istiadat.

c. Aktualitas

Aktualitas berarti informasi apapun yang disajikan media harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Secara etimologis, aktualitas (*actuality*) mengandung arti kini dan keadaan sebenarnya. Secara teknis jurnalistik, aktualitas mengandung tiga dimensi: kalender, waktu, dan masalah.

d. Universalitas

Universalitas adalah kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh dunia. Berkaitan dengan kesemestaan dilihat dari sumbernya dan dari keanekaragaman materi isinya. Dilihat dari sumbernya, berbagai peristiwa yang dilaporkan pers berasal dari empat penjuru mata angin. Dari utara, selatan, barat,

timur. Dilihat dari materi isinya, sajian terdiri atas beraneka macam yang mencakup tiga kelompok besar, yakni kelompok berita (*news*), kelompok opini (*Views*) dan kelompok iklan (*advertising*).

e. Objektivitas

Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tidak mengganggu perasaan dan pendapat mereka. Surat kabar yang baik harus dapat menyajikan hal-hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya.

3. Jenis-Jenis Media Cetak

- a. Surat kabar: yaitu kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur, bias setiap hari atau seminggu sekali.
- b. Majalah: yaitu kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano atau folio, dijilid dalam bentuk buku. Majalah biasanya terbit teratur, seminggu sekali, dua minggu sekali, atau sebulan sekali.
- c. Tabloid: yaitu kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran *broadsheet* (lebih kecil dari plano) dan dilipatkan seperti surat kabar. Tabloid biasanya terbit teratur seperti majalah.

- d. Bulletin: media ini hampir sama dengan tabloid. Cuma waktu penerbitannya yang tidak teratur, tapi berkala.
- e. Buku: yaitu media yang memuat tulisan tentang ilmu pengetahuan, esai, cerita panjang, kisah-kisah perjuangan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran setengah kuarto atau setengah folio dan dijilid rapi.¹³

Jenis-jenis tersebut telah dilakukan oleh Harian Serambi Indonesia dalam melakukan pemberitaan yang berkaitan dengan kinerja DPR.

4. Kelebihan Media Cetak

Kelebihan dari media cetak pertama adalah: *Repeatable* yakni dapat di baca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengklippingnya, sehingga suatu saat diperlukan dapat dilihat dan dibaca kembali. Kedua, analisis lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti dan faham terhadap isi berita tersebut. Analisa yang lebih mendalam dapat membuat orang berfikir lebih spesifik tentang isi tulisan itu. Kelebihan media cetak lainnya adalah:

- a. Media cetak bisa di simpan berulang-ulang karena media cetak berupa tulisan atau teks. Di saat pembaca ingin lebih memahami isi berita, maka pembaca bisa mengulang-ulang membacanya.
- b. Media cetak bisa dikumpulkan dan dibuat kliping. Terutama mengenai sebuah berita yang fenomenal ataupun berita-berita yang dianggap menarik.

¹³ Totok Juroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, cet 3, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 11.

- c. Media cetak di jual dengan harga yang cukup murah.
- d. Informasi di media cetak lebih jelas dan mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks ataupun investigatif. Terkadang disertai gambar atau foto yang lebih memperjelas isi berita yang ditampilkan.
- e. Bisa memilih berita mana yang ingin kita baca terlebih dahulu, misal tentang politik, ekonomi, olahraga atau lainnya. Tidak harus menyimak informasi satu persatu atau tidak harus berurutan.

D. Pemberitaan Media Massa

1. Pengertian Berita

Berita adalah laporaan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan bersama.¹⁴ Secara sosiologis berita adalah semua hal yang terjadi di dunia seperti yang dilukiskan oleh para pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar apa yang disiarkan radio, dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya menyangkut orang-orang tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Berita merupakan sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan.¹⁵

Williard C. Bleyer dalam *Newspaper Wroting and Editing* Menulis, berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena dia menarik minat dan mempunyai makna bagi pembaca surat

¹⁴ Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis...*, hal. 5.

¹⁵ Totok Juroto, *Manajemen Penerbitan...*, hal. 63.

kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut. Menurut William S. Maulsby dalam *Getting the News*, berita bisa didefinisikan sebagai suatu pemaparan secara benar dan tidak menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut (Haris Sumadiria, 2006:64).

2. Jenis-jenis Berita

Jenis-jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik antara lain:

- a. *Straight News*: adalah berita langsung, apa adanya, ditulis singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama (headline) merupakan berita jenis ini.
- b. *Depth News*: adalah berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang didalam suatu permukaan.
- c. *Investigation News*: adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.
- d. *Interpretative News*: adalah berita yang dikembangkan dengan atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan.
- e. *Opinion News*: adalah berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, dan sebagainya.¹⁶

3. Materi Berita

Dalam menyajikan suatu peristiwa, ada enam materi atau unsur-unsur yang mesti terdapat di dalam berita yaitu 5W+1H diantaranya *What* (apa), *When*

¹⁶ Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis...*, hal. 11-12.

(kapan), *Where* (di mana), *Why* (mengapa), *Who* (siapa), dan *How* (bagaimana). Keenam unsur tersebut merupakan suatu materi yang harus ada dalam suatu berita, karena bila salah satunya kurang, maka informasi yang di sampaikan tidak sempurna. *What* menjelaskan apa yang terjadi, *Where* menjelaskan di mana hal itu terjadi, *When* menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi, *Who* menjelaskan siapa yang terlibat dalam kejadian itu, *Why* menjelaskan kenapa hal itu terjadi dan *How* menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi.¹⁷

4. Nilai Berita

Kriteria berita (*news values*) merupakan istilah yang tidak mudah didefinisikan menurut Downie JR dan Kaiser. Kriteria umum nilai berita (*news value*) merupakan acuan yang dapat digunakan para jurnalis, yakni para reporter dan editor, untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Beberapa elemen nilai berita, yang mendasari pelapor kisah berita, adalah *Immediacy*, *proximity*, *Consequence*, *conflik*, *odd ity*, *sex*, *emotion*, *prominence*, *suspense*, *progress*.¹⁸ Empat unsur yang di kenal dengan nilai-nilai berita (*news values*) yaitu:

- a. Cepat, yakni aktual atau tepat waktu
- b. Nyata (faktual), yakni informasi yang berupa fakta bukan fiksi atau karangan.
- c. Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak.

¹⁷ Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis...*, hal.10.

¹⁸ Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis...*, hal. 17-18.

- d. Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis.¹⁹

Berikut ini adalah nilai berita yang dirangkumkan oleh Eni Setiati dalam bukunya.²⁰

- a. Kebermaknaan (*Signifinance*). Kejadian yang dapat mempengaruhi kehidupan orang banyak atau pembaca.
- b. Besaran (*Magnitude*). Kejadian menyangkut angka-angkat yang berarti bagi kehidupan orang banyak
- c. Kebaruan(*Timeliness*). Satu kejadian menyangkut peristiwa yang baru terjadi.
- d. Kedekatan (*Proximity*). Suatu kejadian yang berada didekat pembaca, baik kedekatan secara geografis maupun emosional.
- e. Kemasyhuran/sisi manusiawi (*Prominence/Human Interest*). Suatu kejadian yang memberi sentuhan rasa pada para pembaca mengungkap peristiwa orang terkenal tau publik figur, atau masyarakat biasa dalam peristiwa luar biasa.

5. Kategori Berita

Berbagai elemen nilai berita itu harus dipaparkan dengan bahasa pelaporan berita. Penulisannya tidaklah sama dengan menulis makalah, laporan pertanggungjawaban, atau hasil rapat. Dalam jurnalistik, ihwal penulisan berita ini mempunyai tempat khusus, dalam arti di bahas secara khusus melalui karakteristik dan batasan-batasan yang mesti dipenuhinya. Dalam kaitan ini jurnalistik

¹⁹ Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis....*, hal. 5-6.

²⁰ Eni Setiati, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), hal. 18-19.

membakukan beberapa kategori pemberitaan, seperti: *hard news*, *feature*, *sports*, *social*, *nterpretive*, *science*, *consumer*, dan *financial*.

- a. *Hard News*, Kisah berita ini merupakan desain utama dari sebuah pemberitaan. Isinya menyangkut hal-hal penting yang langsung terkait dengan kehidupan pembaca, pendengar, atau pemirsa. Kisah-kisahanya adalah hal-hal yang dianggap penting, dan karena itu segera dilaporkan oleh koran, radio, dan televisi.
- b. *Feature*, Berita *feature* adalah kisah peristiwa atau situasi yang menimbulkan kegemaran atau imaji-imaji (pencitraan). Peristiwanya bisa jadi bukan termasuk yang teramat penting harus diketahui masyarakat, bahkan kemungkinan hal-hal yang telah terjadi beberapa waktu lalu.

Kisahanya memang di desain untuk menghibur. Namun, tetap terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian, atau mengandung informasi, bagi khalayak berita. Subjek beritanya mungkin hanya mengisahkan kegemaran orang-orang. Tempat-tempat dikota yang telah dilupakan padahal penyimpanan nilai sejarah atau kultur atau kehidupan seorang sukses yang layak diteladani.

- a. *Sport News*, Berita-berita olahraga bisa maksud kekategori *hard news* atau *feature*. Selain dari, hasil-hasil pertandingan atau perlombaan atau rangkaian kompetisi musiman. Pemberitaan juga meliputi berbagai bidang lain yang terkait dengansport, seperti tokoh-tokoh olahraga, kehidupan para pemain olahraga yang hendak bertanding, kesiapan-

kesiapan kelompok olahraga didalam masa pelatihan, sampai para pengemar olahraga tertentu yang fanatik.

- b. Sosial *news*, Kisah-kisah kehidupan social seperti hot, bisa masuk kedalam pemberitaan *hard news* atau *feature news*. Umumnya meliputi pemberitaan yang terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, dari soal-soal keluarga sampai soal perkawinan anak-anak.
- c. *Interpretive*, Di kisah berita *interpretive* ini, wartawan untuk memberikan kedalaman anilisis, dan melakukan *survei* terhadap berbagai hal yang terkait dengan peristiwa yang hendak dilaporkan.
- d. *Science*, Dalam kisah berita ini, para wartawan berupaya untuk menjelaskan, dalam bahasa berita, ikhwal kemajuan perkembangan keilmuan dan tehnologi.
- e. *Consumer*, Para penulis *a comsumer story* ialah para pembantu khalayak yang hendak membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, baik yang bersifat kebutuhan primer dan sekunder, seperti peralatan rumah tangga sampai aksesoris pakaian.
- f. *Financial*, Para penulis *finansial news* memokus perhatiannya pada bidang-bidang bisnis, komersial, atau investasi. Para penulisnya umumnya mempunyai referensi akademis atau kepakaran terhadap subjek-subjek yang di bahasnya.²¹

6. Proses Pemberitaan di Media Massa

²¹ Septiawan Santana, *Jurnalisme Kontemporer...*, hal.20-22.

Gaye Tuchman dalam bukunya: *Making News* (1978) mengatakan bahwa berita merupakan konstruksi realitas sosial. Menurutnya tindakan membuat berita adalah tindakan mengkonstruksi realita itu sendiri, bukan penggambaran realita, berita yang disajikan media massa tidak sepenuhnya merepresentasikan fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya dan apa adanya. Berita adalah produk dari sebuah usaha proses menyusun fakta-fakta menjadi sesuatu yang menarik untuk dikonsumsi.

Tuchman mengaitkan profesionalisme berita dengan kemunculan kapitalisme korporat. Menurutnya, berita adalah sumber daya sosial yang konstruksinya membatasi pengalaman analitis dengan kehidupan kontemporer, dan melalui praktik-praktik rutusnya dan klaim para profesional berita untuk melakukan arbitras pengetahuan dan menyajikan pemaparan faktual.

Berdasarkan pendapatnya tersebut dapat diketahui bahwa proses pengonstruksian berita sesungguhnya melibatkan berbagai faktor (baik dari dalam media sendiri maupun diluar media) yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan. Faktor-faktor internal media antara lain terdiri dari institusi media, rutinitas media dan profesional media. Sedangkan faktor eksternal berupa struktur kekuasaan di luar media.²² Tahap-tahap pembuatan berita

- a. Menggunakan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita yaitu faktual, aktual, penting, dan menarik dengan mengisi dengan unsur berita 5W+1H.

²² Juni Wati Sri Rizki, *Kepemilikan Media & Ideologi Pemberitaan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), Hal. 55.

- b. Fakta dan data yang sudah dihimpun ditulis berdasarkan rumus 5W+1H dengan menggunakan Bahasa Jurnalistik.
- c. Komposisi naskah berita terdiri atas : *Head* (judul), *Date Line* (baris tanggal), yaitu nama tempat berlangsung peristiwa atau tempat berita dibuat, *plus* nama media, *Lead* (teras) paragraf pertama yang berisi bagian penting, *Body* (isi) berita uraian penjelasan dari yang sudah tertuang di *Lead*.

D. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Setiap organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi positif pada setiap karyawan melalui kinerja yang baik. Kinerja merupakan motivasi dan kemampuan. Menurut Gibson kinerja merupakan suatu tingkatan terhadap para pegawai dalam mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif. Rivai mendefinisikan kinerja sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pengertian-pengertian kinerja dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah di capai pegawai, dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi, dan hasil kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang diharapkan organisasi, melalui kriteria-kriteria atau standar kinerja pegawai yang berlaku dalam organisasi.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan. Menurut Bastian terdapat 5 indikator kinerja yang umumnya digunakan yaitu:

- a. Indikator masukan (*inputs*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya sumber daya manusia, informasi, kebijakan, barang atau jasa dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*output*), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefit*), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*), yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah dicapai.²³

3. Kinerja dalam Pemberitaan

Globalisasi media telah mempengaruhi kinerja jurnalisme, Deregulasi dan Globalisasi media informasi dan pemberitaan memberikan dampak yang cukup besar kepada ruang publik. Beberapa stimulannya, antara lain, ialah kinerja

²³Hessel Nogi, *Manajemen Publik*, (Jakarta PT Grasindo, 2005), Hal. 175.

produk berita global yang memakai kerangka *Anglo-America* dan *Western Information and news*.

Pada sisi positif, produk jurnalisme investigatif bisa menjadi pendulum esensi *democratic communication*, Investigasi media menjadi penghubung berbagai aksi kelompok sosial yang tengah mendalami politik dan ekonomi di banyak negara. Investigasi wartawan turut menginsiniasi beberapa periode krisis dan percepatan perubahan politik selama dua dekade dari abad ke-20.²⁴

E. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas kepala Pemerintahan Aceh.

DPRA merupakan lembaga perwakilan rakyat Aceh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Aceh. DPRA merupakan wadah untuk melaksanakan atau mufakat berdasarkan demokrasi pancasila dan undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945, undang- undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dan semangat MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

²⁴ Septiawan Santana, *Jurnalisme Investigasi*, (Jakarta: Yayasan Pistaka Obor Indonesia, 2003), hal. 342.

Rakyat Aceh (DPRA) seringkali menyasakan banyak kewajibannya setiap tahun, meskipun hak-haknya diambil seluruhnya tanpa sisa. Di antaranya, pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang sering terlambat, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan pembagunan. Contoh lain, dari puluhan qanun yang dikerjakan hanya satu dua yang mampu diselesaikan.²⁵

Anggota DPRA adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan pejabat Aceh. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRA. Dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No. 1 Tahun 2016 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut:

Fungsi DPRA:

- a. Legislasi
- b. Anggaran, dan
- c. Pengawasan .

Tugas dan Wewenang DPRA:

1. Merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konvenam internasional perserikatan bagngsa-bangsa mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan kepala pemerintah Aceh untuk mendapat persetujuan bersama.

²⁵ Hasan Basri M Nur, *Parnas VS Parlok*, (Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika, 2014), hal. 172.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan Peraturan Undang-undang Lainnya.
4. Membahas dan memberikan persetujuan secara tertulis rancangan qanun mengenai APBA yang diajukan oleh kepala Pemerintahan Aceh.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.
6. Mengusulkan pengangkatan pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Materi Dalam Negeri.
7. Memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Pemerintah Aceh.
8. Memilih Wakil Kepala Pemerintah Aceh dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
9. Memberi persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
10. Melakukan konsultasi dan persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh pemerintahan yang berkaitan langsung dengan Aceh.

11. Memberikan persetujuan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh.
12. Memberikan persetujuan rencana kerja antar daerah di Indonesia dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani rakyat dan Pemerintah Aceh.
13. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Pemerintah untuk penilaian Kinerja Pemerintah.
14. Mengusulkan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
15. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
16. Meminta bakla calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh untuk menyampaikan visi dan misi.
17. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan Aceh.
18. Menampung serta memperjuangkan aspirasi daerah dan rakyat Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.

19. Menyerahkan hasil pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri.
20. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Peraturan Kepala Pemerintah Aceh
 - b. Pelaksanaan keputusan Kepala Pemerintah Aceh
 - c. Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
 - d. Pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Aceh, dan
 - e. Pelaksanaan Kegiatan lembaga-lembaga lainnya di Aceh.

F. Tugas dan fungsi lembaga legislatif

1. Konsep trias politica

Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara lebih terjamin. Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan Negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rulemaking function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.²⁶

Menurut Montesquieu Kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut diprgang oleh satu orang atau satu badan, tetapi oleh tiga orang

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu...*, hal. 151.

atau badan yang terpisah. Di katakana olehnya kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akannada kemerdekaan. Akan merupakan mala petaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan anantara individu-individu.²⁷

2. Lembaga Legislatif

a. DPR

DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. DPR adalah suatu lembaga tertinggi negara yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Jumlah badan perwakilan pilihan rakyat yang dimiliki oleh suatu negara menentukan sistem apa yang dianut oleh negara bersangkutan.

Tugas DPR, pada umumnya ialah memelihara atau menjaga, memajukan kepentingan rakyat, serta membantu atau mengawasi pemerintahan. Untuk mengatur kehidupan rakyat dalam suatu negara, perlu disusun undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Di Indonesia, undang-undang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam DPR, dipilih dalam suatu pemilihan umum. Di Indonesia, pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali. DPR

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu...*, hal. 152-153.

atau parlemen pada umumnya mempunyai tugas memelihara, menjaga, serta memajukan kepentingan rakyat. Selain itu, DPR membantu dan mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama Presiden, DPR juga menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahun.²⁸ Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya, DPR di beri berbagai hak dan kewajiban oleh UUD 1945, yaitu.²⁹

1. Hak petisi (untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota).
2. Hak Budget (untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara/ daerah).
3. Hak interpretasi (untuk memintak keterangan terutama pada eksekutif).
4. Hak Amandemen (untuk mengadakan perubahan peraturan).
5. Hak Angket (untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus).
6. Hak Inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang–undang).
7. Hak Prakarsa.
8. Hak untuk mengajukan pernyataan pendapat.

Sedangkan kewajiban DPR sebagai berikut.

1. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Daerah.
3. Memperhatikan Aspirasi Masyarakat.

²⁸ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan...*, hal. 83-84.

²⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal. 318.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam penelitian karya ilmiah, metode penelitian sangat menentukan untuk efektif dan sistematisnya suatu penelitian sesuai dengan permasalahan di ajukan, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mendekati analisis isi.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok. Lexy J. Moleong mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu. Dengan didukung oleh penguasaan teori dan konseptualisasi yang kuat atas fenomena tertentu, peneliti mengembangkan gagasan kedalam kegiatan lainnya berupa listing berbagai alternatif metode penelitian untuk kemudian ditentukan secara spesifik mana yang paling sesuai.

Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fonomena dengan memanfaatkan dokumen (teks). Pada

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 27, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), hal. 4.

titik inilah, analisis isi kemudian banyak dipakai oleh disiplin ilmu lain. Kebanyakan bidang studi yang memanfaatkan dan menggunakan dokumen sebagai bahan penelitian.²

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian yang mempelajari isi media (surat kabar, radio, film, dan televisi) menggunakan analisis isi. Melalui analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan (tren) dari suatu isi.³ Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan menolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

A. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek penelitian pada media cetak yaitu Harian Serambi Indonesia yaitu dengan melakukan analisis koran Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017. Karena media ini menjadi satu media pilihan bagi masyarakat.

Sumber penelitian dalam kajian ini merupakan pengambilan sumber data penelitian menggunakan teknik "*purpose sampling*" yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus-menerus sepanjang penelitian, sampling ini bersifat *purposive* yaitu tergantung pada tujuan dan fokus suatu saat.

² Eriyanto, *Analisis Isi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 10.

³ Eriyanto, *Analisis Isi...*, hal. 11.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau tabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, buku, majalah, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Dokumentasi menurut Arikunto yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa klipring koran Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017, dengan tujuan untuk mencari tulisan di halaman utama dan rubrik Politik. Selama edisi tersebut penulis mengumpulkan 29 berita, 22 yang di muat di halaman utama dan 7 di serambi politik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan dengan pengumpulan data serta mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan menggunakan alat perekam.⁴ Wawancara adalah tatap muka antara periset

⁴ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 67.

(seseorang yang diharapkan informasia) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.⁵

Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁶

Wawancara dalam pengertian ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut Sugiono jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasia) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih⁸. Dalam hal ini penulis mewawancarai percakapan yang dilakukan dari kedua belah pihak, yaitu pewawancara

⁵ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 47

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hal. 78.

⁸ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal.

(*interviewer*) terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, wawancara ini langsung dengan Redaktur Harian Serambi Indonesia. Wawancara ini dapat dikembangkan apa bila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan.

Untuk melengkapi data penulis melakukan wawancara dengan Redaktur Harian Serambi Indonesia. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara

C. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data

lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul.⁹

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* menyatakan bahwa analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada.¹⁰

Setelah semua data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi maka semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada.

Setelah dilakukan proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya perlu adanya proses pemilihan data, kemudian dianalisis dan interpretasikan dengan teliti dan baik sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan hasil yang objektif dari suatu penelitian. Analisis data merupakan sebuah proses pencarian dan penataan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta: 2010), hal. 244.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

secara sistematis hasil-hasil dari sebuah pengamatan, khususnya yang dilakukan pada Harian Serambi Indonesia. Konteks ini untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang studi yang dikaji dan sekaligus untuk mengkajikan tentang kepentingan publik. Sebagaimana halnya sebuah temuan ilmiah.

Analisis data juga merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penulisan deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melibatkan kaitan variabel-variabel yang ada¹¹. Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas dan logis dengan cara mengaitkan berbagai data.

Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara dekriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan dokumentasi dengan disertai cuplikan berupa kalimat langsung disertai komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan resionalitas.

Analisis isi merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menganalisis terhadap data yang diperoleh melalui dokumentasi yang di

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

lakukan di Harian Serambi Indonesia tentang berita Politik yang berhubungan dengan Kinerja anggota DPRA.

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹² Peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.¹³ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 247.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 249.

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.¹⁴ Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang terhadap objek yang diteliti sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Komponen Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles dan Huberman.¹⁵

¹⁴ Miles Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal. 74.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 338

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Profil Serambi Indonesia

1. Sejarah Harian Serambi Indonesia

Awalnya, harian ini bernama Mingguan Mimbar Swadaya yang dipimpin oleh M. Nourhalidyn (1943-2000). Manajemen yang kurang baik pada masa itu, membuat mingguan yang berdiri pada 1970-an tersebut sering tak terbit. Tak ingin, korannya mati, M. Nourhalidyn kemudian bersama sahabatnya Sjamsul Kahar yang juga wartawan Kompas di Aceh, mencoba menjajaki kerjasama dengan harian Kompas Jakarta. Alhasil duet Nourhalidyn- Sjamsul Kahar berhasil meyakinkan harian terbesar di Indonesia itu, tepat pada 9 Februari 1989 mingguan Mimbar Swadaya akhirnya menjelma menjadi Harian Serambi Indonesia. M. Nourhalidyn duduk sebagai Pemimpin Umum dan Sjamsul Kahar sebagai Pemimpin Redaksi.¹

Dalam sejarahnya, Harian Serambi Indonesia sempat berhenti terbit karena diancam oleh Gerakan Aceh Merdeka, karena berita-beritanya dianggap lebih menguntungkan pihak TNI. Namun, hal itu dapat dilaluinya. Pada saat Tsunami meluluhlantakkan Aceh pada Desember 2004, Harian Serambi Indonesia pun ikut menjadi korban. Kantornya yang megah berikut mesin cetaknya di kawasan Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar hancur lebur. Tak kurang 55

¹ Dokumen Profil pada bagian Litbang, Harian Serambi Indonesia

karyawan, 13 diantaranya adalah redaktur dan wartawan senior hilang dihempang Tsunami mereka pun terpaksa berhenti terbit.²

Namun pada 1 Januari 2005 Harian Serambi Indonesia kembali ke pasar dengan menggunakan mesin cetak miliknya yang ada di kota satelit Lhokseumawe. Kantor yang baru berada di kawasan Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, Banda Aceh dan juga telah melakukan rekrutmen tenaga redaksi yang baru. Kini harian telah bertiras 35 ribu eksample perhari itu dipimpin oleh Sjamsul Kahar, sebagai Pemimpin Umum dan Mawardi Ibrahim, sebagai Pemimpin Redaksi.

Harian serambi Indonesia adalah sebuah surat kabar daerah yang terbit setiap pagi di seluruh penjuru Aceh, bahkan peredarannya sudah sampai ke luar daerah seperti Sumatera Utara dan Jakarta. Harian Serambi Indonesia ini tidak hanya memiliki percetakan di Banda Aceh tapi juga memiliki beberapa cabang percetakan jarak jauh seperti Lhokseumawe, dan di Blangpidie.³

Harian Serambi Indonesia merupakan surat kabar lokal yang terbit di Banda Aceh sejak 1989. Awalnya, harian ini bernama Mingguan Mimbar Swadaya yang dipimpin oleh M Nourhalidyn. Manajemen yang kurang baik pada masa itu, membuat mingguan yang berdiri pada 1970-an tersebut sering tak terbit. Halidyn M Nourhalidyn bersama Sjamsul kahar yang juga wartawan Kompas di Aceh, mencoba menjajaki kerjasama dengan harian Kompas Jakarta. Norhalidyn dan Sjamsul Kahar berhasil meyakinkan harian terbesar di Indonesia itu. Tepat pada 9 Februari 1989, mingguan Mimbar Swadaya akhirnya menjelma menjadi Harian

² Dokumen Profil pada bagian Litbang, Harian Serambi Indonesia

³ Dokumen Profil pada bagian Litbang, Harian Serambi Indonesia

Serambi Indonesia. M Nourhalidyn duduk sebagai pemimpin umum dan Sjamsul Kaha sebagai Pemimpi Redaksi.

Dalam sejarahnya, serambi sempat berhenti terbit karena di ancam oleh Gerakan Aceh Merdeka, karena berita-beritanya dianggap lebih menguntungkan pihak TNI,, Namun, hal itu dapat dilaluinya. Pada saat tsunami meluluh-lantakkan Aceh pada Desember 2004, serambi ikut menjadi korban. Kantornya yang megah berikut mesin cetaknya di kawsan Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, hancur lebur, tak kurang 55 karyawan, 13 diantaranya adalah redaktur wartawan senior hilang dihempang tsunami. Mereka pun terpaksa berhenti terbit beberapa saat.⁴

Namun pada 1 Januari 2005 Serambi Indonesia kembali terbit dengan menggunakan mesin cetak jauh di lhokseumawe. Kantor yang baru berada di Jl.Raya Lambaro Km 4,5 Meunasa Manyang, Ingin Jaya, Aceh Besar. Serambi Indonesia juga telah melakukan rekrutmen tenaga kerja yang baru dan kini harian serambi mencetak 35 ribu eksemplar perhari.

Sekarang, yang menjabat pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia adalah Sjamsul Bahar sekaligus dengan penanggung jawab dan redaktor senior. Kemudian pemimpin Redaksi dijabat Mawardi Ibrahim, Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika, Wakil Redaktur Pelaksana M Nasir Nurdin dan Asnawi Kumar, Sekretaris Redaksi Bukhari M Ali, Manajer M Ali, Manajer Produksi Ismail M Syah, dan Kabag TI dipercaya kepada Hari Teguh Patria.⁵

⁴ Dokumen Profil pada bagian Litbang, Harian Serambi Indonesia

⁵ Dokumen Profil pada bagian Litbang, Harian Serambi Indonesia

2. Cikal Bakal Harian Serambi Indonesia

Penerbit Harian Serambi Indonesia PT. Aceh Media Grafika berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers adapun yang merintis/mendirikan adalah Alm. M. Nourhalidyn dan Sjamsul Kahar sedangkan para pimpinan Harian Serambi Indonesia Sebagai Berikut:

- a. Pemimpin Umum / Penanggung Jawab: Sjamsul Kahar
- b. Pemimpin Redaksi: Mawardi Ibrahim
- c. Redaktur Senior: Sjamsul Kahar
- d. Kepala Litbang: Asnawi Kumar
- e. Redaktur Pelaksana: Yarmen Dinamika
- f. Wakil Redaktur Pelaksana: M Nasir Nurdin, Zainal Arifin M Noor
- g. Korlip & Manager Digital: Zainal Arifin M Noor
- h. Manager Produksi : Jamaluddin
- i. Sekretaris Redaksi : Bukhari M Ali
- j. Kabag TI : Said Najli.⁶

Adapun yang menjadi pengurus harian Serambi Indonesia adalag sebagai berikut:

- a. Pemimpin Perusahaan : Mohd Din
- b. Manajer Umum/PSDM : Erlizar Rusli
- c. Manajer Iklan : Hari Teguh Patria
- d. Manajer Sirkulasi : Saiful Bahri
- e. Manajer Keuangan : Budi Safatul Anam
- f. Manajer Percetakan : Fauzan Azwady

⁶ Dokumen Profil pada bagian Litbang, Harian Serambi Indonesia

g. Manajer Percetakan Umum : Firdaus Darwis

h. Manajer Promosi & EO : M Jafar.⁷

Redaktur : Yarmen Dinamika, M Nasir Nurdin, Ibrahim Ajie, Jamaluddin, Misbahuddin, Imran Thayeb, Rosnani HS, Muhammad Nur, Zainal Arifin M Nur, Yocerizal, Saifullah Ilyas, Safriadi Syahbuddin, Bedu Saini, M Anshar, Ansari Hasyim, Mursal Ismail, Taufik Hidayat.

Wartawan : M Nasir Yusuf, Herianto, Asnawi Ismail, Said Kamaruzzaman, Jalimin, Misran Asri, Muhammad Hadi, Yusmadi Yusuf, Budi Fatria, Mawaddatul Husna, Nurul Hayati, Tiara Fatimah, Subur Dani, Masrizal, Eddy Fitriadi, Reza Munawir, Hari Mahardhika. Sedangkan Ilustrator/Kartunis: Yuhendra Saputra, Tauris Mustafa.

Para pimpinan daerah: M Jafar, Saiful Bahri, Zaki Mubarak (Lhokseumawe), Nur Nihayati, Muhammad Nazar (Sigli), Zubir (Langsa), Rizwan, Zainun Yusuf (Blangpidie), Taufik Zass (Tapaktuan), Yusmandin Idris (Bireuen), Mahyadi (Aceh Tengah/Bener Meriah), Khalidin (Subulussalam) Fikar W Eda (Jakarta), Rahmad Wiguna (Medan).⁸

Harian Serambi Indonesia beralamat penerbit dan redaksi: di Jl.Raya Lambaro Km 4,5 Desa Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Aceh Besar. Telp: +62 651 635544 (Hunting). Fax: +62 651 637170 (Iklan /Sirkulasi/Percetakan/Pemasaran). Fax: +62 651 637180 (Redaksi). Email: redaksi@serambinews.com. Sedangkan di Lhokseumawe: Jl Medan-B.Aceh, Desa Meunasah Mesjid Cunda Lhokseumawe Telp. +62645 47072 – 47162. Di Jakarta: Tribun Network Jl

⁷ Dokumen Profil pada bagian Litbang, Harian Serambi Indonesia

⁸ Dokumen Profil pada bagian Litbang, Harian Serambi Indonesia

Palmerah Selatan No 3 Jakarta 10270 Telp: +6221 548 3008, 54080 888, 549

0666. Fax: +6221 536 96 583.⁹

3. Komisi dan Bidang Anggota DPRA

Komisi dan Bidang	Nama	Jabatan	Fraksi
Komisi I: Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	1. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH 2. Azhari 3. Tgk. Muhammad Harun, S.Sos 4. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI 5. M. Saleh, S.Pd.I 6. Drs. H. Djasmu Has, MM 7. M. Tanwier Mahdi, S.Ag, MM 8. Buhari Selian 9. Musannif, SE 10. Bardan Sahidi	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Golkar Nasdem Demokrat PAN PPP Gerindra-PKS
Komisi II: Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Tgk. Akhyar A. Rasyid 2. Dr. (HC). H. Jamidin Hamdani, S.Sos 3. Efendi, SE 4. Abubakar Bin Usman 5. Nurzahri, ST 6. Drs. H. Aminuddin, M.Kes 7. T. Rudi Fatahulhadi, S.HI 8. Dedi Syahrizal 9. Ir. H. Sulaiman Ary 10. H. Teuku Hamdani 11. Kartini Ibrahim	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Partai Aceh Demokrat Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Golkar Nasdem Nasdem PAN PPP Gerindra-PKS
Komisi III: Badan Keuangan dan Investasi	1. Jainuddin, SE 2. Ir. Alaidin Abu Abbas 3. Sulaiman, SE, M.S.M 4. Kautsar, S.Hi 5. Dr.Hj. Mariati MR, M.Si 6. Iberamsyah 7. Drs. Yunardi Natsir, MM 8. Ir. Hj. Liswani 9. Murdani Yusuf, SE 10. Drs. H. Asib Amin	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Partai Aceh Demokrat Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Golkar Nasdem PAN PPP Gerindra-PKS
	1. Tgk. Anwar Ramli, S.Pd	Ketua	Partai Aceh

⁹ Dokumen Profil pada bagian Litbang, Harian Serambi Indonesia

<p>Komisi IV: Bidang Pembangunan dan Tata Ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Asrizal H. Asnawi 3. Zulfadhli, A.Md 4. Abubakar A. Latif 5. Saifuddin 6. H. Zuriat Suparjo, SP 7. Hendri Yono 8. Ir. Saifuddin Muhammad 9. Samsul Bahri Bin Amren 10. H.T. Ibrahim, ST, MM 11. Tgk . Muhibbussabri. A.Wahab 12. Muhibbusubri, S. Ag 13. Drs. H. Abdurrahman Ahmad 	<p>Wakil ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>PAN Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Golkar Golkar Nasdem Nasdem Demokrat PAN PPP Gerindra-PKS</p>
<p>Komisi V: Bidang Pendidikan, Sains dan Tekhnologi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohd. Alfatah, S.Ag 2. Adam Mukhlis, SH 3. Siti Nahziah, S.Pd 4. Ir. Makrum Thahir 5. Ermiadi Abdul Rahman, ST 6. Hj. Nurlelawati, S.Ag 7. Zulfikar ZB Lidan 8. Ir. H.T. Hasdarsyah 9. Tgk. H. Syarifuddin, MA 10. Drs. H. Sjech Ahmaddin, MM 11. Tgk. H. Makhyaruddin Yusuf 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Pan Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Golkar Nasdem Demokrat Demokrat PPP Gerindra-PKS</p>
<p>Komisi VI: Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. T. Iskandar Daod, SE, M.Si, Ak 2. Sulaiman Ali 3. Rusli 4. Aisyah Ismail Daud 5. Tarmizi 6. Ummi Kalsum, S.Pd 7. Drh. Nuraini Maida 8. Hj. Fauziah HM. Daud, S.Pd 9. Ir. Hj. Fatimah 10. Darwati A. Gani 11. Zaenal Abidin, S.Si 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Demokrat PAN Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh Golkar Golkar Nasdem Nasdem Gerindra-PKS</p>

Komisi VII: Bidang Agama dan Kebudayaan	1. H. Ghufran Zainal Abidin, MA	Ketua	Gerindra-Pks
	2. Drs. H. Jamaluddin T. Muku, M.Si	Wakil Ketua	Demokrat
	3. Tgk. Khalidi	Sekretaris	Partai aceh
	4. Usman	Anggota	Partai Aceh
	5. Muhammad Isa	Anggota	Partai Aceh
	6. Yahdi Hasan	Anggota	Partai Aceh
	7. Wan Iskandar, SE	Anggota	Golkar
	8. Ramadhana Lubis	Anggota	Nasdem
	9. Ismaniar, SE	Anggota	PAN
	10. Darmawan	Anggota	PPP

Sumber: Dokumen di Bagian Perpustakaan DPRA

B. Informasi Tentang DPRA Dalam Pemberitaan Harian Serambi Indonesia Edisi Januari 2017

Informasi yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau disebut DPRA sangat beragam pada edisi Januari 2017, mulai dari kinerja dewan sampai pada hubungan dengan Plt Gubernur Soedarmo, ada beberapa pemberitaan yang telah disampaikan oleh Harian Serambi Indonesia pada edisi ini, sebagaimana penjelasan berikut.

Dimulai pada awal Januari, yaitu pada tanggal 2 Januari 2017 dimana informasi yang disampaikan pada kala itu adalah berhubungan dengan “APBA Dinego Ulang” dalam informasi kali ini menyangkut tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) kali ini Plt Gubernur kala itu Bapak Soedarmo mengatakan ada perkembangan mengenai APBA. Sepertinya DPRA mau membahas lagi dengan pemerintah Aceh pada tanggal 3 Januari dengan kesempatan waktu pengesahan yang lebih tepat” dalam kasus ini APBA pada akhirnya di pergunakan. Pada halaman selanjutnya pernyataan Plt Gubernur

dibantah oleh beberapa kalangan, dimana menurut kalangan bahwa Plt. Gubernur sangat tergesa-gesa dan terkesan egois.¹⁰

Pada tanggal 3 Januari kembali diberitakan informasi tentang DPRA, kali ini Fraksi Partai Aceh menyuarakan bahwa “pergub Ok, Qanun OK” dalam hal ini ketua F-PA Kautsar menyatakan bahwa “Plt Gubernur tak perlu pani, Insha Allah akhir Januari 2017 sudah bisa disahkan.” Dalam menyuarakan statemen ini F-PA melalui anggota Dewannya juga bersikap bahwa F-PA siap dengan pilihan apapun, mau di pergubkan ok, mau diqanunkan juga ok., selain itu sikapnya adalah kebijakan mempergubkan RAPBA 2017 jangan dijadikan alasan demi rakyat dan mempercepat pelaksanaan proyek RAPBA 2017. Dan terakhir sikapnya adalah yang perlu diawasi Plt Gubernur Aceh saat ini adalah kerja tim anggarannya. Dalam pemberitaan ini khususnya di terbitkan mengenai sikap Fraksi Partai Aceh tentang RAPBA yang akan di perbincangkan kembali.¹¹

Sedangkan pada tanggal 4 Januari 2017 Harian Serambi Indonesia kembali memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sikap Dewan yang Tetap Ikut Jadwal soal pembahasan RAPBA. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pimpinannya Bapak Dalimi menyatakan bahwa “Tawaran Plt Gubernur agar RAPBA 2017 disahkan pada tanggal 15 Januari sangat tergantung dengan pembahasan KUA-PPAS yang sedang berjalan”. Dalam berita selanjutnya pada tanggal yang sama (4 Januari) adanya pernyataan dari PeTa (Front Pembela tanah Air) dan GAAK (Gerakan Aceh Anti Korupsi) desak Pergubkan APBA. Pada hari Rabu tanggal 4 Januari tersebut hanya terdapat dua berita yang

¹⁰ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Senin tanggal 2 Januari 2017

¹¹ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Selasa tanggal 3 Januari 2017

menyangkut tentang kinerja DPRA, kedua berita tersebut sama-sama membahas tentang isu RAPBA yang sedang gonjang-ganjing statusnya ketika itu.¹²

Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 harian Serambi Indonesia kembali memuat informasi mengenai pernyataan ketua DPRA bahwa “Usul Aspirasi itu keinginan masyarakat” juga pada tanggal yang sama (5 Januari) Harian Serambi Indonesia juga memuat berita tentang APBA 2017 di Qanunkan hal ini terjadi berkat kesepakatan banggar DPRA dengan Plt Gubernur. Dalam hal ini juga Harian Serambi Indonesia juga memuat tentang poin kesepakatan dimana poinnya adalah” RAPBA 2017 tidak jadi dipergubkan melainkan di qanunkan. Deadline pengesahan digeser dari 15 menjadi 17 Januari 2017 dan alasan penggeseran jadwal karena tata tertib DPRA tidak boleh sidang paripurna pada hari libur, mengingat 14 dan 15 Januari itu hari Sabtu dan Minggu.¹³

Tanggal 6 Januari Harian Serambi Indonesia kembali menginformasikan tentang DPRA, kali ini pemberitaannya tentang DPRA Revisi jadwal pembahasan RAPBA hal ini dilakukan supaya bisa disahkan 17 Januari. Dalam pemberitaan lain di tanggal yang sama kembali di informasikan tentang pernyataan direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) tentang ada kepentingan politik dalam polemik RAPBA menyatakan “kemana arah pembangunan Aceh, kemana dibawa APBA selama ini? Apakah hanya untuk sekelompok masyarakat yang menerima manfaat dari APBA”.¹⁴

Pada hari yang sama (6 Januari) DPRA dalam hal ini ketua Fraksi Gerindra/PKS yaitu Abdurrahman Ahmad meminta Plt Gubernur agar Selektif

¹² Berita Harian Serambi Indonesia edisi Rabu tanggal 4 Januari 2017

¹³ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Kamis tanggal 5 Januari 2017

¹⁴ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Jum'at tanggal 6 Januari 2017

pilih Pejabat. Dalam permintaan kali ini Abdurrahman Ahmad menyatakan “kami tidak ingin ada lagi yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan anggaran”.¹⁵ Pada tanggal 7 Januari Plt Gubernur mengisyaratkan agar DPRA kembali mengecek ulang usulan dala RAPBA yang menyangkut tentang dana tak terduga sebagaimana mana beritanya usulan Rp 30 Milyar belum memadai, Plt Gubernur menyatakan “kami berharap daerah yang belum mengesahkan APBK 2017 agar memperhatikan alokasi dana untuk pos tak terduga itu”.¹⁶ Dalam hal ini wakil ketua DPRA Bapak Dalimi menyayangkan dengan pernyataannya “penanganan tanggap darurat dibutuhkan dana tidak sedikit makanya kita perlu mengalokasikan dana tak terduga yang lebih besar”. Dalam pemberitaan ini judul berita yang di angkat oleh Harian Serambi Indonesia adalah Aceh ‘Pelit’ Dana Bencana.

Dalam pemberitaan lain pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 wakil ketua DPRA bapak Irwan Johan menyatakan dalam berita yang dimuat Dana Pendidikan banyak untuk Fisik, “harusnya usulan program pendidikan lebih banyak untuk pelatihan guru, bukan fisik. Kecuali memang sangat dibutuhkan”. Dalam halaman yang sama juga adanya tanggapan dari Komisi V DPRA Bapak Mohd. Al Fatah yang berharap pihak Dinas Pendidikan terbuka dan akomodatif.¹⁷

Pada tanggal 11 Januari kembali Harian Serambi memuat berita Tentang DPRA kali ini Komisi I menyatakan Alokasi Dana KKR Harus Ditambah, dalam isi berita ini Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) mengusulkan alokasi anggaran sebanyak 3 milyar rupiah untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

¹⁵ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Jum’at tanggal 6 Januari 2017

¹⁶ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Sabtu tanggal 7 Januari 2017

¹⁷ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Selasa tanggal 10 Januari 2017

(KKR) dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).¹⁸

Tanggal 14 Januari Harian Serambi memuat berita tentang Pimpinan DPRA tak hadir, Rapat PPAS Batal. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari dalam pemberitaan yang di muat Harian Serambi Indonesia membuat judul tentang Plt Gubernur Tunggu Panggilan Mendagri dalam informasi kali ini mendagri akan memanggil Plt Gubernur untuk pembahasan Rancangan Qanun APBA 2017. Dalam pemberitaan lainnya pada tanggal yang sama (18 Januari) dalam judul berita tentang pernyataan Ketua DPRA bahwa Pergub belum memenuhi syarat.¹⁹

Pada hari Kamis tanggal 19 Januari berita tentang DPRA kembali dimuat, kali ini tentang Irwan Johan Tantang MaTA *Publish* Pengusul Proyek Siluman, dalam hal ini Irwan Johan menyatakan “jika memang ada oknum anggota DPRA yang melakukan itu (mengusul proyek siluman), bisa merusak nama baik lembaga DPRA”. Pada tanggal yang sama Harian Serambi Indonesia memuat berita tentang Mendagri Panggil Plt Gubernur terkait APBA 2017.²⁰

Harian Serambi Indonesi kembali memuat berita tentang APBA, kali ini tentang pernyataan Ombudsma yaitu sebaiknya APBA diqanunkan dan beri waktu hingga akhir Januari. Pada tanggal 20 Januari, Harian Serambi Indonesia kembali memuat berita tentang polemik antara Irwan Johan dengan MaTA, dalam kesempatan kali ini MaTA menyatakan bahwa Harusnya Irwan Johan Lebih tau, hal ini menyangkut kasus proyek siluman di tubuh DPRA.²¹

¹⁸ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Rabu tanggal 11 Januari 2017

¹⁹ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Sabtu tanggal 14 Januari 2017

²⁰ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Kamis tanggal 19 Januari 2017

²¹ Berita Harian Serambi Indonesia pada Jumat tanggal 20 Januari 2017

Pada Minggu 22 Januari kembali memuat berita tentang DPRA yang berkaitan dengan Anggota DPRA dan DPRK Datangi Polres Aceh Utara pertanyakan penanganan kasus Jhony, dalam hal ini ketua DPRA Tgk. Muharuddin menyatakan bahwa “kita meminta Kapolda Aceh untuk mengirim tim propam Polda Aceh guna melakukan investigasi dan verifikasi kejadian itu” dalam pemberitaan ini menyangkut tentang kasus penangkapan Juru Bicara Komite Peralihan Aceh/Partai Aceh (KPA/PA).²²

Tanggal 23 Januari 2017 Harian Serambi Indonesia kembali memuat berita yang menyangkut tentang polemik kasus proyek siluman di tubuh DPRA, kali ini judul yang di angkat adalah Proyek Siluman Masih jadi bahan Nego agar APBA diqanunkan. Dalam berita lainnya Ketua DPRA menyatakan tentang Kesepakatan Jakarta akan disikapi, pemberitaan ini menyangkut tentang APBA yang akan diselesaikan tepat waktu.²³ Tanggal 24 Januari kembali di beri informasi bahwa Sekda dan Ketua DPRA bertemu 15 menit dalam pertemuan ini tidak membahas KUA-PPAS, Kepala Dinas Keuangan Aceh menyatakan “sampai kini belum ada tambahan usulan proyek baru yang masuk dalam dokumen KUA-PPAS 2017”.²⁴

Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 kembali harian Serambi Indonesia memuat berita tentang KUA dan PPAS Diteken. Dalam pernyataan kali ini Badan Anggaran DPRA dan TIM Anggaran Pemerintah Aceh, akhirnya menyepakati kebijakan umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggran Sementara (KUA-PPAS) 2017 senilai 14,7 Triliyun Rupiah. Dokumen yang menjadi syarat

²² Berita Harian Serambi Indonesia edisi Minggu tanggal 22 Januari 2017

²³ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Senin tanggal 23 Januari 2017

²⁴ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Selasa tanggal 24 Januari 2017

pembahasan lanjutan RAPBA 2017 ini, ditandatangani atau diteken pada pukul 23.45 WIB.²⁵

Dalam pemberitaan dari Harian Serambi Indonesia pada tanggal 26 Januari 2017 memuat berita tentang Otsus Dibatasi, DPRA Mengeluh, dalam beritaan ini DPRA hanya boleh usulkan proyek di atas 500 Juta. Dalam hal ini DPRA melalui ketua DPRA Tgk. Muharuddin menyatakan “kami sekali mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat yang usulannya pada tahun anggaran 2017 ini belum bisa dipenuhi”.²⁶

Pada akhir bulan Januari tepatnya tanggal 31 Januari APBA 2017 ketuk palu, artinya polemik dan gonjang ganjing tentang status RAPBA selesai dan berakhir dengan diqanunkan dengan jumlah APBA 2017 Rp. 14,765 Triliyun. Dalam hari yang sama juga Harian Serambi Indonesia memuat berita tentang Sulaiman Abda atau di sapa Bang Leman Diaktifkan Sebagai Wakil Ketua I DPRA.²⁷

Dalam beritaan di Harian Serambi Indonesia bisa disimpulkan selama satu bulan di bulan Januari tersebut berita yang di muat tentang kasus kepastian status APBA Aceh dalam kajian ini melihat bahwa kinerja DPRA sangat disorot hampir setiap hari pemberitaannya di Harian Serambi Indonesia. Hal ini bisa dinilai bagaimana aktifnya Harian Serambi Indonesia untuk menginformasikan kepada masyarakat Aceh tentang kinerja DPRA yang menyangkut tentang disahkannya APBA 2017.

²⁵ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Rabu tanggal 25 Januari 2017

²⁶ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Kamis tanggal 26 Januari 2017

²⁷ Berita Harian Serambi Indonesia edisi Selasa tanggal 31 Januari 2017

Bila mengkaji dari segi jenisnya Harian Serambi Indonesia merupakan sebuah media yang didalamnya berisi informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu saja. Terbukti dari kinerja DPRA yang selalu diinformasikan kepada masyarakat, tidak hanya tentang kasus APBA juga berbagai macam kinerja DPRA yang menyangkut untuk kepentingan umum. Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat disamping media elektronik dan juga media digital. Harian Serambi Indonesia sudah mampu berada sebagai media untuk menginformasikan secara umum kepada masyarakat Aceh.

Bila dilihat dari segi karakteristik Harian Serambi Indonesia maka media ini berkarakter periodesidas artinya diterbitkan secara teratur, periodik, dan setiap hari. Berita atau informasi yang diterbitkan setiap hari dan tetap konsisten dengan pilihannya. Selain itu juga berkarakteristik publisitas berarti informasi ditujukan kepada khalayak sasaran umum yang sangat heterogen. Heterogen menunjuk pada dua dimensi: geografis dan psikografis. Geografis menunjukkan pada data administrasi kependudukan, seperti jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, status perkawinan, tempat tinggal, pekerjaan atau profesi, dan perolehan pendapatan. Sedangkan psikografis menunjuk pada karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, dan adat istiadat.

Selain dari dua karakteristik tersebut, harian Serambi Indonesia juga memiliki karakter aktualitas berarti informasi apapun yang disajikan media harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi atau sering disebut *update*. Selain itu juga karakter

dari Harian Serambi Indonesia juga universal yaitu kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh dunia. Berkaitan dengan kesemestaan dilihat dari sumbernya dan dari keanekaragaman materi isinya. Dilihat dari sumbernya, berbagai peristiwa yang dilaporkan pers berasal dari empat penjuru mata angin. Dari utara, selatan, barat, timur. Dilihat dari materi isinya, sajian terdiri atas beraneka macam yang mencakup tiga kelompok besar, yakni kelompok berita (*news*), kelompok opini (*Views*) dan kelompok iklan (*advertising*).

Serta karakter terakhir adalah objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tidak mengganggu perasaan dan pendapat mereka. Surat kabar yang baik harus dapat menyajikan hal-hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya.

C. Kinerja DPRA Dalam Pemberitaan Harian Serambi Indonesia Edisi Januari 2017

Dalam periode lima tahun masa tugas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentu saja memiliki capaian kerja, dan salah satunya adalah qanun-qanun yang disahkan. Hal tersebut diutarakan oleh Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika. Dalam hal ini juga Harian Serambi Indonesia akan tetap konsisten kepada untuk menerbitkan berita atau informasi yang seimbang dan transparan tanpa ada yang memihak.²⁸

²⁸ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

Untuk mewujudkan Harian Serambi menjadi penerbit berita yang seimbang, maka dalam penyajian berita banya proses yang dilakukan termasuk berita tentang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang sudah menjadi lembaga dalam membantu mensejahterakan rakyat dalam kebijakannya. Oleh karena itu, Harian serambi Indonesia melakukan proses penyajian berita sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Yarmen Dinamika sebagai Redaktur Pelaksana, menurutnya:

“Proses penyajian setelah dapat berita dari wartawan dikirimnya ke email redaksi. Redaksi@serambinews.com. Semua naskah baik itu berita, foto, surat pembaca, opini, dan puisi itu masuk semua ke situ, nantik di pisah – pisahkan oleh operator serambi yang mana di tunjukkan kepada redaktur yang ada di redaksi opini kemudian di kirim kepada pengeditnya. Selebihnya itu berada dalam jaringan yaitu lokal area network LAN. Nantik ditarik masing – masing untuk menentukan halaman pertama ada 5 s/d 7 berita, itu tugas editor pada halaman pertama saja. Terus kemudian redaktur kota, redaktur olahraga, dan seterusnya berita yang tidak masuk ke halaman pertama itu di tanggani oleh redaktur masing – masing.”²⁹

Dalam penyajian berita yang disampaikan kepada masyarakat agar dapat menjadi infomasi yang akurat, termasuk pemberitaan kinerja DPRA. Dalam bulan Januari 2017, hampir sebulan penuh berita yang disampaikan oleh Harian Serambi Indonesia tentang DPRA bertemakan tentang RAPBA yang masih banyak perdebatan tentang statusnya. Selain itu juga kinerja DPRA yang berpihak kepada rakyat, hal ini di muat bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui juga tentang kinerja lain dari DPRA selain yang berhubungan tentang pengesahan status APBA.

Dalam penyajian berita, Harian Serambi Indonesia bertanggung jawab untuk keakuratan berita yang disajikan termasuk yang menyangkut tantang kinerja

²⁹ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

DPRA dalam periode 2015-2019, proses pendetisian keakuratan berita melalui beberapa klasifikasinya. *Pertama* berita itu harus lengkap, objektif, menarik. Objektif adalah berita yang di keluarkan itu benar-benar tidak ada rekayasa informasi, tidak ada memutar balikkan fakta. Parameter itu ada 6 unsur yang harus di jaga oleh siapapun itu yang buat berita yaitu W+1H. Yaitu: who, what, where, why, when, how. Siapapun yang buat berita tidak boleh keluar dari pakem ini, karena sudah teruji secara ilmiah bahwa sebuah informasi akan dikatakan falit apabila 6 unsur ini terpenuhi. Editor juga menjalankan seperti itu namun hanya menambahkan satu aspek el-security dia harus pastikan bahwa berita itu tidak membahayakan bagi wartawan, tidak membahayakan bagi redaktur, tidak membahayakan bagi perusahaan, dan yang terpenting tidak bderesiko bagi narasumber.³⁰

Dalam pemberitaan hal-hal yang berkaitan dengan negatif adalah kalimat atau pernyataan yang memojokkan, merugikan posisi narasumber, kita harus memberikan konfirmasi kepada dia, dan dia mempunyai hak jawab sehingga jika di sajikan Koran itu sudah lengkap dan para pihak sudah memberikan haknya. Jangan sampai mulai dari penjudulan sampai ke isinya itu ada yang namanya praya badai pres jangan ada penghakiman oleh media. Kita melakukan dengan cara observasi dan identifikasi.³¹ Untuk menyajikan berita Harian Serambi Indonesia perlu menyeimbangkan pemberitaan atau informasi yang disampaikan, Ada dua cara atau langkah membuat berita berimbang:

³⁰ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

³¹ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

1. Observasi, sebuah berita tidak mungkin kita buat kalau kita tidak melakukan pengamatan langsung, karena kita akan menceritakan duduk masalah kepada orang lain.
2. Identifikasi, menemu kendali, kalau kita sudah dapat latar masalahnya sudah tahu jalan ceritanya baru kita olah beritanya.³²

Pada prosesnya Harian Serambi Indonesia terus melakukan dan meliput berita mengenai kinerja DPRA dan terus menyajikan berita yang terbaru sehingga rakyat Aceh tau bagaimana kinerja perwakilannya di parlemen. Namun dalam proses penyajian berita adanya proses tertentu mendapatkan berita tentang DPRA, hal ini dilakukan dengan adanya sistem penempatan wartawan berdasarkan pos-posnya, ada 26 kemudian dibagi.³³

Untuk memperoleh berita wartawan ada berpos di eksekutif, kantor gubernur, dinas-dinas, dan pos di DPRA. Wartawan yang meliput di DPRA itu sepanjang ada kegiatan DPRA terkait yang 3 tugas pokok yaitu legislasi, Anggaran dan pengawasan. Maka wartawan yang di utus harus meliputnya, apalagi DPRA relatif terbuka. Setiap kali ada kegiatan-kegiatan itu pasti di kabarin ke wartawan Serambi. Kemudian wartawan sendiri yang memiliki kepentingan, misalnya tahun ini masuk pengesahan anggaran, sudah disahkan atau belum itu wartawan yang mengawasi anggota DPRA.³⁴

³² Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

³³ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

³⁴ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

Dalam pelaksanaannya, wartawan dalam hal ini memiliki fungsinya tersendiri, yaitu fungsi pengawasan, dalam fungsi ini media massa merupakan sebuah medium dimana dapat digunakan untuk pengawasan terhadap aktivitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada umumnya. Fungsi pengawasan ini dapat berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan persuasif dari anggota DPRA. pengawasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.³⁵

Selain itu juga dalam fungsi ini dapat memantau kinerja dari DPRA hal ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat terhadap anggota DPRA yang telah di pilih pada pemilu sebelumnya. Dengan adanya pengawasan dari wartawan akan menentukan lagi nasib anggota dewan untuk periode selanjutnya apa bila dia kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legeslatif pada periode selanjutnya.³⁶

Dalam pemberitaan kali ini, Harian Serambi Indonesia sangat berperan dalam proses penyajian informasi tentang kinerja DPRA bagi masyarakat Aceh, dimana dalam pemberitaannya di awal tahun biasanya anggota DPRA duduk rapat untuk menentukan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) misalnya dalam tahun ini (2018) hingga Desember membahas tentang 30 Qanun, itu diberitakan

³⁵ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

³⁶ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

nanti pencapaian dievaluasi juga apakah dalam 6 bulan dari 30 itu tercapai 15 di antaranya.³⁷

Untuk mencapai program yang telah ditetapkan anggota DPRA dituntut untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mencapai target yang sudah diketahui publik, kedua wartawan juga ikut mendorong dan mengingatkan anggota DPRA agar jangan lalai dengan tanggung jawab, di samping itu juga wartawan terus memantau proses kerja dan juga capaian kinerja untuk terus disampaikan kepada masyarakat Aceh.³⁸

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan DPRA sangat perlu pengawasan dan juga pemberitahuan, terutama kepada masyarakat tentang kinerja anggota dewan yang telah dipilih pada 5 tahun lalu, sehingga menjadi patokan bagi masyarakat apakah anggota dewan tersebut masih layak duduk di kursi parlemen untuk tahun kedepan, selain itu juga masyarakat perlu tau sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh anggota dewan tersebut.

³⁷ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

³⁸ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika pada tanggal 11 Desember 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara wawancara dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Informasi tentang DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Januari 2017 banyak menyangkut soal pembahasan RAPBA 2017 dimana status pembahasan belum menemui kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pembahasan tentang itu diberitakan hampir satu bulan lebih.
2. Pemberitaan kedua menyangkut Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) tahun 2018 yang membahas sebanyak 30 Qanun.
1. Kinerja DPRA dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia telah dilaksanakan sesuai tugas dan wewenang DPRA.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi Harian serambi Indonesia dan juga kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, diantaranya:

1. Untuk Harian Serambi Indonesia agar terus menyajikan dan menginformasikan berita tentang kinerja DPRA yang berimbang, guna masyarakat Aceh dapat mengetahui tentang kinerja apa saja yang telah dicapai DPRA dalam melakukan program pro rakyat.

2. Untuk DPRA agar terus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan isi kampanye ketika hendak menuju ke kursi legeslatif, dan juga bertanggung jawab dengan amanah yang telah dipercayakan rakyat, sehingga rakyat Aceh dapat hidup sejahtera dalam bingkai kebersamaan dan keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiant. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004.
- Burgin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Burgin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Canggara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Eriyanto. *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Juroto, Totok. *Manajemen Penerbitan pers*, cet 3 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Keban, T. Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media, 2004.
- Mondry. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia 2008.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988.
- Nur, Hasan Basri M. *Parnas VS Parlok*. Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika, 2014.
- Nogi, Hesse. *Manajemen Publik*. Jakarta PT Grasindo, 2005.
- Rivers, William. *Media Massa & Masyarakat Modern* .Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rizki, Juni Wati Sri. *Kepemilikan Media & Ideologi Pemberitaan*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016.

- Rumanti, Maria Asumpta. *Dasar-Dasar Publik Relation: Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Safullah, Jakfar Puteh. *Dakwah Tekstual & Kontekstual*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Santana, Septiawan. *Jurnalisme Investigasi*, Jakarta:Yayasan Pistaka Obor Indonesia, 2003.
- Santana, Septiawan. *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Saefuk, Muhtadi Asep. *Jurnalistik pendekatan Teori Dan Praktis*. Jakarta: PT Logos Ilmu, 1999.
- Setiati, Eni. *Ragam Jurnalistik Baru Dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005.
- Syafie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Tamburaka, Apriad.. *Literasi Media, Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Raja wali Pers, 2013.
- Syamsuddin, Nazaruddin. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Pustaka Jakarta: Utama Grafiti, 1990.
- Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sudirman. *Peranan, Media Massa pada masa perjuangan mempertahankan Kemerdekaan RI di Aceh 1945-1949*.Banda Aceh: Balai Peletarian Sejarah Dan Nilai Tradisional. Banda Aceh, 2012.
- Tasmoro, Toto. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Meida Pertama, 1997.
- Uchana, Efendy Onong. *Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja, Edisi ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

JURNAL

- Herizal. *Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislatif*, *Journal of Governance And Public Policy*, Vol. 4 No. 2 June 2017
- Haris Sumadira. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature“ Panduan Praktis Jurnalis Profesional”*, Rema Karyani S., Ed, Cet, 2. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006.
- Jaweng Robert Endi. *Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 40, No. 2, 2011, hal. 160-176.
- Trimaya Arrista, *Kinerja Fungsi Legislasi DPR RI Masa Bakti 2009-2014*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 3, hal. 245-258, 2013.

Pedoman wawancara

1. Bagaimana Pola kerja di Redaksi Harian Serambi Indonesia?
2. Bagaimana proses penyajian berita di Harian Serambi Indonesia?
3. Bagaimana penyajian berita di halaman utama dan Serambi Politik?
4. Bagaimana karakteristik berita yang dicari Harian Serambi Indonesia?
5. Jenis berita apa saja yang di muat Harian Serambi Indonesia?
6. Bagaimana Harian Serambi Indonesia menjamin Keakuratan informasi suatu berita?
7. Adakah aturan khusus untuk wartawan Harian Serambi Indonesia selain kode Etik Jurnalistik?
8. Bagaimana Harian Serambi Indonesia memuat berita berimbang?
9. Bagaimana cara Redaksi Harian Serambi Indonesia mengambil informasi tentang DPRA?
10. Bagaimana pemberitaan Kinerja DPRA dalam Harian Serambi Indonesia?

Dokumentasi Wawancara





Nomor : Istimewa
Lamp. : 1 (satu) eks.
Hal : Permohonan Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

di -
Darussalam - Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melani
NIM : 140401134
Sem / Jur : IX / Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) / Komunikasi
No. HP : 082368063833
Judul Skripsi : *Analisis Kinerja Anggota dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dalam pemberitaan Harian serambi Indonesia (Edisi januari-maret 2017).*

Dengan ini memohon kepada Bapak berkenan kiranya merevisi judul skripsi saya menjadi:

Analisis Kinerja Anggota dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dalam pemberitaan Harian serambi Indonesia (Edisi Januari 2017).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan:

- 1 (satu) lembar fotokopi SK Skripsi yang telah dilegalisir.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Darussalam, 21 Desember 2016
Pemohon,



Melani
NIM. 140401134

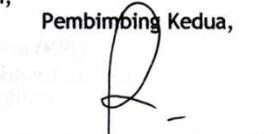
Mengetahui/menyetujui,

Pembimbing Utama,



Rusnawati S.pd., M.Si
NIP. 197707092009122003

Pembimbing Kedua,



Arif Ramdan S.Sos.I., M.A
NIP. NIDN 0231078001

Catatan Jurusan KPI dan Pembimbing:

.....

.....

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.5879/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2018

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Rusnawati, S.Pd., M.Si (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Arif Ramdan S.Sos.I., M.A..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Melani
NIM/Jurusan : 140401134/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) .
Judul : Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dalam Pemberitaan Harian Serambi Indonesia (Edisi Januari 2017)

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Desember 2018 M
13 Rabi'ul Akhir 1440 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabao Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.5461/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2018

Banda Aceh, 21 November 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Melani / 140401134**

Semester/Jurusan : IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Alamat sekarang : Panteriek Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Dalam Pemberitaan Harian Serambi Indonesia (Edisi Januari 2017).*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an, Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan,



Managed by 

Serambi

INDONESIA

online: <http://www.serambinews.com>. e-mail: serambinews@yahoo.com • redaksi@serambinews.com
ya Lambaro Km.4,5 Tanjung Permai, Manyang PA Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar - Banda Aceh Telepon : (0651) 635544 (Hunting), Fax : (0651) 637170 - f

SURAT KETERANGAN

No: 02RED-SI/I/2019

Pimpinan Harian *Serambi Indonesia* dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Melani
NIM : 140401134
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Harian *Serambi Indonesia* dengan judul "**Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dalam Pemberitaan Harian Serambi Indonesia (Edisi Januari 2017)**" yang dimaksudkan sebagai penyelesaian tugas akhir (skripsi).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Januari 2019

Serambi Indonesia


INDONESIA

Bukhari M Ali
Sekretaris Redaksi

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry
2. Arsip

Senin
2 Januari 2017

Plt Gubernur jangan Egois

BANDA ACEH - Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang akan menetapkan APBA 2017 dengan peraturan gubernur (pergub), menuai beragam komentar dari banyak kalangan. Media sosial sebagai arena interaksi masyarakat di dunia maya heboh sejak isu ini menggelinding setelah

Plt Gubernur Aceh menyatakan dua hari lalu.

Ada kalangan menilai, keputusan Plt Gubernur tidak tepat dan tergesa-gesa. Namun, tak sedikit pula yang setuju dengan keputusan tersebut. Bahkan, mereka yang setuju, menganggap ini langkah yang tepat ketim-

■ ke halaman 7

APBA Dinego Ulang



di depan jenazah Ayku Ak, salah satu korban serangan pada malam tahun baru di sebuah klub malam (11). Serangan pada malam pergantian tahun itu menewaskan 30 orang.

Keterangan Terbaru Plt Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Pelaksanaan Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Muzjen TNI (Purn) Soedarmo mengemukakan, pihaknya DPRD - melalui Sekretaris Dewan, A Hamid Zeti SH MHum - bersedia untuk membahas lagi skemba mengenai Peraturan dan Keputusan Pemerintah Aceh (KAPBA) 2017 setelah ia menanggapi keputusannya Serambi pada hari Jumat (30/12) bahwa APBA 2017

akhirnya dipergulakan. Hal itu diungkapkan Soedarmo kepada Serambi via telepon dari Jakarta tadi malam. "Ada perkembangan terbaru dari mengenai APBA. Seperti yang mereka (DPRD) mau membahanya lagi dengan Pemerintah Aceh pada tanggal 3 Januari dengan kesepakatan waktu pembahasan dan penge-



Se "Serambi"

Plt Gubernur jangan Egois

BANDA ACEH - Keputusan Pelaksanaan Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Muzjen TNI (Purn) Soedarmo yang akan menetapkan APBA 2017 dengan peraturan gubernur secepatnya, memuat beragam kontroversi dari banyak kalangan. Media sosial seban-

Plt Gubernur Aceh menya- rakaninya dua hari lalu. Ada kalangan menilai keputusan Plt Gubernur tidak tepat dan egois juga. Namun, tak sedikit pula yang setuju dengan keputusan tersebut. Bahkan, mereka

"Ada perkembangan terbaru mengenai APBA. Seperti yang DPRD mau membahanya lagi dengan Pemerintah Aceh pada tanggal 3 Januari dengan kesepakatan waktu pengesahan yang lebih cepat."

APBA Dinego

sahan yang lebih cepat," kata Soedarmo.

Menurut Soedarmo, ia tak menampik tawaran yang disampaikan pihak DPRA melalui sekretaris dewan itu. Apalagi, DPRA mengisyaratkan akan mengikuti *deadline* pembahasan yang ditawarkan eksekutif, yakni pada 7 Januari Qanun APBA-nya sudah disahkan.

Tapi karena tanggal 7 sudah sangat dekat dan diawatirkan *deadline* tersebut tak terkejar, maka Plt Gubernur Aceh setuju kalau tanggal pengesahan APBA digeser paling lama menjadi tanggal 15 Januari 2017. "Begitulah hasil negosiasi dengan Sekwan yang menghubungi saya Minggu pagi," kata Soedarmo.

Menurut Soedarmo, ia ikut saja pada tawaran yang diajukan pihak DPRA supaya APBA bisa disahkan secara bersama oleh eksekutif dan legislatif. "Tapi yang penting mari kita persamakan persepsi, yakni untuk membangun Aceh. Ini penting, supaya masyarakat bisa segera menikmati dana-dana pembangunan yang dianggarkan di dalam APBA 2017," ujarnya.

Soedarmo yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengatakan, pihaknya juga mendapat laporan dari stafnya di Aceh tentang banyaknya pihak yang menyesalkan penetapan pergub APBA itu. Malah ada pula figur yang dalam sikap reaktifnya berpandangan miring terhadap Soedarmo.

"Nah, kita lihat dulu hasil pembahasan pada tanggal 3 Januari nanti, baru kita tindak lanjuti sikap reaktif mereka. Saya sudah menyimpan kok semua dokumen ajuan mereka dengan nilai yang cukup signifikan dengan bentuk program semuanya hibah. Nilainya kecil-kecil dan *nyalahin* aturan. Nah, itu yang saya tidak mau," ujar Soedarmo.

Ia tegaskan bahwa pihaknya tidak akan memperpanjang jadwal pembahasan dan pengesahan APBA 2017. "Ya, saya hanya tolerir hingga 15 Januari. Pengesahan APBA tidak boleh terlambat lagi seperti yang sudah-sudah. Makin cepat kita sahkan, makin cepat rakyat bisa menikmati dana-dana pembangunan yang dianggarkan dalam APBA," kata Soedarmo.

Mantan direktur Badan Intelijen Negara (BIN) Wilayah Sumatera dan Kalimantan itu juga menegaskan bahwa ia sama sekali tak punya kepentingan pribadi atau kepentingan politik apa pun dalam pembahasan dan pengesahan APBA 2017. "Percepatan ini semata-mata untuk rakyat. Ini bukan untuk saya. Mereka itu jangan berpikrinya ke saya. Tapi justru yang dilihat dan diprioritaskan itu seharusnya kepentingan masyarakat," ucap Soedarmo.

Bakal tak ada
Dalam bagian lain penjelasannya, Plt Gubernur Aceh itu menyatakan jika pada akhirnya APBA 2017 jadi dipergubkan, maka akan banyak anggaran yang dipangkas. Misalnya, program-program setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bakal tak ada lagi. Tapi, program yang prioritas itu tetap lanjut. Terutama yang sifatnya penanganan bencana alam. Misalnya, sangat dibutuhkan

■ Sambungan halaman 7

pembangunan bendungan pencegah banjir di Patek Aceh Jaya, dan di Aceh Singkil. "Singkil itu banjir melulu, maka perlu segera kita bikin bendungan dan anggarannya kita plotkan di APBA 2017," sebut Soedarmo.

Gaji rutin pegawai juga tak ada masalah jika APBA 2017 dipergubkan. "Gaji rutin itu pasti terus dibayarkan," ujarnya. Di sisi lain, program DPRA juga bakal tak ada lagi. Itu akan hilang dan dipangkas. Termasuk anggaran untuk kunjungan dewan ke luar negeri.

Sehari sebelumnya, Soedarmo mengatakan, "Tanpa mengesampingkan peran dan mahakarya teman-teman di DPRA periode 2014-2019 terhadap qanun-qanun Aceh dari hati yang paling dalam kami sampaikan bahwa kami akan melakukan pilihan terakhir, yaitu menetapkan pergub terhadap APBA 2017," kata Soedarmo, Jumat lalu.

"Jujur kami katakan, kami lelah dan sangat mennguras energi maupun waktu yang tidak sedikit untuk bernegosiasi dalam pembahasan RAPBA 2017. Sebelum kebijakan ini kami putuskan, kami juga sudah sangat toleran terhadap dinamika tarik ulur yang diperankan anggota dewan yang terhormat di DPRA demi kesepakatan pembahasan ini," demikian Soedarmo. (dik)

■ Inti pernyataan plt gub

- DPRA ingin bahas lagi APBA 2017 dengan Pemerintah Aceh pada 3 Januari dengan kesepakatan waktu pengesahan yang lebih cepat
- DPRA isyaratkan akan mengikuti *deadline* pembahasan yang ditawarkan eksekutif, yakni pada 7 Januari Qanun APBA-nya disahkan
- Plt Gubernur Aceh setuju kalau tanggal pengesahan APBA digeser paling lama menjadi tanggal 15 Januari 2017
- Adalah penting menyamakan persepsi dalam membangun Aceh supaya masyarakat bisa segera menikmati dana-dana pembangunan yang dianggarkan di dalam APBA 2017

H
SELASA 3 JANUARI 2017 ♦ 4 RABI'UL AKHIR 1438 H

F-PA: Pergub OK, Qanun OK

“ Plt Gubernur tak perlu panik, insya Allah akhir Januari 2017 RAPBA 2017 sudah bisa disahkan. ”

-- KAUTSAR,
Ketua F-PA DPRA



BANDA ACEH - Sejumlah fraksi di DPRA menanggapi biasa-biasa saja rencana Plt Gubernur Aceh, Soedarmo mempergubkan RAPBA 2017. Bahkan, Fraksi Partai Aceh (F-PA) menyatakan siap dengan pilihan apa pun. "Mau dipergubkan, mau diqanunkan juga ok."

kata Ketua F-PA DPRA, Kautsar kepada *Serambi*, Senin (2/1) menanggapi rencana Pergub RAPBA 2017.

DPRA, kata Kautsar, tidak bisa menahan kalau Plt Gubernur Aceh akan mempergubkan RAPBA 2017

■ ke halaman 7

■ sikap fraksi dewan

- F-PA siap dengan pilihan apa pun, mau dipergubkan ok, mau diqanunkan juga ok
- Kebijakan mempergubkan RAPBA 2017 jangan dijadikan alasan demi rakyat dan mempercepat pelaksanaan proyek RAPBA 2017.
- Yang perlu diawasi oleh Plt Gubernur Aceh saat ini adalah kerja tim anggarannya

■ kealaman 7

Serambi Politik

6

Rabu
4 Januari 2017

PeTA dan GAAK Desak Pergubkan APBA

MEULABOH - Desakan agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo, segera menandatangani peraturan gubernur (Pergub) APBA 2017 terus menguat. Setelah sebelumnya disampaikan GeRAK, SMPA, dan MaTA, kini giliran Front Pembela Tanah Air (PeTA) Aceh dan Gerakan Aceh Anti Korupsi (GAAK) menyampaikan desakan yang sama.

"Pak Plt Gubernur Aceh segera teken Pergub. Jangan didengar lagi saran-saran yang mengatakan masih terbuka pembahasan bersama DPRA, karena pengesahan (APBA) nanti akan terus molor," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PeTA Aceh, Amiruddin, kepada *Serambi*, Selasa (3/1).

Selama ini, sebutnya,

pengesahan APBA selalu terlambat. Dampak yang ditimbulkannya sangat luas, dan dapat menghambat pembangunan di Aceh. "Seharusnya Pemerintah Aceh dan DPRA malu dengan kabupaten/kota yang APBK-nya selalu disahkan tepat waktu," pungkas dia.

Amiruddin juga meminta DPRA untuk tidak berlebihan dalam menyampaikan pendapat dan tanggapan kepada Plt Gubernur Aceh. DPRA lanjutnya, perlu mendukung upaya Plt Gubernur yang akan melakukan Pergub.

"Kami masyarakat sudah jenuh melihat sikap yang dipertontonkan DPRA yang terkesan mendukung, tetapi di sisi lain menolak. Kita berharap DPRA men-

dukung APBA dipergubkan," tambah Amiruddin.

Desakan serupa juga disampaikan LSM Gerakan Aceh Anti Korupsi (GAAK). Menurut lembaga tersebut, Pergub merupakan langkah yang sangat tepat. "Kami mendukung penuh kebijakan Plt yang akan menerbitkan Pergub Soal APBA 2017," kata Juru Bicara GAAK, Sayyid Fuadi Al Aydrus, dalam siaran persnya.

Pengesahan APBA 2017 dikatakannya, jangan sampai molor mengingat ketergantungan ekonomi Aceh terhadap APBA sangat besar. "Kondisi ekonomi Aceh itu sangat tergantung APBA. Kalau sampai Maret 2017 disahkan, yang sayang kan masyarakat," imbuh Sayyid. (riz/yos)

Dewan Tetap Ikut Jadwal

■ Soal Pembahasan RAPBA



“Tawaran Plt Gubernur agar RAPBA 2017 disahkan pada 15 Januari sangat tergantung dengan pembahasan KUA-PPAS yang sedang berjalan.”

-- DALIMI,
Pimpinan DPRA

BANDA ACEH - Pembahasan RAPBA 2017 oleh pihak DPRA tetap dilakukan sesuai jadwal meski Plt Gubernur Aceh telah mengundurkan waktu pengesahan RAPBA 2017 paling lambat 15 Januari 2017.

Pimpinan DPRA bersama ketua-ketua fraksi dan ketua-ketua komisi, Selasa (3/1) melaksanakan rapat untuk merespons tawaran Plt Gubernur Aceh yang memberi waktu paling lambat 15 Januari 2017 untuk pengesahan RAPBA 2017.

“Saat ini Banggar Dewan memfokuskan pembahasan dokumen KUA dan PPAS yang telah diteken Wakil Ketua DPRA II Irwan Johan pada 30 Desember 2016. Jika dalam perjalanan pembahasannya nanti bisa dipersingkat untuk bisa sampai pada pembahasan RKA dan pengesahan RAPBA 2017 pada 15 Januari 2017, akan kita kabarkan ke TAPA dan

■ ke halaman 7

Dewan Tetap

Plt Gubernur," kata Wakil Ketua III DPRA, Dalimi kepada *Serambi*, Selasa (3/1).

Dalimi didampingi Irwan Johan mengatakan, jadwal pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2017 itu dibuat Banggwa Dewan pada 29 Desember 2016 atau sehari setelah Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2017 kepada Banggwa DPRA.

Itu artinya, kata Dalimi, keinginan DPRA mengqanunkan RAPBA 2017 cukup besar. Namun begitu, jika DPRA diminta oleh Plt Gubernur Aceh untuk mengesahkan RAPBA 2017 senilai Rp 14,5 triliun pada 15 Januari 2017, hal itu sangat tergantung dengan hasil pembahasan KUA dan PPAS yang sedang berjalan.

Irwan Johan mengatakan, kendati jadwal resmi pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2017 pada 3-24 Januari 2017, tapi sudah dilakukan sejak 29 Desember 2016.

Perkembangan terakhir hasil pembahasan dokumen KUA dan PPAS, menurut Irwan Johan, cukup bagus. Jika besok Banggwa DPRA dan TAPA merasa sudah cukup membahas dokumen KUA dan PPAS 2017, bisa dilanjutkan pada pembahasan dokumen RKA RAPBA 2017.

Baik Irwan maupun Dalimi sama-sama menegaskan,

jika TAPA bersama Plt Gubernur Aceh ingin RAPBA 2017 itu diqanunkan, tetap direspons dengan mengintensifkan pembahasan dokumen KUA dan PPAS. Misalnya, jadwal semula delapan hari, tapi dalam perjalanannya selesai 4 hari, maka pembahasan akan dilanjutkan kepada dokumen RKA RAPBA 2017 yang menurut informasi sudah disiapkan oleh SKPA.

Prinsip dewan, kata Dalimi dan Irwan Johan, RAPBA 2017 baiknya diqanunkan, tapi jika dalam masa pembahasan yang sedang berjalan, Plt Gubernur Aceh tidak yakin dengan dewan bisa mengesahkan RAPBA 2017 pada 15 Januari 2017, kemudian ingin mempergubkan, DPRA tidak bisa menahan.

Banggwa harus tahu

Menurut pimpinan DPRA, mayoritas anggota Banggwa Dewan ingin tahu struktur penganggaran dan alokasi RAPBA 2017 sebesar Rp 14,5 triliun. Yang paling utama adalah menyangkut urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infra-

■ Sambungan halaman 1

struktur, pemberdayaan ekonomi, agama, sosial, olahraga, budaya, dan lainnya. "Jika sudah sesuai aturan dan program maupun kegiatan sudah mengacu kepada RPJM 2012-2017, mari kita sahkan bersama," kata Dalimi.

Dalimi mengatakan, kalau RAPBA dipergubkan, ada beberapa kerugian bagi rakyat Aceh. Pertama, jika dalam pertengahan tahun nanti diperkirakan terjadi sisa anggaran yang banyak, tak bisa dilakukan perubahan RAPBA karena dasar hukumnya belum ada.

Kedua, pagu yang diusul eksekutif tahun ini Rp 14,5 triliun lebih besar dari tahun lalu Rp 12,8 triliun. Anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk pembiayaan penanganan rehab rekons bencana alam seperti gempa bumi di Pijay, Pidie, Bireuen, banjir di Aceh Timur dan sejumlah daerah lainnya.

"Kalau berpikir untuk kesejahteraan rakyat, kita harus qanunkan RAPBA 2017 itu agar tahun depan tak banyak silpanya," demikian pimpinan DPRA. (her)

■ perkembangan di dewan

dokumen KUA dan PPAS yang telah dilaksanakan sejak 29 Desember 2016

● Proses pembahasan dokumen KUA dan PPAS cukup bagus bahkan jika dalam satu dua hari ini Banggwa DPRA dan TAPA merasa sudah cukup membahas dokumen KUA dan PPAS 2017, segera dilanjutkan pada pembahasan dokumen RKA RAPBA 2017.

Kamis
5 Januari 2017

Ketua DPRA: Usul Aspirasi Itu Keinginan Masyarakat

BANDA ACEH - Setelah sepakat untuk menetapkan RAPBA 2017 dengan qanun (bukan peraturan gubernur/pergub -red), agenda kedua yang akan dibahas kembali oleh DPRA bersama Plt Gubernur Aceh dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) adalah tentang usulan program aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRA.

"Untuk program aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui

individu anggota dewan, akan dibahas secara khusus bersama Plt Gubernur Aceh pada hari Senin (9/1)," kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin kepada wartawan sesuai rapat dengan Plt Gubernur Aceh, Soedarmo di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Rabu (4/1).

DPRA, kata Muharuddin, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Plt Gubernur Aceh yang akhirnya

mau ikut membahas penyusunan jadwal pembahasan RAPBA 2017 bersama Banggar.

Sebelumnya, kata Muhar, dalam pembahasan jadwal dan RAPBA, Gubernur Aceh selalu mempercayakan tim anggarannya yang diketuai Sekda Aceh Dermawan MM dan para asisten serta sejumlah kepala dinas untuk membahasnya bersama dengan

■ ke halaman 7

Ketua DPRA:

■ Sambungan halaman 1

Banggar DPRA.

Tapi, setelah bergulirnya informasi bahwa RAPBA 2017 akan dipergubkan oleh Plt Gubernur dan pihak dewan mempersilakan untuk dipergubkan ataupun diqanunkan, Plt Gubernur Aceh akhirnya langsung meminta ikut untuk mendengar penjelasan TAPA dan Banggar DPRA.

Plt Gubernur mempertanyakan, kenapa masa pembahasan dokumen KUA-PPAS 2017 terlalu panjang, apa tidak bisa direvisi kembali menjadi lebih singkat? Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan, Wakil Ketua III DPRA, Dalimi, dan anggota Banggar yang hadir dalam rapat Banggar menyatakan, jadwal itu sudah disepakati dalam rapat Banggar DPRA sebelumnya. Tapi jika Plt Gubernur sepakat mau merevisinya, silakan saja dan

Banggar siap menyusunnya bersama kembali dalam rapat ini.

Setelah mendengar tawaran dari Banggar, Plt Gubernur pun berkata, kalau bisa jadwalnya didirevisi kembali, sehingga RAPBA 2017 bisa dituntaskan pada 15 Januari 2017.

Menyikapi permintaan Plt Gubernur Aceh tersebut, pimpinan dan anggota Banggar mengatakan, bisa saja, jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jadwal baru yang telah disusun bersama.

Tapi, kata Muharuddin, yang perlu diketahui Plt Gubernur Aceh bahwa dalam tatib DPRA untuk pelaksanaan sidang paripurna tidak bisa dilakukan pada hari libur kerja, melainkan harus pada hari kerja dari Senin-Jumat. Sedangkan jadwal paling lambat tanggal 15 Januari 2017, pengesahan

RAPBA 2017 yang diberikan Plt Gubernur, jatuh pada hari Minggu. Setelah pimpinan dewan memberikan penjelasan secara rinci kepada Plt Gubernur, akhirnya ia bisa memahami, makanya ia berkenan menggeser jadwal pengesahan RAPBA dari tanggal 15 menjadi tanggal 17 Januari 2017.

Setelah tercapai kesepakatan jadwal pengesahan RAPBA itu, kata Muhar, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan usulan program prioritas dan usulan aspirasi masyarakat yang masuk melalui anggota DPRA. Soal usulan program aspirasi itu akan dibahas pada hari Senin depan. Alasannya, kalau dibahas langsung kemarin, anggota dewan dan Plt Gubernur Aceh sudah lelah, mengingat rapatnya dilaksanakan sejak siang sampai magrib secara nonstop. (her)

APBA 2017 Diqanunkan

■ Kesepakatan Banggar DPRA dengan Plt Gubernur

BANDA ACEH - Wacana tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2017 senilai Rp 14,5 triliun yang akan dipergubkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo, kini dipastikan tenggelam. Sebagai gantinya, pengesahan RAPBA 2017 akan dilakukan melalui qanun, sebab opsi kedua inilah yang telah disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif, Rabu (4/1) sore.

"Ini artinya, RAPBA itu tidak jadi dipergubkan, tapi diqanunkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang didampingi Ketua DPRA, Tgk Muharuddin,

Wakil Ketua II Teuku Irwan Djohan, Wakil Ketua III Dalimi, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA, dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAP) kepada wartawan sesuai pertemuan di ruang Banggar DPRA keamrin.

Sebelumnya diberitakan, Plt Gubernur Aceh akan mempergubkan APBA 2017 jika sampai tanggal 7 Januari 2017 DPRA belum bisa menyelesaikan pembahasan dan menetapkan pengesahannya.

Namun, setelah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRA, A Hamid Zein SH MHum bernegosiasi--atas nama Pimpi-

“ Karena tata tertib dewan tidak memperbolehkan sidang paripurna digelar pada hari libur, dan itu dapat kita pahami, makanya pengesahan APBA tahun ini digeser dari tanggal 15 ke 17 Januari 2017.”

-- SOEDARMO,

Plt Gubernur Aceh

■ ke halaman 7

■ poin kesepakatan

- RAPBA 2017 tak jadi dipergubkan, melainkan diqartunkan
- Deadline pengesahan digeser dari 15 menjadi 17 Januari 2016
- Alasan pergeseran jadwal karena tata tertib DPRA tak boleh sidang paripurna pada hari libur, mengingat 14 dan 15 Januari itu jatuh pada hari Sabtu dan Minggu

■ ke halaman 7

APBA 2017

■ Sambungan halaman 1

nan DPRA--dengan Plt Gubernur Aceh, akhirnya disepakati sementara bahwa APBA akan disahkan pada 15 Agustus, mengingat waktu untuk penetapan pada 7 Januari sudah sangat sempit.

Tapi kemudian, pada 3 Januari 2017, pihak DPRA yang bersidang menyatakan tetap dengan jadwal yang mereka susun untuk membahas dan mengesahkan APBA. Untuk pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)-nya saja akan berakhir pada 24 Januari 2017. "Nah, kalau jadwal itu yang kita ikuti, maka pengesahan RAPBA 2017 bisa semakin terlambat," ujar Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.

Sebelumnya, kepada *Serambi* Soedarmo menyatakan, jika pengesahannya lewat dari tanggal 15 Januari, maka APBA 2017 akan dia pergunakan.

Namun, kemarin siang situasinya kembali berubah. Terutama setelah Plt Gubernur Aceh datang langsung ke DPRA bertemu dengan unsur Pimpinan DPRA dan Banggar Dewan. Dalam pertemuan ini akhirnya disepakati bahwa pembahasan APBA terus dilaksanakan seoptimal mungkin, namun penetapannya tidak bisa dilakukan pada 15 Januari, melainkan digeser dua hari menjadi tanggal 17 Januari 2017.

Soedarmo mengatakan, dalam rapat dengan Banggar DPRA kemarin sore, ia minta kepada DPRA agar RAPBA 2017 paling telat bisa disahkan pada tanggal 15 Januari 2017. Di luar dugaan, tanggal 15 Januari itu jatuhnya pada hari Minggu. Bahkan pada tanggal 14 Januari yang merupakan hari Sabtu, pihak dewan pun tidak boleh bersidang.

"Nah, karena tata tertib dewan tidak memperbolehkan sidang paripurna digelar pada hari libur, dan itu dapat kita pahami, makanya pengesahan APBA tahun ini digeser dari tanggal 15 ke 17 Januari 2017," kata Soedarmo yang kemarin pagi baru tiba di Banda Aceh dari Jakarta.

Ia tambahkan bahwa

Sidang Paripurna RAPBA perlu waktu dua hari, sebab kalau satu hari tahapannya diprediksi tidak tuntas dan itu akan menyalahi aturan, makanya diplot dua hari. Dibuka pada pagi Senin (16/1), ditutup pada Selasa (17/1) malam.

Menurut Soedarmo, jadwal pembahasan dokumen KUA-PPAS 2017 diselesaikan pada minggu ini juga, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) RAPBA 2017. Intinya, kata Soedarmo, pada hari Sabtu (14/1) atau Minggu (15/1), pembahasan RKA harus sudah tuntas, termasuk usulan program aspirasi anggota DPRA.

Soedarmo mengatakan, kalau dilihat dari masa tahun anggarannya, pengesahan APBA tahun ini memang sudah terlambat. Tapi, apabila mengacu kepada Qanun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Aceh yang baru--berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang baru saja disahkan--maka pengesahan RAPBA pada 17 Januari 2017 itu belum terlalu terlambat.

"Soalnya, selain Aceh, masih ada tujuh provinsi lagi yang belum mengesahkan RAPBA 2017-nya sampai kini," kata Soedarmo yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Segera diisi

Menjawab *Serambi* tentang SOTK, Soedarmo mengatakan, pengisian pejabat baru dalam struktur SOTK yang baru akan dilakukan dalam waktu dekat, khususnya setelah persetujuan Mendagri turun. Hal ini disebabkan, usulan pejabatnya baru diselesaikan pada hari Rabu kemarin dan langsung dikirim ke Mendagri untuk minta persetujuan.

Kenapa pengusulannya baru dilakukan Rabu siang,

kata Soedarmo, karena para pejabat yang diusulkan bukan hanya untuk pejabat eselon II, tapi juga termasuk usulan pejabat eselon III dan IV. "Jadi, karena jumlahnya cukup banyak, makanya kita perlu ekstra-hati-hati dalam penyusunannya. Jangan sampai ada yang salah," imbuhnya.

Ditanya tentang pejabat yang melanggar disiplin PNS, terutama terkait Pildaka 2017, Soedarmo mengatakan, sudah dia usulkan dan Mendagri juga telah memberikan persetujuan mengenai hukuman bagi PNS yang melanggar disiplin tersebut. "Yang melanggar disiplin, pasti diberikan sanksi dan dilengserkan dari jabatannya. Kita tunggu saja eksekusinya, bersamaan dengan pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon II, III, dan IV yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini," ujar Soedarmo.

Mengenai usulan program aspirasi anggota dewan, Soedarmo menyatakan, mengenai hal itu ia bersama Banggar dalam rapat kemarin sudah sepakat akan dibahas khusus pada hari Senin (9/1). "Kita harapkan, setelah pembahasan khusus tersebut, pagu usulan anggaran untuk belanja modal dalam RAPBA 2017 bisa bertambah besar lagi, sehingga persentasenya jadi naik," kata Soedarmo.

Dalam pembahasan struktur RAPBA 2017, lanjut Soedarmo, yang perlu diperhatikan bukan saja alokasi anggaran untuk urusan wajib, seperti untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tapi urusan pilihan dan lainnya juga perlu diperhatikan supaya alokasi anggaran pembangunan pada tahun ini bisa lebih proporsional dan yang paling penting lebih banyak untuk program-program yang prorakyat. (her)

■ poin kesepakatan

● Pembahasan dokumen KUA-PPAS 2017 diselesaikan minggu ini juga, kemudian dilanjutkan membahas Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) RAPBA 2017

● Pada 14 atau 15 Januari pembahasan RKA sudah harus tuntas, termasuk usulan program aspirasi anggota DPRA.

DPRA Revisi Jadwal Pembahasan RAPBA

■ Supaya Bisa Disahkan 17 Januari

BANDA ACEH - Setelah menyepakati jadwal pembahasan RAPBA 2017 yang akan disahkan pada 17 Januari 2017 dalam rapat dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh hari Rabu (4/1), Pimpinan DPRA pada Kamis (5/1) kemarin memerintahkan kepada komisi-komisi DPRA untuk menyusun kembali jadwal pembahasan Rincian Kegiatan Anggaran (RKA) RAPBA 2017 dengan Kepala

Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Penyusunan ulang jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 bersama RKA RAPBA 2017 itu, diklaim Ketua DPRA, Tgk Muharuddin sebagai bukti keseriusan DPRA agar RAPBA 2017 untuk bisa disahkan menjadi Qanun APBA 2017 pada 17 Januari menda-

tang.

"Ya, itulah bukti keseriusan kita," kata Muharuddin kepada *Serambi*, Kamis (5/1), saat dimintai tanggapannya tentang langkah apa yang akan dilakukan Banggar DPRA agar RAPBA bisa disahkan pada 17 Januari 2017.

Ia juga memaparkan langkah-langkahnya dalam mengejar *deadline* tersebut.

■ ke halaman 7

DPRA Revisi

Setelah Banggar DPRA bersama Plt Gubernur Aceh dan tim anggarannya menyusun ulang jadwal pembahasan dokumen KUA-PPAS, maka dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pembahasan RKA RAPBA dan jadwal sidang paripurna untuk pengesahannya. Agenda berikutnya adalah menyusun kembali jadwal pembahasan RKA RAPBA antara komisi-komisi dewan dengan masing-masing mitra kerja SKPA-nya.

Misalnya, Komisi V DPRA yang membidangi masalah pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan, riset, teknologi, astronomi, dan geofisika, kembali merevisi jadwal pembahasan RKA RAPBA 2017 dengan mitra kerja komisinya.

Mereka bisa mengatur jadwal pembahasan RKA RAPBA 2017 dengan Dinas Pendidikan, Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan lainnya.

Begitu juga komisi lainnya, harus menyesuaikan dengan jadwal dan tahapan pembahasan RKA RAPBA 2017 yang telah disusun bersama dengan Plt Guber-

nur Aceh dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Rabu lalu.

Dalam kesepakatan itu, jadwal pembahasan dokumen KUA-PPAS yang awalnya dibuat Banggar DPRA, 3-24 Januari, dipersingkat menjadi 3-6 Januari. Setelah itu, mulai 7-8 Januari kegiatannya adalah penyempurnaan dan penyesuaian hasil pembahasan KUA-PPAS antara Banggar dengan TAPA.

Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan pra-RKA antara komisi-komisi DPRA dengan SKPA serta penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS 2017. Kemudian akan diterbitkan surat edaran Gubernur Aceh yang dilanjutkan dengan meng-input hasil pembahasan ke dalam SIPKD oleh SKPA dan *review* oleh Inspektorat pada 12-13 Januari. Kemudian, tanggal 14-15 Januari akan dibahas RKA RAPBA 2017 antara komisi-komisi dewan dengan SKPA dan desk TAPA. Selesai pembahasan RKA, lanjut Muharuddin, barulah dilanjutkan dengan sidang paripurna dan pengesahan APBA pada 16-17 Januari. Sidang paripurna itu kelak, diawali dengan penyampaian Nota Anggaran

■ Sambungan halaman 1

RAPBA 2017 oleh Plt Gubernur Aceh, Soedarmo, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan Banggar DPRA, pendapat komisi-komisi DPRA. Kemudian, jawaban Plt Gubernur Aceh atas tanggapan Banggar dan komisi-komisi. Setelah itu, barulah disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBA 2017 senilai Rp 14,5 triliun yang hendak disahkan menjadi Qanun APBA 2017. Pengesahan dan penutupan sidangnya akan dilaksanakan pada Selasa (17/1) malam.

Namun begitu, kata Muharuddin, meski jadwal pembahasan RKA RAPBA dipersingkat, tapi dalam pembahasannya nanti, jangan ada terjadi kekurangan anggaran untuk pos pengeluaran gaji PNS/guru, biaya operasional SKPA, dan legislatif serta lainnya.

Ini penting diingatkan, kata Muharuddin, karena pada tahun ini ada 15.000 guru PNS SMA/SMK dari kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang dilimpahkan kewenangan pengurusan dan pembayaran gajinya kepada Pemerintah Aceh atas pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (her)

APBA 2017

bijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 berjalan lambat di DPRA.

Kemudian, atas pendekatan Sekwan A Hamid Zein kepada Plt Gubernur Aceh, dilakukan pertemuan kembali antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Ujung-ujungnya, dihasilkan penyusunan jadwal percepatan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2017 agar RAPBA bisa disahkan pada 15 Januari 2017.

Namun, pada saat rapat penyusunan ulang jadwal pembahasan RAPBA 2017 antara Plt Gubernur dengan Pimpinan Banggar DPRA, Banggar DPRA meminta kepada Plt Gubernur agar batas pengesahan RAPBA digeser dari tanggal 15 Januari ke 17 Januari 2017. Alasan dewan, 15 Januari itu jatuh pada hari Minggu. Berdasarkan tata tertib dewan, pada hari libur tidak boleh ada sidang dan dengan sendirinya RAPBA tidak bisa disahkan pada hari itu.

Permintaan Banggar DPRA akhirnya dipenuhi Plt Gubernur. Tapi sampai 11 Januari 2017, Banggar DPRA belum juga mau menandatangani dokumen KUA-PPAS 2017 yang justru merupakan cikal bakal bahan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RAPBA 2017.

Sampai 16 Januari, Banggar DPRA belum juga menggelar sidang paripurna untuk pengesahan RAPBA pada 17 Januari 2017. Pihak Plt Gubernur dan TAPA menilai, Banggar sudah ingkar janji, makanya pada 16 Januari 2017, Plt Gubernur Aceh mengirim Sekda Aceh, Drs Dermawan MM, selaku Ketua TAPA, untuk menyampaikan dokumen Nota Keuangan dan RAPBA 2017 kepada Banggar DPRA sebagai bahan penyampaian dalam sidang paripurna.

Sampai 17 Januari 2017, Banggar DPRA tidak juga membuka sidang paripurna, sehingga Plt Gubernur kembali memerintahkan Sekda Aceh, Dermawan untuk menyampaikan surat yang isinya apabila Banggar DPRA tidak bisa menuntaskan pengesahan RAPBA 2017 sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya (16-17 Januari 2017), maka dengan sangat terpaksa Plt Gubernur akan menetapkan RAPBA melalui peraturan gubernur (pergub), sebagaimana ia wacanakan pada 30 Desember lalu.

men KUA-PPAS 2017 belum tuntas dibahas sampai 16-17 Januari 2017. Surat balasan Ketua DPRA ke Plt Gubernur Aceh itu ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan lembaga tinggi negara lainnya di Jakarta.

Amatan *Serambi*, keterlambatan pembahasan dokumen KUA-PPAS 2017 itu disebabkan berbagai faktor. Antara lain, keterlambatan dari pihak legislatif, karena penyerahan dokumen KUA-PPAS 2017 baru dilakukan pada 28 Desember 2016, sehingga nyaris tak mungkin bisa dituntaskan pembahasannya pada 15 Januari, ditambah lagi pengesahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Pemerintah Aceh terlambat.

Pihak eksekutif menilai, keterlambatan pembahasan dokumen KUA-PPAS 2017, karena ada usulan proyek baru sebanyak 119 paket dengan nilai Rp 650 miliar yang dituding LSM MaTA sebagai usulan "proyek siluman". Usulan proyek baru itu beraroma pilkada yang dititipkan sejumlah pejabat tinggi di kabupaten/kota melalui Mr X dan Mr X menitipkannya kepada sejumlah anggota legislatif, lalu anggota legislatif meneruskannya kepada sejumlah anggota TAPA untuk di-input atau dimasukkan ke dalam dokumen KUA-PPAS 2017. Tapi setelah dokumen KUA-PPAS 2017 dibukukan, tak satu pun usulan "proyek siluman" itu masuk, sehingga penandatanganan dokumen KUA-PPAS 2017 yang sebelumnya akan diteken 11 Januari 2017, tidak jadi.

Komunikasi antara Banggar DPRA dengan TAPA jadi

■ Sambungan halaman 1

tidak harmonis lagi.

Kemudian, pada 19 Januari 2017, Kemendagri memanggail Banggar DPRA, bersama Plt Gubernur dan TAPA, ke Jakarta untuk membahas kembali kebuntuan komunikasi yang telah terjadi, sehingga pembahasan RAPBA 2017 jadi mentok per 17 Januari 2017.

Pertemuan antara Banggar DPRA, Plt Gubernur, dan TAPA di Kemendagri itu dimediasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Raydonnizar Moenek. Hasil pertemuannya adalah menyepakati RAPBA 2017 senilai Rp 14,765 triliun diumumkan. Tidak dipergubkan.

Akan tetapi, Mendagri memberikan batas waktu paling lambat 30 Januari 2017. Jika pada tanggal itu pembahasan tak tuntas, maka langsung dipergubkan oleh Mendagri.

"Kesepakatan Jakarta" itu dipatuhi Banggar DPRA, Plt Gubernur, dan TAPA, sehingga dimulai kembali pembahasan dokumen KUA-PPAS pada 22 Januari dan pengesahan dokumen KUA-PPAS 2017 pada Selasa (23/1) pukul 23.45 WIB. Setelah pengesahan KUA-PPAS, dilanjutkan dengan rapat Bamus pada Jumat sore untuk penyusunan jadwal sidang paripurna.

Rapat Bamus itu akhirnya menetapkan sidang paripurna dibuka pada Minggu (29/1) malam dan ditutup Senin (30/1). Ini dilakukan Banggar DPRA sebagai bukti komitmennya terhadap janji kepada Plt Gubernur, TAPA, dan pihak Mendagri, sehingga pada Senin malam RAPBA 2017 senilai Rp 14,765 triliun jadi ketok palu yang disahkan melalui qanun, bukan pergub. (her)

Serambi Politik

Serambi INDONESIA

Jumat 6 Januari 2017

5

Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Tatang Sulaiman bersilahturahmi dengan Wakil Sekretaris Majelis Ulama Islam (MUI) Sumut, Medan Ustad Dr.H Amhar Nasution di Sanggamara Longe, Makodam IM, Banda Aceh, Kamis (5/1/17).

Plt Gubernur Diminta Selektif Pilih Pejabat

■ Jangan Didominasi Daerah Tertentu

BANDA ACEH - Sejumlah fraksi di DPRA meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI Purn Soedarmo, agar selektif memilih pejabat eselon II, III dan IV pada Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Aceh yang baru.

Permintaan tersebut disampaikan menjelang pengukuhan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini. "Kami tidak ingin ada lagi yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan anggaran," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra/PKS, Abdurrahman Ahmad, kepada Serambi, Kamis (5/1).

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, Aminuddin.

Pihaknya juga kecewa dengan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang yang terjadi di berbagai SKPA.

Padahal, lanjut Aminuddin, Pemerintah Aceh telah lama komit menjalankan sistem pemerintahan dengan syariah Islam. Tetapi kenyataan di lapangan, sejumlah pejabat SKPA masih saja suka melanggar aturan syariah dan justru melaksanakan tindakan yang menjerus kepada perbuatan syaitan.

"Pejabat yang bertabiat seperti syaitan jangan lagi ditempatkan dalam struktur SOTK yang baru, baik untuk pejabat eselon II, III maupun IV," pungkas Aminuddin. Sebab, lanjutnya, apabila model pejabat seperti ini tetap saja dipilih, itu sama artinya memelika-

"Kami tidak ingin ada lagi yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan anggaran,"

-- **ABDURRAHMAN AHMAD,**
Ketua Fraksi Gerindra/PKS



ra perusak syariah Islam.

Keterwakilan daerah
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Asrizal, menyarankan agar dalam pengisian dan penempatan pejabat pada SOTK yang baru dilakukan secara profesional dan proporsional, sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, dan bukan karena faktor kedekatan semata.

"Keterwakilan antar daerah juga penting, tapi jangan didominasi, ini sangat

tidak baik. Seperti yang terjadi dalam pemerintahan sekarang ini, pejabat eselon II, III dan IV banyak dari daerah tertentu," ungkap Asrizal.

Ia meminta Plt Gubernur Aceh agar menempatkan pejabat sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, sehingga kerja pemerintah menjadi ringan. Selain itu, tujuan pembangunan juga cepat tercapai, tanpa menimbulkan banyak masalah hukum. (baw)

KIP Pity

Sabtu
7 Januari 2017

Usulan Rp 30 Miliar belum Memadai



"Kami berharap daerah yang belum mengesahkan APBK 2017, agar memperhatikan alokasi dana untuk pos tak terduga itu."

— SOEDARMO, Plt Gubernur Aceh

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo yang dimintai tanggapannya tentang pagu dana tak terduga yang diusul TAPA dalam KUA-PPAS 2017 sebesar Rp 30 miliar menilai jika dikaitkan dengan kondisi Aceh yang rawan bencana, usulan dana sebesar itu belum memadai.

"Saya belum melihat alokasi dana tak terduga dalam dokumen KUA dan PPAS 2017. Kita akan membahas kembali alokasi dana tak terduga itu dengan TAPA dan DPRA," kata Soedarmo menjawab *Serambi* usai rapat dengan Banggar DPRA, Rabu (3/1) malam.

Soedarmo mengatakan, dirinya juga prihatin dengan alokasi dana tak terduga

■ ke halaman 7

Usulan Rp 30 Miliar

■ Sambungan halaman 1

terdapat dalam APBK kabupaten/kota yang telah mengesahkan APBK 2017. Banyak yang mengesahkan dana 'hanya' ratusan juta rupiah, sementara itu sering dilanda banjir, tanah longsor dan lainnya.

Dia berharap daerah yang belum mengesahkan APBK 2017, agar memperhatikan alokasi dana untuk pos tak terduga itu. Jika daerahnya sering dilanda bencana alam, alokasikan dana tak terduganya lebih besar dari tahun sebe-

lumnya.

Karena, lanjut Soedarmo, jika terjadi bencana yang berstatus bencana kabupaten/kota, maka pemerintah kabupaten/kota bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya yang menjadi korban bencana. (her)

769. 11

Sabtu
7 Januari 2017

Aceh 'Pelit' Dana Bencana

BANDA ACEH - Dana tak terduga yang juga bisa digunakan untuk darurat bencana yang diusul Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 'banyak' Rp 30 miliar. Usulan dana sebesar itu dinilai oleh pihak DPRA--termasuk aktivis kebencanaan--sangat

tidak mencerminkan kondisi daerah yang rawan bencana. "Melihat kondisi Aceh sering dilanda bencana alam, alokasi anggaran belanja tak terduga sebesar itu rasanya jauh dari mencukupi," kata Wakil Ketua III DPRA, Dalimi kepada Serambi, Jumat (6/1) ketika diminta tanggapannya terhadap dana tang-



"Penanganan tanggap darurat dibutuhkan dana tidak sedikit, makanya kita perlu mengalokasikan dana tak terduga yang lebih besar."

-- DALIMI,
Wakil Ketua DPRA

data dan fakta

- Tim TAPA mengusulkan Rp 30 miliar dalam KUA-PPAS 2017
- Pihak DPRA dan aktivis kebencanaan menilai jika dikaitkan dengan kondisi Aceh yang rawan bencana alam, usulan sebesar itu jauh dari mencukupi
- Ketika bencana gempa Pijay pada 2016, Aceh sedikit beruntung karena pemerintah pusat cepat membantu
- PR Gubernur Aceh berjanji akan membahas kembali alokasi dana tak terduga yang diusul TAPA karena PR Gubernur juga menilai alokasi dana sebesar itu (Rp 30 miliar) juga tidak sesuai dengan kondisi Aceh yang rawan bencana

■ ke halaman 7

Aceh 'Pelit'

gap darurat yang diusul TAPA dalam KUA-PPAS 2017 sebesar Rp 30 miliar.

Seperti diketahui, masyarakat Aceh ditakdirkan hidup di daerah yang rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, ancaman gunung berapi, kemarau panjang, dan lainnya.

Seperti saat ini, ketika masyarakat Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen masih berkabung akibat gempa yang terjadi bulan lalu, tiba-tiba banjir kembali mengepung sejumlah wilayah Aceh.

Dalam penanganan tanggap darurat bencana gempa Pijay, kata Dalimi, Aceh sedikit beruntung karena pemerintah pusat cepat membantu, sehingga anggaran untuk operasional tanggap darurat yang dikeluarkan Pemerintah Aceh cuma berkisar Rp 10 miliar lebih sedikit dari alokasi dana tak terduga yang dise-

diakan dalam APBA 2016 Rp 50 miliar.

"Untuk penanganan tanggap darurat dibutuhkan dana tidak sedikit, makanya kita perlu mengalokasikan dana tak terduga yang lebih besar agar penanganan pascabencana alam yang dilakukan untuk bencana provinsi bisa lebih maksimal," katanya.

Kalau dengan menggunakan dana terbatas, lanjut Dalimi, pelayanan yang akan diberikan kepada korban bencana alam, terutama pengungsi tidak akan maksimal. "Menurut kami usulan anggaran untuk pos dana tak terduga untuk 2017 perlu ditingkatkan lagi jumlahnya, minimal sama seperti tahun lalu yaitu Rp 50 miliar," demikian Dalimi.

Sedikit turun

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBA), Said Rasul yang ditanyai alokasi anggaran

■ Sambungan halaman 1

untuk BPBA mengatakan nilainya sedikit turun. "Tahun lalu Rp 26,4 miliar, tahun ini Rp 26,3 miliar, sudah termasuk gaji pegawai dan operasional kantor," kata Said Rasul.

Menurut Said Rasul, dari pagu anggaran yang diberikan TAPA, ada sekitar Rp 3,6 miliar merupakan program titipan pemerintah kabupaten/kota. Jadi, katanya, ril pagu anggaran BPBA tahun ini setelah dikurangi anggaran program dana migas dari kabupaten/kota nilainya tinggal Rp 22,7 miliar.

Said Rasul juga sepem- dapat perlunya pengalokasian dana tak terduga dengan jumlah yang sesuai dengan kondisi daerah yang rawan bencana. "Ini penting agar kinerja BPBA bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi kebencanaannya," tandas Said Rasul. (her)

Serambi Politik

Serambi INDONESIA

Selasa
10 Januari 2017

5

Berharap Pihak Disdik Terbuka dan Akomodatif

KETUA Komisi V DPRD-RA, Mohd Al Fatah yang dimintai tanggapannya terhadap pembahasan RKA Dinas Pendidikan mengatakan, proses ini akan dimulai hari ini dan besok (Selasa dan Rabu).

Al Fatah berharap pembahasan RKA Pendidikan hari ini bisa berjalan lebih lancar dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama jajarannya mau terbuka dan akomodatif. Hal ini di-

maksudkan untuk membenahi usulan anggaran dan program pendidikan yang belum tepat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

"Kita minta pihak Dinas Pendidikan transparan dan mau akomodatif, karena waktu pembahasan RKA RAPBA Dinas Pendidikan 2017 ini hanya dua hari. Kalau dilihat paket program Dinas Pendidikan itu cukup banyak, sehing-

ga waktunya tidak cukup," kata Al Fatah.

"Makanya kita minta mereka mau terbuka, untuk meluruskan kembali penempatan anggaran pendidikan yang belum tepat sasaran untuk peningkatan mutu pendidikan Aceh secara menyeluruh, baik usulan anggaran dan program dari kabupaten/kota maupun provinsi," tutur Mohd Al Fatah. (her)

Selasa
10 Januari 2017

Dana Pendidikan Banyak untuk Fisik

BANDA ACEH - Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAP) mengusulkan anggaran pendidikan sebesar Rp 2,704 triliun dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Sementara (KUA dan FPAS) 2017. Ini merupakan anggaran terbesar dari seluruh pos anggaran yang terdapat dalam RAPBA 2017.

Dari total anggaran Rp 2,704 triliun, sebesar Rp 1,556 triliun akan digunakan untuk belanja tidak langsung, di antaranya gaji guru PNS Rp 1,145 triliun dan tambahan penghasilan bagi guru Rp 421,3 miliar. Sisanya Rp 1,125 triliun lagi digunakan untuk belanja langsung, yaitu belanja berbagai program dan kegiatan pendidikan dan kegiatan pendidikan usulan dari kabupaten/kota maupun provinsi.

"Setelah membaca dokumen KUA dan FPAS 2017 yang disampaikan TAPA kepada Banggar DPR Aceh, penggunaan dana pendidikan dari pos belanja langsung (publik) sebesar Rp 1,125 triliun itu, sepertinya lebih banyak untuk pembangunan fi-

sik," kata Wakil Ketua II DPR Aceh, Irwan Johani kepada Serambi, Senin (9/1).

Dia menyebutkan, di antara item pembanguan fisik yang diusulkan adalah untuk pembangunan pagar sekolah, paving block sekolah, rehab sekolah, ruang kelas baru dan gedung sekolah, serta laboratorium. "Sedangkan untuk peningkatan SDM guru dan murid/pelajar dan siswa sekolah, alokasi anggaran, program dan kegiatan masih sedikit," kata Irwan Johani.

Irwan Johani menyorot khusus pengadaan alat praktik dan peraga siswa. Menurutnya, dari laporan dari sekolah-sekolah, alat praktik dan peraga siswa itu diseragamkan untuk semua sekolah. Padahal, kata Irwan, tidak semua sekolah sama kebutuhan. "Sehingga bisa saja setelah barangnya diserahkan ke sekolah, tidak bisa digunakan oleh siswa. Belum lagi masalah, belum tersedianya guru yang akan mengajar alat peraga itu kepada siswa," ujarnya.

Persoalan lain, kata Ir-



"Harusnya usulan program pendidikan lebih banyak untuk pelatihan guru, bukan fisik. Kecuali memang sangat dibutuhkan."

-- IRWAN JOHANI,
Wakil Ketua DPR Aceh

wan, beberapa program usulan dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota hampir sama dengan usulan yang dibuat Dinas Pendidikan Aceh. Banyak Disdik kabupaten/kota juga mengusulkan pembangunan pagar sekolah (SD dan SMP). Ia menyebutkan contoh, Gayo Lues mengusulkan dana pembangunan pagar 3 paket senilai Rp 2,049 miliar. Aceh Tengah dengan pagu anggaran Rp 1,2 miliar. Nagan Raya dengan pagu anggaran Rp 579 juta.

Sementara Aceh Tenggara mengusulkan penataan lingkungan satu SDN dialokasikan anggaran mencapai Rp 2,068 miliar. Aceh Utara mengusulkan

anggaran Rp 3,1 miliar untuk pembangunan dua unit gedung laboratorium.

Honor guru. Sementara alokasi anggaran untuk guru, kata Irwan Johani, yaitu untuk pembayaran honor 5.030 orang guru bhakti senilai Rp 28,8 miliar dari PAA dan ditambah dari dana otsus Rp 582,8 miliar. Berikutnya, alokasi anggaran Rp 67,817 miliar dari dana otsus ditambah Rp 34,8 juta dari PAA, digunakan membayar honor guru non-PNS limpaan dari kabupaten/kota sebanyak 11.552 orang. "Ini sudah merupakan kewajiban rutin, bukan program untuk peningkatan SDM guru," kata dia.

Irwan menambahkan, dari beberapa usulan program pendidikan yang terlibat, ada juga usulan untuk peningkatan SDM guru. Antara lain, dari Kota Banda Aceh, mengusulkan program pelatihan kompetensi 340 guru SD dan SMP, dengan alokasi anggaran Rp 510 miliar.

"Harusnya usulan program pendidikan lebih banyak untuk pelatihan guru, bukan fisik. Kecuali memang sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita terus membangun fisiknya, sementara SDM nya sedikit sekali, peningkatan mutu pendidikan di Aceh, seperti yang kita alami sekarang ini," kata Irwan.

"Kita harus malu dengan provinsi lain, yang pagu dana anggaran sektor pendidikannya di bawah Rp 1 triliun, tapi mutu pendidikan lulusan siswanya masuk dalam 10 besar nasional. Harusnya Aceh yang memiliki dana pendidikan Rp 2,7 triliun, mutu pendidikan siswanya masuk 5 besar nasional," lanjut dia.

Karenanya, Irwan Johani berharap Komisi V DPR Aceh yang membidangi pendidikan bisa lebih teliti untuk mengawasi dan mengarahkan pagu anggaran pendidikan terbesar di Indonesia ini, guna meningkatkan mutu pendidikan Aceh secara menyeluruh, terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. (ber)

Berharap Pihak Disdik Terbuka dan Akomodatif

KETUA Komisi V DPR Aceh, Mohd Al Fatah yang diminta tanggapannya terhadap pembahasan RKA Dinas Pendidikan mengatakan, proses ini akan dimulai hari ini dan besok (Selasa dan Rabu).

Al Fatah berharap pembahasan RKA Pendidikan hari ini bisa berjalan lebih lancar dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama jajarannya mau terbuka dan akomodatif. Hal ini di-

maksudkan untuk membenahi usulan anggaran dan program pendidikan yang belum tepat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

"Kita minta pihak Dinas Pendidikan transparan dan mau akomodatif, karena waktu pembahasan RKA RABPA Dinas Pendidikan 2017 ini hanya dua hari. Kalau dilihat paket program Dinas Pendidikan itu cukup banyak, sehing-

ga waktunya tidak cukup," kata Al Fatah.

"Makanya kita minta mereka mau terbuka, untuk meluruskan kembali penempatan anggaran pendidikan yang belum tepat sasaran untuk peningkatan mutu pendidikan Aceh secara menyeluruh, baik usulan anggaran dan program dari kabupaten/kota maupun provinsi," tutur Mohd Al Fatah. (ber)

program fisik pendidikan (antara lain)

- Rehabilitasi sedang dan berat ruang kelas dengan nomor kode 101.01.101.0101.17.044 anggarannya dialokasikan dari dua sumber anggaran. Pertama dari dana otsus provinsi Rp 220 juta, dan kedua dari dana alokasi khusus (DAK) Rp 63.456 miliar
- Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir sebanyak 100 unit dengan nomor kode 101.01.101.01.0117.009 dialokasikan dari sumber dana otsus provinsi Rp 19.906 miliar
- Pembangunan pagar sekolah 100 paket dengan nomor kode 101.01.01.01.17.078 dialokasikan dari dua sumber dana otsus provinsi senilai Rp 3,027 miliar
- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah sebanyak 0 unit dengan nomor kode 01.01.101.01.0117.002 dialokasikan dari dua sumber dana otsus Rp 15.918 miliar

- Rehabilitasi sedang dan berat ruang kelas dengan nomor kode 101.01.101.0101.17.044 anggarannya dialokasikan dari dua sumber anggaran. Pertama dari dana otsus provinsi Rp 220 juta, dan kedua dari dana alokasi khusus (DAK) Rp 63.456 miliar
- Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir sebanyak 100 unit dengan nomor kode 101.01.101.01.0117.009 dialokasikan dari sumber dana otsus provinsi Rp 19.906 miliar
- Pembangunan pagar sekolah 100 paket dengan nomor kode 101.01.01.01.17.078 dialokasikan dari dua sumber dana otsus provinsi senilai Rp 3,027 miliar
- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah sebanyak 0 unit dengan nomor kode 01.01.101.01.0117.002 dialokasikan dari dua sumber dana otsus Rp 15.918 miliar
- Alokasi anggaran untuk pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah itu, jika kita bagi untuk 30 unit rumah, maka harga satuan rumahnya Rp 530,6 juta/unit
- Penambahan ruang kelas sekolah sebanyak 100 unit, dengan nomor kode 101.01.101.01.0117.003 dananya bersumber dari dua pos anggaran. Pertama dari dana otsus provinsi Rp 18.065 miliar dan kedua dari DAK Rp 5,860 miliar.
- Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah sebanyak 100 unit dengan nomor kode 101.01.101.01.0117.005 dananya juga bersumber dari dua pos anggaran. Dari dana Otsus provinsi Rp 5,382 miliar dan dari DAK Rp 55,920 miliar
- Kemudian pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMA, SMK dan MA dengan nomor kode 101.01.101.01.0117.016 dari dua sumber anggaran. Pertama dari dana otsus Rp 26,420 miliar dan kedua dari DAK Rp 39,6 juta.

Rabu
11 Januari 2017

Komisi I: Alokasi Dana KKR Harus Ditambah

BANDA ACEH - Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) mengusulkan alokasi anggaran sebanyak Rp 3 miliar untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Jumlah tersebut dianggap tidak cukup oleh Komisi I dan meminta eksekutif melalui TAPA meninjau ulang dan menambah alokasi.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Alfaraky, dalam rapat pembahasan KUA PPAS bersama mitra kerja Komisi I, Kesbangpol dan Linmas Aceh di ruang rapat Komisi I DPRA, Selasa (10/1).

Dalam kesempatan itu, Iskandar juga langsung meminta Kesbangpol dan Linmas Aceh untuk menyampaikan kembali kepada tim TAPA, bahwa anggaran itu tidak cukup, dan meminta eksekutif untuk menambahkan lagi alokasi anggaran untuk KKR.

"Dalam pembahasan tadi kita sampaikan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan itu tidak cukup. Kemu-

dian kita sampaikan kepada Kesbangpolinmas untuk menyampaikan kembali ke TAPA, bahwa itu tidak cukup dan harus ditambah lagi," ujar Iskandar usai rapat kepada *Serambi* kemarin.

Iskandar mengatakan, awalnya tim KKR--yang baru saja dibentuk--meminta atau mengajukan anggaran sebanyak Rp 21 miliar kepada pihak eksekutif. Anggaran itu untuk mengakomodir semua kerja-kerja awal KKR, termasuk pengadaan sekretariat KKR dan pembentukan tim kerja di seluruh Aceh.

"Dari Rp 21 miliar yang diminta, hanya Rp 3 miliar yang dianggarkan. Kita berharap, jika pun pagu anggarannya tidak cukup, setidaknya bisa dianggarkan setengah dari yang diajukan," sebut Iskandar.

Selain kerja awal dan pengadaan sekretariat, Iskandar juga mengungkapkan mengapa anggaran Rp 3 miliar itu tidak cukup untuk KKR. Menurutnya, KKR akan didukung oleh staf-staf dan ada enam kelompok atau bidang kerja yang bersinergi untuk meng-

masa konflik.

Keenam bidang itu katanya, bidang pengungkapan dan kebenaran, bidang perempuan, reparasi konflik, perlindungan saksi dan korban, dokumentasi dan publikasi, serta bidang rekonsiliasi.

"Tentu itu tidak cukup, untuk operasional sekretariat saja mereka akan sangat kewalahan, mereka juga akan membentuk tim di kabupaten/kota. Lembaga ini sudah kita sepakati bersama, ini merupakan marwah Aceh untuk mengungkap kebenaran masa konflik, jadi kita harapkan Pemerintah Aceh serius mendukung kerja mereka," pungkaskan Iskandar.

Selain persoalan KKR, dalam pembahasan kemarin, Komisi I juga menyorot alokasi beberapa mitra kerja mereka yang masih terlihat cukup besar dalam alokasi anggaran untuk makan minum dan perjalanan dinas. Menurut Iskandar, angka yang sudah dialokasikan itu cukup besar, oleh karena itu pihaknya meminta agar angka itu dirasionalkan kembali. (dan)

Pimpinan DPRA tak Hadir, Rapat PPAS Batal

BANDA ACEH - Ketua DPRA, Muharuddin menjadwalkan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA membahas PPAS pada Jumat (13/1), pukul 14.30 WIB. Sejumlah ketua fraksi dan komisi sudah hadir di ruangan Banggar pukul 15.00 WIB. Tapi, sampai waktu shalat Ashar, pukul 16.12 WIB, tak seorang pun Pimpinan DPRA hadir. Seandainya terlaksana, rapat tersebut merupakan rapat penting untuk mempercepat pengesahan

Qanun APBA 2017 yang sudah molor dari jadwal seharusnya, 31 Desember 2016. Tapi, seperti dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA, HT Ir Ibrahim MT dan Ketua Fraksi PPP DPRA, Murdani, rapat beragendakan penyampaian laporan komisi-komisi DPRA terhadap hasil pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2017 maupun dokumen Pra-RKA kepada Badan

■ ke halaman 7

Pimpinan DPRA

■ Sambungan halaman 1

Anggaran Aceh itu, gagal terlaksana.

Menurut T Ibrahim, surat undangan yang diteken Ketua DPRA, Muharuddin, rapat Banggar dijadwalkan pukul 14.30 WIB. Saat itu, pukul 14.45 WIB, sejumlah anggota Banggar DPRA, di antaranya ketua-ketua fraksi dan komisi, sudah hadir, termasuk dirinya.

Tapi, sampai tiba waktu shalat Ashar pada pukul 16.12 WIB, tidak satu pimpinan DPRA pun yang hadir, termasuk Ketua DPRA yang meneken surat undangan tersebut.

"Karena azan shalat Ashar sudah berkumandang, anggota Banggar DPRA ke luar ruang menuju masjid untuk shalat Ashar berjamaah," tutur HT Ibrahim kepada *Serambi* yang diamini Murdani. Setelah shalat Ashar, lanjut Ibrahim, anggota dewan ada yang kembali ke ruang komisi masing-masing. Ada juga yang kembali masuk ruangan rapat Banggar DPRA dengan perkiraan Pimpinan DPRA untuk memimpin rapat itu sudah hadir.

Tapi sampai pukul 17.00 WIB, tidak satu pun pimpinan DPRA yang terlihat di ruang Banggar. Juga tak ada SMS maupun WhatsApp (WA) tentang pengun-

duran jadwal rapat yang dikirimkan ke masing-masing anggota DPRA, baik oleh Sekretariat DPRA maupun Pimpinan DPRA.

Atas dasar itu, anggota Banggar DPRA yang berada di ruang Banggar mengambil inisiatif ke luar dari ruang Banggar dan masuk ke ruang komisinya masing-masing. Sebagiannya langsung pulang meninggalkan Gedung DPRA. Hingga menjelang Isya tadi malam, mereka tak lagi kembali ke Gedung DPRA.

Ibrahim mengatakan, biasanya kalau rapatnya ditunda, Sekretariat DPRA atau Pimpinan DPRA memberitahukannya kepada anggota lewat SMS atau WA. Tapi, kata T Ibrahim, untuk rapat Banggar sudah lewat pukul 17.00 WIB, sementara jadwal rapatnya pukul 14.30 WIB. Tapi belum ada satu pimpinan DPRA pun yang hadir ke ruang rapat Banggar, apakah itu Ketua DPRA, Muharuddin, maupun dua wakilnya, Irwan Djohan dan Dalimi. "Apa sebab mereka tidak hadir sampai pukul lima sore, belum ada pemberitahuan kepada anggota Banggar DPRA," ujar Ibrahim.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPRA, Iskandar Daoed yang ditemui di ru-

ang kerjanya mengatakan, ia sudah hadir di Gedung DPRA pukul 14.45 WIB. Tapi, karena pada saat itu belum satu pun Pimpinan DPRA yang hadir, ia terus melanjutkan kerja rutinnnya.

Menurutnya, laporan hasil pembahasan KUA dan PPAS maupun pra-pembahasan RKA RAPBA 2017 dengan mitra kerja sudah selesai disusun, dan siap disampaikan dalam rapat Banggar. Tapi, kata Iskandar, sampai pukul 18.00 WIB telah ditunggu, tapi rapat Banggar belum juga dimulai. "Lalu, kepada siapa laporan hasil pembahasan Komisi VI ini disampaikan?" ujarnya bingung.

Jika hasil pembahasan KUA dan PPAS 2017 belum disampaikan dan dibahas dalam rapat Banggar DPRA, kata Iskandar, kapan lagi dokumen KUA dan PPAS 2017 diteken agar bisa melangkah ke tahap berikutnya. "Kalau seperti ini kejadiannya, tak ada solusi, maka keinginan menggunakan APBA 2017 makin jauh," kata Iskandar.

Karena rapat siang kemarin urung terlaksana dan belum jelas lagi kapan akan dilaksanakan, ini akan memperlambat pengesahan Rancangan RAPBA 2017 yang dijadwalkan akan disahkan 17 Januari mendatang. (her)

Selasa
17 Januari 2017



MAHASISWA saling dorong dengan polisi ketika hendak memadamkan api pada ban mobil yang dibakar saat berdemo ke Gedung DPRK Aceh Utara, Kamis (12/1). Ketua DPRA, Muharuddin berbicara di depan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Aceh Peduli Indonesia (AMAPI) yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRA, kemarin (atas)

Kebijakan Presiden Dikecam

BANDA ACEH - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Aceh Peduli Indonesia (AMAPI) Aceh juga melancarkan unjuk rasa di Banda Aceh, Kamis (12/1). Mereka beraksi di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Massa menuntut pemerintah pusat membatalkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), harga administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BKKB), serta tarif listrik.

Amatan Serambi, aksi mahasiswa yang meminta

dukungan DPRA untuk menolak kebijakan pemerintah berlangsung damai. Massa melakukan *longmarch*, orasi, dan bagi-bagi selebaran. Beberapa orang membentangkan spanduk berisi kecaman terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap rakyat kecil.

Ratusan mahasiswa yang berdemo itu disambut oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin.

Koordinator aksi, Akmal, membacakan tuntutan mahasiswa terhadap pemerintahan Joko Widodo. Di antaranya, massa mengecam kebijakan menaikkan harga BBM, tarif listrik,

dan biaya administrasi STNK. "Kebijakan ini sangat menyusahkan rakyat kecil. Kami harap DPRA dan Plt Gubernur Aceh bersama kami menolak kebijakan ini," kata Akmal yang juga Presiden Mahasiswa Unmuha Aceh.

Dikatakan, jika tuntutan mahasiswa tidak dikabulkan presiden, maka lebih baik bagi Aceh untuk merdeka daripada menderita akibat kebijakan pusat.

Marzuki, seorang mahasiswa yang ikut berorasi mengatakan, kebijakan pemerintah pusat saat ini sudah sangat semena-mena terhadap rak-

yat kecil. Dia mencontohkan perlakuan tak adil pemerintah yaitu pemberian ampunan (*amnesti*) kepada konglomerat yang menunggak pajak.

"BBM yang sehari-hari digunakan rakyat dinaikkan harganya. Tapi pajak para konglomerat yang sudah lama menunggak malah di-amnestikan. Di mana keadilan penguasa?" teriak Marzuki disambut teriakan ratusan mahasiswa. Menurutnya, Jokowi hanya pro kepada para elite dan partainya saja.

Sementara itu, Ketua

■ ke halaman 7

Kebijakan Presiden

■ Sambungan halaman 1

RA, Tgk Muharuddin saat menjawab tuntutan mahasiswa, mengaku bahwa kenaikan sejumlah tarif itu memang ramai dibicarakan di seluruh Indonesia. Pihaknya mengapresiasi aksi mahasiswa Aceh yang peka dan peduli terhadap perkembangan saat ini. Ketua DPRA, kata Muhar, siap memperjuangkan aspirasi

mahasiswa dengan menyampikannya ke pusat. "Kami akan sampaikan ke DPR dan DPD RI untuk ditindaklanjuti. Semoga Presiden bisa merespon segera harapan rakyat ini," jelasnya.

Aksi di DPRA dilakukan dengan penyanyian lagu-lagu perjuangan. Muharuddin mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi

da Ketua DPRA, Tgk Muharuddin. Hadir pula Kapolres Banda Aceh, Kombes Pol T Saladin.

Aksi bersama tersebut didukung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unmuha, UIN Ar-Raniry, Poltekkes Aceh, Universitas Serambi Mekkah, UUI, IKP-KR, KAMMI Aceh, dan STKIP BBG. (24)

ARI 2017

1189 h

Rabu
18 Januari 2017

Plt Gubernur Tunggu Panggilan Mendagri

JAKARTA - Pembahasan Rancangan Qanun APBA 2017 akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihak DPRA telah menyurati Mendagri agar memfasilitasi pembahasan tersebut.

Plt Gubernur Aceh, Soedarmo kepada *Serambi* di Jakarta, Selasa (17/1) mengakui dirinya saat ini sedang menunggu panggilan dari

■ ke halaman 7

Plt Gubernur

Kemendagri untuk membahas Rancangan Qanun APBA bersama-sama dengan DPRA.

"Saya sebetulnya ingin langsung mengeluarkan Per-gub APBA 2017 setelah sebetulnya gagal mendapatkan kata sepakat dengan DPRA. Tapi ternyata DPRA menyurati Mendagri agar bisa memfasilitasi pembahasan APBA tersebut. Jadi saya menunggu panggilan dari Mendagri," ujar Soedarmo.

Menurut Soedarmo, sebetulnya pembahasan RABBA 2017 tidak perlu berla-

rut-lurut lagi, sebab semuanya untuk kepentingan rakyat Aceh. "Seharusnya tidak perlu lagi diminta difasilitasi oleh Mendagri. Tapi karena sudah ada permintaan dari DPRA, saya menunggu saja," ujar Soedarmo.

Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh juga sudah melaporkan perkembangan pembahasan RABBA 2017. "Intinya, Mendagri minta agar cepat disahkan, dan rakyat Aceh cepat menikmati manfaatnya," sebut Soedarmo.

Ia mengatakan, pembaha-

san RABBA selalu terlambat tiap tahun. Ini sangat merugikan. "Sementara, saya ingin ini segera selesai. Cepat disahkan, maka cepat pembangunan Aceh dilaksanakan. Toh ini semua untuk rakyat. Bukan untuk saya. Kalau saya kan sebentar saja di Aceh, setelah ini saya pulang ke Jakarta. Tapi kasihan kan rakyat, kalau APBA tidak selesai juga," katanya.

Jangan ragu
Secara terpisah, politisi Aceh yang juga Ketua DPD 1 PDI Perjuangan Provinsi Aceh, H. Kartimun Usman

■ Sambungan halaman 1

meminta Plt Gubernur Aceh jangan ragu mengeluarkan Peraturan Gubernur (Per-gub) APBA 2017, apabila sampai batas waktu yang ditentukan, belum ada kata sepakat dengan DPRA.

"Toleransi sudah diberikan. Apabila sampai 17 Januari belum juga ada kata sepakat dengan DPRA, maka Plt Gubernur harus tertibkan pergub. Kalau tidak, roda ekonomi Aceh akan ter- sendat. Uang tidak beredar. Rakyat Aceh yang menderita," kata Kartimun yang sedang berada di Jakarta. (Bk)

Rabu
18 Januari 2017

Ketua DPRA: Pergub belum Memenuhi Syarat

KOMPLEKS Gedung DPR Aceh di Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh, Selasa (17/1), terlihat lebih sepi dari biasanya. Tak ada lagi pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS), seperti beberapa hari terakhir.

Sejumlah anggota Badan Anggaran DPRA memang tetap hadir dan menggelar rapat, tapi bukan

■ ke halaman 7

Ketua DPRA:

...dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) ...
...Meletakkan ...
...dan menyalahkan ...
...Pit Gubernur Aceh ...
...dikirim kepada ...
...DPRA sehari ...
...Desainnya.

Jakarta

Dalam surat tanggal 16 Januari 2017 itu, Pit Gubernur Aceh menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Gamut APBA 2017 dan rencana memajukan APBA 2017. Jadwal tahapan sidang paripurna RAPBA 2017 telah disepakati dan bisa ditepati.

Ketua DPRA Tgk. Muhammad Ridwan didampingi Wakil Ketua I DPRA Irwan dan yang ditemui saat itu dalam pertemuan, keinginan Pit Gubernur Aceh untuk menetapkan APBA 2017 belum dapat dilaksanakan alias belum memenuhi syarat. Alasannya, menurut Perundang-undangan Nomor 31 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kepala Daerah dan DPRD dilakukan dalam batas waktu 6 bulan sejak pengesahan Peraturan Daerah pada bulan Juni.

Adapun untuk penandatanganan bersama peraturan DPRA antara Kepala Daerah dan DPRD harus dilakukan dalam waktu 1 bulan sejak tahun anggaran ditetapkan. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016 pasal 105 ayat 1 tentang Peraturan Pemerintah tentang

Keuangan Daerah.

Sementara dokumen KUA dan PPAS 2017 yang disampaikan pada 15 Juni 2016, sudah diartik kembali akibat ada restrukturisasi organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Dokumen KUA PPAS 2017 baru diserahkan kembali ke DPRA pada 28 Desember 2016.

DPRA beranggapan, penyerahan dokumen KUA dan PPAS 2017 ini belum sesuai dengan isi Permenmendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 105 ayat 3 huruf c). "Jadi, langkah yang akan diambil Pit Gubernur untuk memajukan APBA 2017, belum memenuhi kaidah penyusunan anggaran seperti diatur dalam perundang-undangan," ungkap Muharuddin.

Namun, katanya, DPRA masih berharap RAPBA 2017 bisa diqanunkan, setelah terlebih dulu dikonsultasikan secara bersama ke Kemendagri.

Belum tuntas

Muharuddin juga menjelaskan alasan Pimpinan DPRA belum bersedia menandatangani dokumen KUA dan PPAS 2017 yang merupakan persyaratan untuk pembahasan RKA-RAPBA 2017 antara lain, pembahasan Komisi Dewan dengan SKPA belum tuntas.

"Masih ada 8 SKPA yang alokasi gaji PNS-nya belum cukup 12 bulan. Selain itu, berbagai dokumen perencanaan proyek yang dimasukkan

Sambungan halaman 1

dalam KUA dan PPAS belum lengkap. Masih banyak DED proyek baik yang belum terpenuhi, tapi proyeknya sudah ada tahapannya.

Ditambahkan, Banggar DPRA belum bisa melaksanakan Sidang Paripurna Nota Keuangan dan Rancangan Gamut APBA 2017, karena dokumen KUA dan PPAS 2017 belum disepakati dan tidak datang bersama, sebab pembahasan dengan SKPA belum tuntas.

Tanggapan Bappeda

Kepala Bappeda Aceh Prof Dr Amhar Abubakar MS yang dikonfirmasi *Serambi* mengatakan, saat ini bukan lagi jadwal membahas KUA dan PPAS 2017, karena waktunya sudah lewat.

Menurut jadwal yang disepakati Pit Gubernur dan Banggar DPRA, Rabu (4/1) malam, sidang paripurna dilaksanakan pada 16-17 Januari 2017. "Makanya TAPA atas perintah Pit Gubernur membawa dokumen Nota Keuangan dan RAPBA 2017 untuk disampaikan dalam Sidang Paripurna RAPBA 2017," ujarnya.

Karena pada Senin (16/1) tidak ada sidang paripurna RAPBA 2017, tambahnya, maka TAPA menyerahkan dokumen Nota Keuangan dan RAPBA 2017 kepada Banggar DPRA, dan tidak ada lagi membahas KUA dan PPAS. "Langkah apa selanjutnya, kami sebagai anggota TAPA menunggu perintah dari Pit Gubernur Aceh," kata Amhar Abubakar (*Desa*)

Mendagri Panggil Plt Gubernur

■ Terkait APBA 2017



...akhirnya rapat klarifikasi terkait APBA 2017 akan dilaksanakan Kamis, 19 Januari siang di Mendagri. Mendagri yang tertera dalam radio gram Mendagri ke kami.

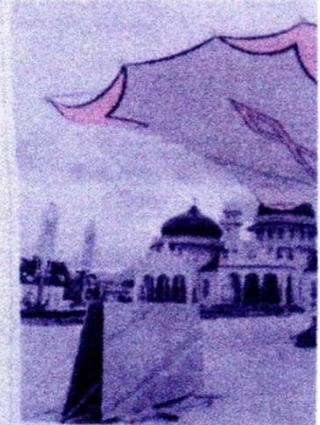
SOEDARMO, Gubernur Aceh

RANDA ACEH - Berlanjut serunya pembahasan dan pembahasan Rancangan Peraturan dan Peraturan Tindakan (RPPA) 2017, mendiang Menteri Dalam Negeri Mendagri, Djajir Kumpul untuk serangkaian Perencanaan Tugas (PT) Gubernur Aceh serta Badan Anggaran (Badan DPR) Aceh (YAP) yang akan dikaji secara terpadu.

data dan fakta

- Pembahasan dan pembahasan RPPA 2017 berlanjut
- Mendagri meminta perlu memanggil Plt Gubernur Aceh, Badan Anggaran (Badan) DPR, dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk dikaji secara terpadu
- Rapat khusus ini diemban "Rapat Klarifikasi Terbatas Terkait Masalah Penyusunan APBA 2017"
- Rapat dilaksanakan pada Kamis (19/1) pukul 14.00 WIB hingga selesai di ruang Degan Bina Keuangan Daerah Gedung H Lantai VIII Kemendagri, Jalan Veteran Nomor 7, Jakarta Pusat

...Perencanaan APBA 2017. Mendagri juga mengundang Mendagri yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur Aceh, Pimpinan Badan DPR, dan TAPA pada 17 Januari 2017. rapat klarifikasi ini akan berlangsung hari ini, Kamis (19/1) pukul 14.00 WIB hingga selesai di ruang Dirjen Bina Keuangan Daerah Gedung H Lantai VIII Mendagri, Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta Pusat.



PEKERJA mengambil foto dari 12 pasang identifikasi Margo Raya Badan Anggaran Banda Aceh. (Rakri) | mendagri lebih 14 meter itu berukuran 12-15 meter

Mendagri Panggil

...via WhatsApp mengenai pertanyaan. Seandainya sudah ada hasil rapat konsultasi APBA 2017 dengan Mendagri, sudah ada, yakni tanggal 19 Januari, seperti yang tertera di dalam radiogram tersebut," kata Soedarmo.

Dalam radiogram (surat nomor T.005/120/2017) itu Mendagri menyebutkan alasan pemanggilan Plt Gubernur Aceh, Ketua Badan DPR, dan Ketua TAPA untuk ikut rapat klarifikasi terbatas tersebut adalah "tidak diwakilkan, ulangi surat kearifan," bunyi teken Sekretaris Ditjen Daerah Kemendagri, Indra Baskoro.

Pemanggilan itu ternyata merupakan respons Mendagri atas surat yang dikirim Gubernur Aceh Nomor 100/690 tanggal 17 Januari 2017 tentang fasilitasi dalam rangka konsultasi finalisasi penyusunan Rancangan APBA 2017.

Rapat klarifikasi ini menjadi penting dan strategis, karena akan menjadi penentu akhir apakah APBA 2017 cukup ditetapkan dengan peraturan gubernur (pergub) saja atau tetap melalui mekanisme qanun sebagaimana berlangsung selama ini.

Sebagaimana diberitakan Serambi kemarin, Plt Gubernur Aceh, Soedarmo yang ditanyai di Jakarta mengisyaratkan bahwa pembahasan Rancangan Qanun APBA 2017 akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apalagi, selain dirinya, pihak DPR pun telah menyurati Mendagri agar memfasilitasi pembahasan anggaran tersebut.

Plt Gubernur Aceh, Soedarmo di Jakarta, Selasa (17/1) mengaku saat ini pihaknya sedang menunggu panggilan dari Kemendagri untuk membahas Rancangan Qanun APBA bersama-sama dengan DPR.

■ Sambungan halaman 1

Menurut Soedarmo, sebelumnya pembahasan RPPA 2017 tidak perlu berlarut-larut lagi, sebab semuanya untuk kepentingan rakyat Aceh. "Seharusnya tidak perlu lagi diminta difasilitasi oleh Mendagri. Tapi karena sudah ada permintaan dari DPR, saya jadinya menunggu saja," ujar Soedarmo.

Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh itu juga sudah melaporkan perkembangan pembahasan RPPA 2017. "Intinya, Mendagri minta agar cepat disahkan, dan rakyat Aceh cepat menikmati manfaatnya," demikian Soedarmo. (dik/her)

Kamis
19 Januari 2017

Irwan Djohan Tantang MaTA *Publish* Pengusul Proyek Siluman

INFORMASI yang dilan-
kan LSM MaTA (Masyarakat
Transparansi Aceh) tentang
kegiatan masuknya usulan
proyek siluman dalam RAP-
BA 2017--mencapai 119
paket dengan nominal ang-
garan sebesar Rp 650 mi-
liar-- memancing Wakil
Ketua DPRA, Irwan Djohan
angkat bicara.

"MaTA sebagai LSM
yang mengedepankan
transparansi. Jika memang

"Jika memang ada
soknum anggota DPRA
yang melakukan itu
(mengusul proyek
siluman), bisa me-
rusak nama baik
lembaga DPRA."

-- IRWAN DJOHAN,
Wakil Ketua DPRA



■ ke halaman 7

DOMPE

Irwan Djohan

...tahu sebatiknya
...saran saja kepada
...siapa pengusul pro-
...siluman tersebut."
...Irwan Djohan dalam
...pers-nya yang di-
...Serambi, Rabu (18/
...dalam menanggapi be-
...nama koran ini, ke-
...berjudul Proyek Si-
...Molorkan APBA.
...Menurut Irwan Djohan,
...bagi salah satu pimpinan
...DPR, dirinya tidak mau
...perbuatan kelompok
...di luar DPRA, bisa
...mencemarkan DPRA. Atau,
...memang ada oknum
...DPR yang melam-
...hal itu, bisa merusak
...baik dan kepercayaan
...kepada lembaga DP-
...sara keseluruhan.
...kan anggota DPRA
...yang tidak melakukan,
...baiknya ikut rusak."
...nya.
...Publik, kata Irwan,
...tahu siapa pengusul
...yek siluman senilai Rp
...miliar itu, karena ja-
...n-jangan bukan dari
...gota legislatif, tetapi
...petinggi eksekutif sen-
...atau petinggi lembaga-
...baga lain di luar Pe-
...intah Aceh. Misalnya,
...baga vertikal yang me-
...program melalui pe-
...tentu di lingku-
...eksekutif.
...al seperti itu, tu-
...ya, pernah terjadi di
...A 2016. Karena itu
...A perlu mengupas
...ra detil KUA dan PP-
...2017 yang disusun
...ekutif. Sedangkan
...genai molornya pem-

bahasan RAPBA 2017 itu, kata Irwan, tidak semata dari anggota DPRA, tapi lebih banyak dari pihak eksekutif. Misalnya, perencanaan anggaran yang dibuat dalam KUA dan PPAS 2017, banyak yang ngawur atau belum terpenuhi dan tepat sasaran. Misalnya, alokasi gaji PNS di 8 dinas belum terpenuhi 12 bulan, tapi anehnya untuk TPK ada yang telah melampaui 12 bulan.

"Apakah dengan belum cukupnya gaji PNS 12 bulan, Pimpinan DPRA langsung mau meneken dokumen KUA dan PPAS 2017. Hal-hal seperti ini harusnya menjadi koreksi bagi Plt Gubernur dan Sekda sebagai Ketua TAPA," tandasnya.

Dijelaskannya, karena banyak anggaran urusan wajib yang belum terpenuhi dan lainnya, maka anggota Banggar DPRA dan Komisi harus bekerja keras untuk menelusuri kembali pos-pos anggaran urusan wajib dan prarakyat lainnya yang belum cukup.

Selain itu, beberapa anggota inti TAPA yang kini menjabat Kepala SKPA yang ditunjuk sebagai Plt Bupati/Wali Kota di beberapa kabupaten/kota, dalam pembahasan dokumen KUA dan PPAS serta pra RKA RAPBA SKPA-nya, itu juga menjadi kendala. Mereka sering tak hadir karena harus melak- sanakan tugas yang sama

■ Sambungan halaman 1

di kabupaten/kota. Ini membuat jadwal pemba- hasan KUA dan PPAS 2017 antara Komisi DPRA de- ngan mitra kerja SKPA jadi lamban.

Plt Gubernur Aceh, Soedarmo, kata Irwan Djohan harus mengkaji secara serius mana yang lebih baik dan lebih cepat, pergub atau qanun APBA. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun Pergub APBA tidak kurang dari 30 hari. Sementara kalau mengqanunkan, hanya bu- tuh waktu satu minggu lagi atau paling lambat 31 Ja- nuari 2017. APBA sudah bisa disahkan.

Kalau Plt Gubernur Aceh mengambil langkah pergub, malah kemenangan ada pada pihak yang merekayasa agar APBA bisa dituntaskan sete- lah masa tugas Plt Gubernur selesai pada 11 Februari atau setelah pencoblosan dan penghitungan suara pilkada, 15 Februari 2017. Usulan pergub tersebut bisa ditarik kembali oleh pejabat yang kembali menjabat.

Oleh karena itu, lanjut Irwan, dalam pertemuan di Jakarta nanti, masalah deadlock pembahasan RAPBA 2017 yang terjadi sejak 16 Januari 2017 diharapkan bisa kembali mencair dan ada kese- pakatan baru antara DP- RA, Plt Gubernur dan TA- PA untuk mengqanunkan RAPBA 2017 sebelum ak- hir Januari 2017, seperti penyelesaian deadlock RAPBA 2016. (her)

Terd

Rp 27,6
Ama
dibacal
yang di
MH, di
anggot
dan N
sidan
ngad
Aceh
N
beba
men
juta
ngau
(sut
terf
pid
tah
pid
de
da
ak
k
t

Mendagri Panggil Plt Gubernur

■ Terkait APBA 2017



ra, akhirnya rapat klarifikasi terkait APBA 2017 akan dilaksanakan Kamis, 19 Januari siang di Mendagri. Seperti yang tertera dalam radiogram Mendagri pada kami."

—SOEDARMO, Plt Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Berlanjut lanjutnya pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBA) 2017, mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjibjo Suroso untuk memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh serta Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) guna diklarifikasi secara bersamaan.

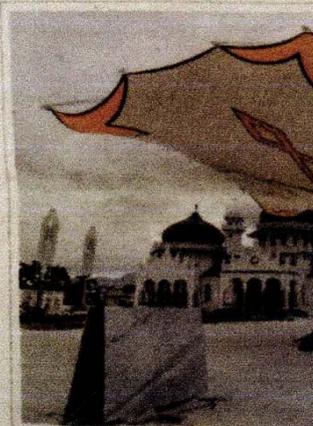
■ data dan fakta

- Pembahasan dan pengesahan RAPBA 2017 berlanjut
- Mendagri merasa perlu memanggil Plt Gubernur Aceh, Badan Anggaran (Banggar) DPR, dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk diklarifikasi secara bersamaan
- Rapat khusus ini dinamakan "Rapat Klarifikasi Terbatas Terkait Masalah Penyusunan APBA 2017"
- Rapat dilaksanakan pada Kamis (19/1) pukul 14.00 WIB hingga selesai di ruang Dirjen Bina Keuangan Daerah Gedung H Lantai VII Kemendagri, Jalan Veteran Nomor 7, Jakarta Pusat

berdasarkan radiogram Mendagri yang dikirimkan kepada Plt Gubernur Aceh, Pimpinan Banggar DPR, dan TAPA pada 17 Januari 2017, rapat klarifikasi itu akan berlangsung hari ini, Kamis (19/1) pukul 14.00 WIB hingga selesai di ruang Dirjen Bina Keuangan Daerah Gedung H Lantai VII Kemendagri, Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta Pusat.

Rapat radiogram tersebut disampaikan Plt Gubernur Aceh, Soedarmo, tadi

■ ke halaman 7



PEKERJA memasang kain di satu dari 12 payung elektik Masjid Raya Badunahman Baruta Aceh, Rabu (18/1). Kain yang berukuran 14 meter itu mencapai 10-11 miliar rupiah.

Mendagri Panggil

... via WhatsApp mengenai pertanyaan. Sehubungan dengan itu, apakah sudah ada hasil rapat konsultasi APBA 2017 dengan Mendagri. Sudah ada, yakni tanggal 19 Januari, seperti yang tertera di dalam radiogram tersebut," kata Soedarmo.

Dalam radiogram (surat nomor T.005/120/2017) itu Mendagri menyebutkan alasan pemanggilan Gubernur Aceh, Ketua Banggar DPR, dan Ketua TAPA untuk ikut rapat klarifikasi terbatas tersebut tidak boleh diwakilkan.

Pemanggilan itu ternyata merupakan respons Mendagri atas surat yang dikirim Gubernur Aceh Nomor 100/690 tanggal 17 Januari 2017 tentang fasilitasi dalam rangka konsultasi finalisasi penyusunan Rancangan APBA 2017.

Sehubungan dengan hal itu, Mendagri meminta kehadiran Plt Gubernur Aceh untuk hadir dalam rapat klarifikasi dimaksud yang akan dilaksanakan pada Kamis, 19 Januari 2017. "Mengingat pentingnya rapat dimaksud, Plt Gubernur Aceh, Ketua Banggar, dan TAPA diharapkan hadir tepat waktu dan

tidak diwakilkan, ulangi surat kawat itu yang diteken Sekretaris Ditjen Daerah Kemendagri, Indra Baskoro.

Rapat klarifikasi ini menjadi penting dan strategis, karena akan menjadi penentu akhir apakah APBA 2017 cukup ditetapkan dengan peraturan gubernur (pergub) saja atau tetap melalui mekanisme qanun sebagaimana berlangsung selama ini.

Sebagaimana diberitakan Serambi kemarin, Plt Gubernur Aceh, Soedarmo yang ditanyai di Jakarta mengisyaratkan bahwa pembahasan Rancangan Qanun APBA 2017 akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apalagi, selain dirinya, pihak DPR pun telah menyurati Mendagri agar memfasilitasi pembahasan anggaran tersebut.

Plt Gubernur Aceh, Soedarmo di Jakarta, Selasa (17/1) mengaku saat ini pihaknya sedang menunggu panggilan dari Kemendagri untuk membahas Rancangan Qanun APBA bersama-sama dengan DPR.

"Di sisi lain, saya sebenarnya ingin langsung me-

■ Sambungan halaman 1

ngeluarkan Pergub APBA 2017 setelah sebelumnya gagal mendapatkan kata sepakat dengan DPR. Tapi ternyata DPR menyurati Mendagri agar ikut memfasilitasi pembahasan APBA tersebut. Jadi, saya menunggu panggilan dari Mendagri," ujar Soedarmo. Dan, berdasarkan radiogram dari Mendagri kemarin, ternyata rapat klarifikasi terbatas itu akan dilaksanakan siang ini di lantai 8 Gedung Kemendagri.

Menurut Soedarmo, sebenarnya pembahasan RAPBA 2017 tidak perlu berlanjut lagi, sebab semuanya untuk kepentingan rakyat Aceh. "Seharusnya tidak perlu lagi diminta difasilitasi oleh Mendagri. Tapi karena sudah ada permintaan dari DPR, saya jadinya menunggu saja," ujar Soedarmo.

Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh itu juga sudah melaporkan perkembangan pembahasan RAPBA 2017. "Intinya, Mendagri minta agar cepat disahkan, dan rakyat Aceh cepat menikmati manfaatnya," demikian Soedarmo. (dik/her)

Jumat
20 Januari 2017

Ombudsman: Sebaiknya APBA Diqanunkan

■ Beri Waktu hingga Akhir Januari

BANDA ACEH - Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husein MH mengatakan, untuk memelihara keharmonisan antara eksekutif dan legislatif Aceh,

sebaiknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 tetap diqanunkan, bukan dipergubkan.

Menurutnya, pembaha-

■ ke halaman 7



Membahas APBA

...ngani Plt Gubernur Aceh, ... TNI (Purn) Soedar... Ketua DPRA Tgk Muha... ruddin, Wakil Ketua DPRA... Teuku Irwan Djohan, serta... mengetahui Dirjen Bina... Rancangan Daerah Kemen... ri Reydonnizar Moenek... Sebelum ditandatangani... dokumen tersebut diparaf... masing-masing oleh Sekda... Drs Dermawan MM... Sekretaris DPRA A Ha... d Zein SH MHum.

Kesepakatan melanjut... pembahasan RAPBA... 2017 dicapai setelah dilaku... rapat pembahasan an... era DPRA dan Gubernur... eh yang difasilitasi Dirjen... na Keuangan Daerah Ke... nterian Dalam Negeri... apat berlangsung sejak... kul 15.00 WIB dan baru... rakhir pukul 21.30 WIB... Rapat sempat jeda un... k shalat Magrib dan ma... malam dengan menu... si Padang dari restoran... asus.

Ketua DPRA Tgk Muha... ruddin dan Plt Gubernur... eh, Soedarmo merasa... mbira karena berhasil... ncapai kata sepakat. "Ini... alah peristiwa penting... ra akan laksanakan se-

...suaai kesepakatan," kata Plt Gubernur.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Mendagri yang telah memfasilitasi pertemuan penting tersebut. "Ini adalah langkah yang lebih baik. Kita harapkan proses komunikasi antara eksekutif dan legislatif menjadi lebih baik lagi ke depan," ulas Muharuddin.

Gedung sakti
Gedung H Kementerian Dalam Negeri terletak di Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta. Lantai 8 adalah tempat Dirjen Bina Keuangan Daerah, Reydonnizar Moenek berkantor. "Alhamdulillah, setelah melakukan perbincangan yang alot dan panjang, akhirnya disepakati bahwa pembahasan Rancangan Qanun APBA akan dilanjutkan kembali dalam

■ Sambungan halaman 1

Jangka waktu delapan hari kerja ke depan," kata Reydonnizar.

Ruangan kerja milik Reydonnizar itu terkesan "sangat sakti", karena di ruangan itu pula APBA 2016 berhasil disepakati dalam rapat yang berlangsung pada 28 Desember 2015.

Ketika itu, di tempat tersebut, pertemuan berlangsung antara Gubernur dr Zaini Abdullah, Wakil Gubernur H Muzakir Manaf, dan Ketua DPRA Tgk Muharuddin. Waktu itu fasilitator pertemuan juga Dirjen Bina Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek yang pernah menjabat Plt Gubernur Sumatera Barat.

"Ah, kau ini ada-ada saja," kata Reydonnizar sambil tertawa lebar, kepada Serambi saat dimintai komentarnya soal kesaktian lantai 8 Gedung H itu. (flk)

Isi kesepakatan

● Kesepakatan ini ditandatangani oleh pihak pertama; Plt Gubernur Aceh Soedarmo, pihak kedua; Pimpinan DPRA, yaitu Tgk Muharuddin (Ketua) dan Teuku Irwan Djohan (Wakil Ketua), mengetahui: Dirjen Bina Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek.

Jumat
20 Januari 2017

MaTA: Harusnya Irwan Lebih Tahu

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merasa aneh dengan komentar Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan ST yang menginginkan awak MaTA untuk membongkar dugaan pengusul proyek siluman pada RAPBA 2017.

Harusnya, menurut MaTA, Irwan Djohan lebih mengetahui hal tersebut, karena ia saat ini menjabat Wakil Ketua DPRA.

"Menanggapi pertanyaan Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan yang meminta MaTA untuk memublikasi siapa pengusul paket senilai 650 miliar, kesannya menjadi aneh. Harusnya, Irwan Djohan



Hafidh Polem

selaku Wakil Ketua DPRA yang lebih mengetahuinya," kata Koordinator Bidang Advokasi dan Ke-

■ ke halaman 7



Anggota DPRA dan DPRK Datangi Polres Aceh Utara

■ Pertanyakan Penanganan
Kasus M Jhony

“ Kita meminta
Kapolda Aceh
untuk mengirim tim
Propam Polda Aceh
guna melakukan inves-
tigasi dan verifikasi
kejadian itu. ”

-- MUHARUDDIN,
Ketua DPRA



LHOKSUKON - Dua ang-
gota DPR Aceh bersama
pimpinan dan anggota DPRK
Aceh Utara, Sabtu (21/1)
sore, mendatangi Mapolres
Aceh Utara. Selain untuk
melihat kinerja kepolisian
dalam menciptakan keter-
tiban dan keamanan masya-

rakat (kamtibmas), mereka
juga mempertanyakan pena-
nganan kasus penangkapan
Juru Bicara Komite Pera-
lihan Aceh/Partai Aceh (K-
PA/PA) Pasee M Jhony,
serta Keuangan Sagoe Raja

■ ke halaman 7

Kabid Humas:

memicu keriuhan,” sebut
Goenawan kepada *Seram-
bi*, kemarin.

Menurut Goenawan,
tindakan polisi sudah tepat,
yaitu mengamankan dua
pelaku. Ia menegaskan itu
tindakan tegas dan terukur.
Apalagi salah satu yang
diamankan itu positif nar-
koba.

“Jika ada tindakan polisi
yang lain, itu disebabkan
ulah pelaku yang kasar,
tidak kooperatif dan bicara
kotor kepada petugas polisi
yang mengamankan situasi.
Mari sama-sama kita men-
jaga stabilitas kamtibmas

setelah kejadian saling me-
nyalahkan. Polda Aceh tetap
akan melakukan tindakan
tegas terukur,” tegas Kom-
bes Pol Goenawan.

Masih diamankan

Sementara itu, Kapolres
Aceh Utara Ahmad Untung
Surianata kepada *Serambi*,
usai pertemuan dengan
anggota DPRA dan DPRK
Aceh Utara menyebutkan,
Jhony masih diamankan di
Satuan Reskrim untuk
menjalani pemeriksaan,
karena petugas menemu-
kan sisa sabu-sabu di ru-
mahnya dan bendera bin-

tang bulan. Sedangkan
Teuku Otman masih di-
proses dalam kasus nar-
koba, karena berdasarkan
hasil tes urine positif me-
ngonsumsi narkoba.

“Tidak ada yang memu-
kul Jhony, saya punya
saksi. Saya hanya menem-
peleng saja wajahnya, karena
dia (Jhony) ingkar janji.
Sebelumnya dia sudah saya
maafkan dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi pe-
buatannya. Karena dia ing-
kar janji sama saya, maka
saya tempeleng untuk me-
ngingatkan dia, jadi tidak
ada yang memukulnya.”

■ Sambungan halaman 1

kata Kapolres.

AKBP Untung juga me-
nyebutkan Tgk M Jafar
Daud, sudah dikembalikan
ke keluarganya setelah
dimintai keterangan. “Sudah
kita kembalikan tokoh aga-
ma tersebut, hanya dua or-
ang yang masih ditahan.
Untuk dua orang yang me-
nurunkannya juga sudah
dipanggil ke Polres Aceh
Utara untuk dimintai kete-
rangan sebagai saksi. Se-
karang Jhony terus kita
amankan, dan bisa saja kita
proses secara hukum,” ujar
Kapolres Aceh Utara. (**dan/
jaf**)

Senin
23 Januari 2017

Proyek Siluman Masih Jadi Bahan Nego

■ Agar APBA Diqanunkan

BANDA ACEH - Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 akan dibahas kembali 23-25 Januari 2017. Hal itu sebagai tindak lanjut setelah dicapai kesepakatan antara Pimpinan DPRA dan Plt Gubernur Aceh di Jakarta, Kamis (19/1) yang difasilitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan ST kepada *Serambi*

di Banda Aceh, Jumat (20/1), saat dimintai penjelasannya tentang tindak lanjut dari kesepakatan perpanjangan masa pembahasan RAPBA 2017 setelah pertemuan di Kemendagri.

Di sisi lain, sumber *Serambi* mengungkapkan, masalah utama molornya pembahasan dan pengesahan RAPBA 2017 senilai Rp 14,7 triliun itu bukan semata-mata karena pembahasan dokumen KUA-PPAS 2017

■ ke halaman 7

Proyek Siluman

antara Komisi-Komisi DPRA dengan SKPA belum tuntas. Tapi, juga karena adanya usulan 119 paket proyek senilai Rp 650 miliar (LSM MaTA menyebutnya sebagai "proyek siluman") yang belum juga di-*input* TAPA ke dalam dokumen KUA-PPAS 2017.

Semua proyek itu, utamanya, memang bermanfaat bagi rakyat, tapi karena datangnya terlambat menjelang pilkada, dikhawatirkan oleh pengambil keputusan di jajaran eksekutif, jika proyek itu dimasukkan sekarang, bisa memengaruhi pemilihan. Karenanya, usulan 119 paket proyek itu belum dimasukkan oleh pihak berwenang di eksekutif ke dokumen KUA dan APBA 2017.

Pihak pengusul meminta TAPA memasukkan 119 paket proyek tersebut ke dalam buku dokumen KUA-PPAS 2017 agar tak menjadi "penumpang gelap" dan aman untuk dilaksanakan pada tahun ini. Tapi, kalau usulan proyek itu tak ada yang masuk, bisa menjadi kendala untuk mempercepat pengesahan RAPBA pada 30 Januari 2017.

Proyek tersebut, kata sumber tadi, tersebar di 14 SKPA yaitu Badan Dayah, Dinas Kesehatan, Dispora, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga,

Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan Hewan, Koperasi dan UKM, Badan Arsip dan Perpustakaan, Dinas Sosial, dan Biro Umum Setda Aceh.

Sumber tadi berharap semoga RAPBA 2017 bisa diqanunkan pada 30 Januari 2017. "Kalau tidak, maka masyarakat Aceh, harus ikhlas menerima belanja pembangunan yang terbatas melalui Pergub APBA 2017," ujarnya.

Wakil Ketua II DPRA, T Irwan Djohan saat ditanyakan *Serambi* apakah dokumen KUA-PPAS RAPBA 2017 bisa diteken Rabu (25/1) mendatang jika usulan 119 paket proyek Rp 650 miliar yang belum masuk dokumen KUA-PPAS 2017 dan menjadi salah satu penghambat dokumen KUA-PPAS 2017 belum bisa diteken sampai kini, hal itu tak dijawab secara tegas oleh Irwan.

Ketika ditanya mengenai *deal-deal* lain di luar jadwal pembahasan KUA-PPAS maupun Rencana Kerja Anggaran (RKA) RAPBA dan Sidang Paripurna RAPBA 2017 yang telah disepakati apakah ada, Irwan mengatakan, soal itu tak ada dibicarakan dalam rapat dengan pihak Dirjen Bina Keuangan

Daerah Kemendagri.

Dalam rapat itu, lanjut Irwan, Dirjen Bina Keuangan Daerah hanya menyarankan, dokumen KUA-PPAS 2017 bisa disepakati dan diteken bersama pada hari Rabu (25/1), setelah itu Plt Gubernur Aceh menerbitkan surat edarannya pada hari Kamis (26/1) kepada SKPA untuk melanjutkan pembahasan RKA RAPBA 2017. Ini merupakan tahapan dari pembahasan RAPBA secara normal.

Setelah itu, barulah masuk tahap berikutnya, yaitu pembahasan RKA RAPBA yang dilanjutkan dengan sidang paripurna dua hari untuk pengesahan RAPBA 2017 menjadi qanun, 28-30 Januari 2017.

Ditambahkan, dalam pembahasan lanjutan dokumen KUA-PPAS 2017 itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah mengirim dua orangnya ke Aceh. Mereka merupakan tim supervisi dalam rangka percepatan pengesahan RAPBA 2017 menjadi qanun. Jadi, tidak disahkan melalui peraturan gubernur (pergub), sebagaimana diwacanakan Plt Gubernur Aceh, Soedarmo sejak 30 Desember lalu.

Namun demikian, kata Irwan, di dalam "Kesepakatan Jakarta" Kamis lalu itu, jika kedua belah pihak (DPRA dan Peme-

■ Sambungan halaman 1

rintah Aceh) tidak bisa mengesahkan RAPBA 2017 menjadi Qanun Aceh pada 30 Januari, maka RAPBA akan disahkan dengan pergub, bukan dengan qanun.

Menurut Irwan, Dirjen Bina Keuangan Daerah menyarankan agar RAPBA 2017 senilai Rp 14,7 triliun itu bisa diqanunkan demi menghindari pada akhir 2017 nanti tidak terjadi sisa anggaran (Silpa) hingga Rp 1,9 triliun. Karena itu, lanjut Irwan, jika RAPBA 2017 dipergubkan, maka anggaran yang bisa digunakan tahun ini hanya Rp 12,8 triliun atau sama seperti APBA 2016.

Pertimbangan itulah, lanjut Irwan, yang membuat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, meminta RAPBA 2017 dibahas kembali. "Usulan program yang belum masuk dibenahi kembali, terutama program rehab-rekon pascabencana alam yang terjadi di Aceh. Begitu juga dengan anggaran untuk urusan wajib yang belum terpenuhi, dipenuhi kembali," ujar Irwan.

Plot anggaran dimaksud, misalnya, gaji PNS di delapan dinas yang belum cukup untuk 12 bulan. Selain itu, usulan program diselaraskan dengan peruntasan program prioritas lima tahun Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Ber)

Selasa
24 Januari 2017



Muharuddin

Ketua DPRA: Kesepakatan Jakarta akan Disikapi

SEMENTARA itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal dan Ketua Fraksi Partai Golkar, Aminuddin ikut dalam pertemuan dengan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin di Gedung DPRA, Senin kemarin. Pertemuan itu justru untuk menanyakan tindak

lanjut atas kesepakatan Jakarta, kenapa pada hari Senin (23/1) belum dilaksanakan juga pembahasan lanjutan RAPBA 2017.

Menanggapi pertanyaan Fraksi PAN, Golkar, dan

■ ke halaman 7

Ketua DPRA:

Fraksi PPP, kata Asrizal, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, kesepakatan Jakarta itu akan disikapi dengan melakukan rapat Banggar DPRA lebih dulu pada hari ini, Selasa (24/1). Kemudian, akan dilanjutkan dengan rapat Bamus untuk penyusunan jadwal sidang paripurna pengesahan RAPBA 2017.

Dalam pertemuan dengan Ketua DPRA, kata Asrizal, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PAN, maupun Fraksi PPP berharap kepada Ketua DPRA Muharuddin, untuk menyikapi kesepakatan Jakarta tepat waktu.

Apalagi pimpinan Banggar DPRA sudah menan-

datangani kesepakatan itu, maka harus komit untuk menuntaskannya.

"Keputusan dua orang Pimpinan Banggar DPRA, Muharuddin dan Irwan Djohan yang mewakili seluruh anggota DPRA itu, harus bisa dibuktikan dengan mengesahkan RAPBA 2017, sesuai komitmen yang sudah ditandatangani di Jakarta, yakni paling lambat 30 Januari 2017," ujar Asrizal.

Wakil Ketua III DPRA, Dalimi SE yang dimintai tanggapannya mengatakan, DPRA sudah berjanji kepada Plt Gubernur, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), dan Dirjen Bina Keuangan Dae-

■ Sambungan halaman 1

rah Mendagri serta rakyat Aceh, untuk menuntaskan RAPBA paling lambat 30 Januari 2017, maka itu harus dituntaskan sesuai janji yang sudah ditandatangani bersama.

"Tidak ada yang lebih penting, kecuali menuntaskan pengesahan RAPBA 2017 lebih dulu, sesuai jadwal yang telah disepakati. Jika itu tidak dilakukan tepat waktu, maka marwah DPRA sebagai lembaga legislatif di depan rakyat bisa menurun. Oleh karena itu, semua anggota DPRA diberi dukungan penuh agar RAPBA 2017 bisa dituntaskan pada 30 Januari 2017," demikian Dalimi. (her)

SELASA 24 JANUARI 2017 ♦ 25 RABIUL AKHIR 1438 H

Sekda-Ketua DPPRA Bertemu 15 Menit

■ Tak Ada Pembahasan KUA-PPAS

“Sampai kini belum ada tambahan usulan proyek baru yang masuk dalam dokumen KUA-PPAS 2017.”

-- **JAMALUDDIN**,
Kepala Dinas
Keuangan Aceh



BANDA ACEH - Sampai Senin (23/1) sore, di Gedung DPPRA tidak terlihat adanya pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017, sebagaimana pernah disampaikan Wakil Ketua II DPPRA, Teuku Irwan Djohan. Yang ada hanyalah pertemuan Sekda Aceh, Drs Dermawan MM

selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh dengan Ketua DPPRA, Tgk Muhammad sebagai Ketua Badan Anggaran DPPRA. Tapi pertemuan itu hanya berlangsung 15 menit.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Aceh Dermawan didampingi Kepala Dinas Keuangan Aceh Jamaluddin MSI dan Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir Rizal As-

wandi. Hadir juga Ketua DPPRA, didampingi Ketua Komisi DPPRA yang membidangi infrastruktur, yakni Anwar Ramli dan Sekretaris Komisi D, Zulpadhlil.

Pertemuan Sekda Aceh dengan Ketua DPPRA itu, berlangsung singkat, sekitar 15 menit, antara pukul 10.45-11.00 WIB. Setelah

■ ke halaman 7

Sekda-Ketua

Sekda bersama dua Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) ke luar dari ruang Pimpinan DPRA, Ketua DPRA pun melanjutkan rapat dengan sejumlah ketua fraksi. Antara lain, dengan Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Golkar.

Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin MSI yang diminta penjelasannya mengenai tujuan kunjungan Ketua TAPA dengan Ketua DPRA itu mengatakan, Ketua TAPA Dermawan dan ia bersama Kadis Bina Marga Aceh, Rizal Aswandi, berhimpun di ruang Ketua DPRA, untuk menanyakan jadwal baru kelanjutan pembahasan RAPBA 2017.

Di sisi lain, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang difasilitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Mendagri di Jakarta, Kamis (19/1) untuk melanjutkan pembahasan RAPBA 2017 agar bisa diqanunkan pada 30 Januari 2017.

Kunjungan Ketua TAPA menemui Ketua Banggar DPRA itu, kata Jamaluddin, atas perintah dan arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo kepada Ketua TAPA dan anggotanya. Tujuan pertemuan itu sedianya mempertanyakan jadwal baru kelanjutan pembahasan RAPBA 2017 kepada Ketua DPRA, guna menyikapi hasil kesepakatan di Jakarta.

Salah satu poin isi kesepakatan Banggar DPRA dengan Plt Gubernur dan TAPA yang telah ditandatangani bersama dan mengetahui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mendagri, Dr Reydonnizar Moenek pada Kamis (19/1) pekan ini adalah menyepakati penuntasan RAPBA 2017, paling lambat 30 Januari 2017. Jika pada tanggal tersebut belum juga bisa dituntaskan, maka RAPBA 2017 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) saja, kemudian diproses untuk mendapat pengesahan dari Mendagri sesuai ketentuan undang-undangan.

DPRA, Plt Gubernur, dan TAPA diberi waktu delapan hari kerja untuk menuntaskan RAPBA menjadi Qanun APBA 2017, karena itu Plt Gubernur memerintahkan Sekda Aceh untuk menanyakan jadwal baru pembahasan lanjutan RAPBA agar bisa disepakati pengesahannya paling lambat 30 Januari 2017.

Selain menanyakan jadwal baru pembahasan RAPBA, juga ditanyakan apa ada hal lain yang dibahas. Misalnya, usulan 119 paket proyek baru senilai Rp 650 miliar yang belum di-input dalam KUA dan PPAS serta menjadi salah satu faktor penyebab dokumen KUA dan PPAS 2017 sampai kini belum disepakati atau diteken bersama.

■ Sambungan halaman 1

Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin mengatakan, sampai kini belum ada tambahan usulan proyek baru yang masuk dalam dokumen KUA-PPAS 2017. Kendati dalam Nota Keuangan RAPBA 2017 yang disampaikan Plt Gubernur kepada Banggar DPRA sebelumnya ada penambahan belanja sekitar Rp 150 miliar dari Rp 14,5 triliun menjadi Rp 14,7 triliun. Ini adalah belanja untuk pembayaran honorarium 11.552 guru kontrak SMA/SMK dari kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Pemerintah Aceh. Sebelumnya malah belum masuk dalam dokumen KUA dan PPAS 2017, serta kekurangan belanja urusan wajib di sejumlah SKPA.

Plt Gubernur Aceh, Soedarmo dalam arahannya kepada TAPA, kata Jamaluddin, menegaskan tidak ada tambahan proyek baru dalam KUA dan PPAS 2017. Proyek infrastruktur dan lainnya yang ada dalam RAPBA semuanya milik Pemerintah Aceh dan sebesar-besarnya akan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

Plt Gubernur Aceh Soedarmo berharap DPRA menyikapi hasil kesepakatan yang telah diteken sesuai jadwal yang telah disepakati, paling lambat bisa disahkan RAPBA 2017 pada 30 Januari 2017. (her)

Rabu.
25 Januari 2017

KUA dan PPAS 2017 Diteken

BANDA ACEH - Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh, akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2017 senilai Rp 14,7 triliun. Dokumen yang menjadi syarat pembahasan lanjutan RAPBA 2017 ini, ditandatangani

atau diteken pada pukul 23.45 WIB, Selasa (24/1) malam tadi.

Dari pihak legislatif, dokumen ini ditandatangani oleh tiga Pimpinan Banggar DPRA, yaitu Tgk Muharudin (Ketua DPRA), Irwan Johan (Wakil Ketua II), dan

■ ke halaman 7

KUA dan PPAS

Dalimi (Wakil Ketua III). Sementara, dari Pemerintah Aceh, Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI Purn Soedarmo diwakili Sekda Aceh, Dermawan. Informasi diperoleh, Soedarmo yang masih menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, tidak bisa hadir karena masih berada di Jakarta dalam rangka dinas.

Penandatanganan dokumen yang merupakan rancangan dokumen RKA RAPBA 2017 ini disaksikan oleh para anggota Banggar DPRA dan TAPRA. Kesepakatan ini merupakan

bagian dari tindak lanjut kesepakatan pertemuan yang difasilitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, di Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPRA dengan Plt Gubernur Aceh bersepakat akan menuntaskan pembahasan RAPBA 2017 untuk menjadi dasar APBA paling lambat 30 Januari 2017. Jika sampai tanggal tersebut belum ada kesepakatan untuk mengesekannya, maka Plt Gubernur Aceh akan menandatangani RAPBA 2017 dalam

Peraturan Gubernur (pergub), setelah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Setelah penandatanganan dokumen KUA dan PPAS 2017, langkah berikutnya, Rabu (26/1) hari ini Plt Gubernur Aceh akan menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk pembahasan RKA RAPBA 2017 yang dijadwalkan disahkan DPRA dalam rapatnya pada tanggal 29-30 Januari 2017.

Menurut informasi dari salah seorang anggota TAPRA, Plt Gubernur itu sudah disiapkan. Harapannya, ketika dokumen

■ Sambungan halaman 1

KUA dan PPAS ditandatangani, maka SE Gubernur itu akan diterbitkan dan diberikan kepadasesua SKPA untuk melanjutkan pembahasan RKA RAPBA.

Sementara pihak legislatif akan melanjutkan tahapan dengan melaksanakan rapat Bamus DPRA untuk menyusun dan menetapkan jadwal sidang paripurna pembahasan dan pengesahan RAPBA 2017. Berdasarkan kesepakatan, sidang paripurna ini akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 Januari 2017. (her)

Serambi Politik

serambinews.com

6

Kamis
26 Januari 2017

Otsus Dibatasi, DPRA Mengeluh

■ Hanya Boleh Usulkan Proyek di Atas Rp 500 Juta

“Kami sekali lagi mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat yang usulannya pada tahun anggaran 2017 ini belum bisa dipenuhi.”

-- **MUHARUDDIN**, Ketua DPRA

BANDA ACEH - Kalangan DPRA menilai Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 89 tahun 2015 yang membatasi usulan proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) tidak boleh membiayai usulan program pembangunan di bawah nominal Rp 500 juta, membuat peluang anggota DPRA untuk membiayai usulan yang datang dari masyarakat menjadi terbatas. “Untuk itu, kami sekali lagi mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat yang usulannya pada tahun anggaran 2017 ini belum bisa

dipenuhi,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin kepada Serambi, Rabu (25/1) di Banda Aceh.

Dikatakan Muharuddin, tidak semua usulan masyarakat itu membutuhkan biaya di atas Rp 500 juta. Banyak juga yang cukup dengan dana Rp 150-200 juta saja. Namun, karena ada Pergub tersebut, DPRA tidak bisa mengalokasikan pembiayaan dana otsus untuk program yang diusulkan masyarakat.

Ungkapan serupa juga dilontarkan Ketua Fraksi PAN, Asrizal. Asrizal mengatakan, dirinya kurang sependapat dengan tujuan

dari Pergub 89 Tahun 2015, yang membuat usulan masyarakat di bawah Rp 500 juta tidak bisa ditampung, padahal usulan yang disampaikan masyarakat itu sangat mendesak.

Dia menyontohkan usulan untuk membuat tempat wudu, toilet, dan WC meunasah dan masjid, hanya membutuhkan anggaran Rp 100 - Rp 200 juta. Tapi karena sumber dana aspirasi program anggota DPRA semuanya bersumber dari dana otsus, kata dia, usulan masyarakat tersebut tidak bisa dibiayai.

Begitu juga dengan pembangunan jembatan gantung, jembatan kerangka baja, beton, dan jalan yang menghubungkan antar-desa dan kecamatan yang hanya butuh dana di bawah Rp 500 juta. Itu sebabnya, Asrizal berharap Pergub Nomor 89 Tahun 2015 itu perlu ditinjau ulang. (her)

Selasa
31 Januari 2017

Bang Leman Diaktifkan sebagai Wakil Ketua I DPRA

BANDA ACEH - Ada pemandangan tak biasa pada Sidang Paripurna RAPBA 2017 di Gedung DPRA, Senin (30/1). Drs Sulaiman Abda MSI yang sejak medio Juni 2016 tak lagi duduk di jajaran pimpinan sidang paripurna, kemarin wajahnya mulai terlihat lagi.

Ternyata, sejak Senin, 30 Januari kemarin, Bang Leman--begitu sapaan akrabnya--sudah aktif kembali sebagai Wakil Ketua I DPRA dari Fraksi Partai Golkar. Hal itu ditandai dengan telah dibolehkannya ia masuk dalam sidang paripurna dewan saat pengesahan RAPBA menjadi Qanun APBA 2017. Pengaktifan kembali Drs



Sulaiman Abda

Sulaiman Abda MSI sebagai Wakil Ketua DPRA, setelah pada pembukaan Sidang Pari-

purna RAPBA 2017, Minggu (29/1) malam, Sekretaris DPRA, A Hamid Zein MHum membacakan surat masuk dari Pengurus DPD Partai Golkar Aceh Nomor B.150/DPD-1/GK/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Aceh, Drs H Teuku Muhammad Nurlif SE dan Wakil Sekretaris, Roys Vahlevi Mahmud ST tentang penghentian usulan pengganti antarwaktu (PAW) Pimpinan DPRA dari Fraksi Partai Golkar yang ditujukan kepada Ketua DPRA.

Sebagaimana pernah dibe-

■ ke halaman 7

Bang Leman

ritakan tahun lalu, Sulaiman Abda selaku mantan ketua DPD Partai Golkar Aceh yang menjabat Wakil Ketua I DPRA dari Fraksi Partai Golkar pernah diusul DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Aceh untuk diganti dengan anggota separtainya, yakni Muhammad Saleh, pada 15 Juni 2016 untuk menjadi Wakil Ketua I DPRA dari Fraksi Partai Golkar.

Tapi surat masuk dari DPD Partai Golkar Aceh pada 12 Oktober 2016 itu telah memulihkan kedudukan Sulaiman Abda di DPRA. Isi surat itu, antara lain, menghentikan proses PAW Pimpinan DPRA dari Fraksi Partai Golkar, yakni dari Drs Sulaiman Abda MSI kepada Muhammad Saleh SPdI. Surat itu juga menegaskan bahwa Drs Sulaiman Abda MSI sebagai Pimpinan DPRA dari Fraksi Partai Golkar Aceh.

Surat itu juga mencabut surat DPP Partai Golkar Nomor B-356/Golkar/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, perihal penggantian Pimpinan DPRA dari Fraksi Partai Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar Aceh menyurati Ketua DPRA tentang penghentian proses usulan PAW Pimpinan DPRA dari Fraksi Partai Golkar,

berdasarkan surat Ketua Umum DPD Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Nomor: B-718/Golkar/IX/2016 tanggal 30 September 2016, perihal yang sama, sebagaimana isi surat DPD Partai Golkar Aceh yang ditujukan kepada Ketua DPRA.

Ini artinya, masa "mengambang" Sulaiman Abda selama delapan bulan lebih sejak penyampaian surat masuk pengurus DPD Partai Golkar Aceh dalam pembukaan sidang Paripurna RAPBA 2017 di Gedung DPRA, Minggu (29/1) malam, sudah berakhir.

Hal itu dibuktikan, pada sidang lanjutan Paripurna RAPBA, Senin (30/1), dengan agenda jawaban/tanggapan Plt Gubernur Aceh terhadap pendapat Banggar DPRA tentang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBA 2017 yang dipimpin Wakil Ketua III DPRA, Dalimi SE, didampingi Wakil Ketua II, Teuku Irwan Djohan ST, dan Drs Sulaiman Abda yang menjabat Wakil Ketua I DPRA dari Fraksi Partai Golkar.

Saat itu Bang Leman dipersilakan masuk dan duduk sejajar di deretan Pimpinan DPRA bersama Sekda Aceh, Drs Dermawan

MM yang saat itu mewakili Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo untuk penyampaian jawaban/tanggapan Gubernur Aceh terhadap pendapat Banggar DPRA tentang Nota Keuangan dan RAPBA 2017 yang disampaikan Plt Gubernur Aceh.

Pada saat Sulaiman Abda memasuki ruang sidang paripurna, sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan anggota legislatif yang hadir dalam ruang sidang bertepuk tangan ramai-ramai dan menyalami politisi senior dari Partai Golkar itu, sebagai rasa kegembiraan mereka.

Sulaiman Abda juga menyatakan terima kasih atas dukungan dan doa masyarakat serta seluruh anggota DPRA dan SKPA, sehingga dirinya diaktifkan kembali menjadi salah satu Pimpinan DPRA. "Terima kasih, terima kasih, terima kasih," tuturnya.

Sulaiman Abda adalah salah satu dari 16 orang Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia yang diusul PAW dari pimpinan legislatif oleh Pengurus DPP Partai Golkar yang lama pada saat masih terjadi dualisme kepemimpinan Partai Golkar di pusat.

Tapi hanya dia yang sampai kini masih tetap

■ Sambungan halaman 1

bertahan menjadi anggota legislatif dan Wakil Ketua I DPRA dari Fraksi Partai Golkar.

Pembacaan surat-surat masuk ke DPRA pada Sidang Paripurna DPRA, kata Sekretaris DPRA, A Hamid Zein, sudah menjadi prosedur tetap dalam pembukaan masa persidangan paripurna yang akan digelar DPRA.

Pada pembukaan sidang paripurna RAPBA 2017 Minggu malam itu, tidak hanya surat dari pengurus DPD Partai Golkar saja yang dibacakan A Hamid Zein selaku Sekwan, tapi juga ada beberapa surat lainnya.

Antara lain, surat Sekda Aceh, Drs Dermawan MM, tentang Penyampaian Nota Keuangan RAPBA 2017, surat dari Fraksi PAN mengenai pengisian Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PAN dari Mawardi Ali kepada Sulaiman Ali, surat dari Fraksi Partai Aceh mengenai pergantian personalia alat kelengkapan Dewan dari Fraksi Partai Aceh, dari Muhammad Amru kepada Yahdi Hasan yang duduk di Komisi VIII, serta surat dari Fraksi Golkar mengenai penempatan anggota Fraksi Partai Golkar, Wan Iskandar SE pada Komisi VII DPRA. (her)

APBA 2017 Ketuk Palu

■ Fraksi Sampaikan Persetujuan Bersyarat

BANDA ACEH - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2017 senilai Rp 14,765 triliun akhirnya disahkan melalui qanun pada pukul 18.30 WIB, Senin (30/1), dalam Sidang Paripurna DPRA di Gedung Utama DPRA. Ketuk palu RAPBA menjadi Qanun APBA 2017 dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRA Irwan Djohan, setelah seluruh fraksi di DPRA dalam penyampaian pendapat akhirnya menyetujui rancangan anggaran tersebut diqanunkan.

Paripurna pengesahan

RAPA 2017 tadi malam, dipimpin oleh Irwan Djohan didampingi Ketua DPRA Tgk Muharuddin dan Wakil Ketua III, Dalimi. Sementara dari eksekutif diwakili oleh Sekda Aceh, Dermawan. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmono, pada 30 Desember 2016 sempat mewacanakan hendak mempergubkan RAPBA itu. Hal yang sama dia ulang lagi pada 4 Januari 2017 karena pembahasan dan pengesahan dokumen Ke-

■ ke halaman 7

Serambi Politik

ri 2017

Ada Kepentingan Politik dalam Polemik APBA

ah pembangunan Aceh, ke APBA selama ini? Apakah kelompok masyarakat yang a manfaat dari APBA?"

USTA MUKHTAR,
Direktur AJMI

thami-
cangan
Belanja
menja-
ngat di
it Aceh.
al Mon-
AJMI),
menilai
litik da-
ahasan
sedang

stern Al Yamani, mantan Presiden Mahasiswa Univer-
sitas Abulyatama dan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketengaker-
jaan Bappeda Aceh, Marthunis.
Polemik APBA, ulas Agus-
ta, semata-mata karena ada kepentingan politik, bukan kepentingan masyarakat.
DPPRA, menurutnya, harus bertanggung jawab atas ket-
ertambatan pengesahan APBA. "Ada beberapa hal yang bisa kita lihat, seperti pada pembahasan APBA ada polimik di mana Pl Gubernur ingin mempergubkan. Bagi saya apa yang terjadi saat ini bukan hal yang besar, tapi dibesar-besarkan, sebab mempergubkan APBA di-

bolehkan kok oleh undang-undang," katanya.
la tambahkan, batas akhir pembahasan RAPBA 2017 hingga akhir Desember 2016, tapi hingga kini belum juga tuntas. Terkait keterlambatan tersebut, pl Gubernur Aceh, Soedarmo menolotr pembahasan hingga 15 Januari 2017, jika tidak tuntas, maka RAPBA 2017 akan dipergubkan.
"Sekarang sudah terlambat beberapa hari, ini harus kita diskusikan bukan membesar-besarkan masalah ini," ujar dia.
Direktur AJMI ini berpendapat bahwa dalam se-puluh tahun terakhir pengesahan APBA selalu terlambat. Apabila ini terus

berlanjut, sudah pasti proses realisasi APBA di lapangan akan bermasalah. Ia juga mempertanyakan arah pembangunan Aceh kedepan jika hal ini terus dibelakan. Sementara keadaan ekonomi masyarakat semakin tertinggal.
"Apakah APBA hari ini memenuhi sektor kehidupan masyarakat? Dilematis kita lihat hari ini, di mana Aceh peringkat dua termiskin se-Sumatera. Kalau kemiskinan terus meningkat, ke mana arah pembangunan Aceh, ke mana dibawa APBA selama ini? Apakah hanya untuk sekelompok masyarakat yang menerima manfaat dari APBA?" tanya Agussta Mukhtar.

Karena itu, dia menuntut agar pembahasan dana rak-yat dilakukan secara transparan. Menurutnya, selama ini banyak 'siluman' yang mengatasnamakan rakyat menaruh uang Aceh. Sementara kehidupan masyarakat tidak berubah dan terus dalam keadaan miskin. "Kita mendorong eksekutif dan legislatif menghentikan polemik pembahasan APBA, tapi segera saahkan APBA. Bagi saya tidak masalah dipergubkan ataupun disahkan berdasarkan ganun," tegasnya.
Sementara itu, mantan presiden mahasiswa Univer-
sitas Abulyatama, Muslim Al Yamani menilai, ada kekdak-

nyamanan masyarakat terhadap pembahasan anggaran oleh dewan. Jika berka-ca pada tahun-tahunsebelumnya, banyak temuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menjadi perhatian publik, seperti dana banjos, dana hibah, dan pengadaan yang tidak logis.
"Keberpihakan anggaran selama ini tidak perlu diper-tanyakan. Apakah prorakyat atau tidak, slakan nilai sendiri. Bagi saya ini pro bagi pejabat. Realitas yang terjadi selama ini di kalangan masyarakat perlu diakriti, kita harus kawal bersama anggaran ini. Anggaran yang disahkan tidak boleh lagi tidak rasional," ungkap Muslim Al Yamani (masj)

@serambinews

@serambinews

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Melani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Paloh Nibong/20 Juli 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 140401154
9. Alamat : Perumahan Budha Suci Barat 7 Nomor 34,
Gampong Panteriek, kec. Lueng Bata Banda
Aceh
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Abdullah
 - b. Ibu : Habsah
11. Pekerjaan : -
12. Alamat : Perumahan Budha Suci Barat 7 Nomor 34,
Gampong Panteriek, kec. Lueng Bata Banda
Aceh
13. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun : SD Negeri 1 Ujong Rimba 2002-2008
 - b. Tahun : SMP Negeri 14 Banda Aceh 2008-2011
 - c. Tahun : SMAN 11 Banda Aceh 2010-2014
 - d. Tahun : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Desember 2018.

Banda Aceh, 7 Januari 2019
Penulis,

Melani